

**PENGARUH PENANAMAN MODAL ASING,  
PENANAMAN MODAL DALAM NEGERI, DAN  
BELANJA MODAL TERHADAP PRODUK  
DOMESTIK REGIONAL BRUTO (PDRB)  
PROVINSI JAWA TENGAH**



**SKRIPSI**

Diajukan sebagai salah satu syarat  
untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1)  
pada Program Sarjana Fakultas Ekonomi  
Universitas Diponegoro

Disusun oleh :

**ELVANY NOOR AFIA  
NIM. C2B606025**

**FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS DIPONEGORO  
SEMARANG  
2010**

## PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama Penyusun : Elvany Noor Afia  
Nomor Induk Mahasiswa : C2B 606025  
Fakultas/Jurusan : Ekonomi / IESP  
Judul Skripsi : **”PENGARUH PENANAMAN MODAL ASING (PMA), PENANAMAN MODAL DALAM NEGERI (PMDN) DAN BELANJA MODAL TERHADAP PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO (PDRB) PROVINSI JAWA TENGAH”**  
Dosen Pembimbing : Prof. Dr. FX Sugiyanto, MS

Semarang, September 2010

Dosen Pembimbing

(Prof. Dr. FX Sugiyanto, MS)

NIP. 195810081986031002

## **PENGESAHAN KELULUSAN UJIAN**

Nama Penyusun : Elvany Noor Afia

Nomor Induk Mahasiswa : C2B 606025

Fakultas / Jurusan : Ekonomi / IESP

Judul Skripsi : ” **PENGARUH PENANAMAN MODAL ASING (PMA), PENANAMAN MODAL DALAM NEGERI (PMDN) DAN BELANJA MODAL TERHADAP PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO (PDRB) PROVINSI JAWA TENGAH**”

**Telah dinyatakan lulus ujian skripsi pada tanggal 2010**

Tim Penguji

1. (.....)
2. (.....)
3. (.....)

## **PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI**

Yang bertanda tangan di bawah ini saya, Elvany Noor Afia, Menyatakan bahwa skripsi dengan judul : Pengaruh Penanaman Modal asing (PMA), Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), Dan Belanja Modal Terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi Jawa Tengah adalah hasil tulisan saya sendiri. Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya ambil dalam cara menyalin atau meniru dalam bentuk rangkaian kalimat atau simbol yang menunjukkan gagasan atau pendapat atau pemikiran dari penulis lain, yang saya akui seolah-olah sebagai tulisan saya sendiri, dan/atau tidak terdapat bagian atau keseluruhan tulisan yang saya salin, tiru, atau yang saya ambil dari tulisan orang lain tanpa memberikan pengakuan penulis aslinya.

Apabila saya melakukan tindakan yang bertentangan dengan hal tersebut diatas, baik disengaja maupun tidak, dengan ini saya menyatakan menarik skripsi yang saya ajukan sebagai hasil tulisan saya sendiri ini. Bila kemudian terbukti bahwa saya melakukan tindakan menyalin atau meniru tulisan orang lain seolah-olah hasil pemikiran saya sendiri, berarti gelar dan ijazah yang diberikan oleh universitas batal saya terima.

Semarang, September 2010

Yang membuat pernyataan,

Elvany Noor Afia  
NIM : C2B 606025

# ***MOTTO***

❖ *sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku dan matiku, hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam.*

***(QS. Al-An'am 6:162)***

❖ *Allah tidak akan membebani seseorang melainkan sesuai dengan kemampuannya.*

***(QS. Al Mu'minun:62)***

❖ *Tak ada rahasia untuk menggapai sukses. Sukses itu dapat terjadi karena persiapan, kerja keras, dan mau belajar dari kegagalan.*

***(General Colin Powell)***

❖ *Ada saatnya menangis dan bersedih, ada saatnya tersenyum dan tertawa, karena Tuhan menjadikan segala sesuatu indah pada waktunya*

***(No Name)***

❖ *Sesungguhnya sesudah Kesulitan itu pasti ada Kemudahan.*

***(QS. Asy Syarh:5&6)***

## **PERSEMBAHAN**

### **ALLAH SUBHANA WATA`ALA**

*Yang telah Memberikan jalan, Kemudahan dan kekuatan dalam hidup ku ini*

### **NABI MUHAMMAD S.A.W**

*Sebagai suri tauladan kita, menuju jalan\_Nya*

### **Bapak dan Ibuku Tercinta**

*Untuk Doa serta Nasehat yang terus diberikan tanpa mengenal waktu demi  
Kesuksesan dan Kebahagiaanku, Untuk kasih sayang yang tak tergantikan dari  
Tiap hembusan nafasmu yang telah berlalu bersama waktu dan Tidak akan pernah  
Bisa tergantikan sampai kapanpun*

### **Kakak dan Adikku**

*Untuk rasa cinta dan kasih sayang dalam kehidupan sehari-hari*

### **Seseorang yg mengisi ruang hatiku**

*Cinta dan kasih sayangmu adalah motivasi dalam hidupku*

### **Sahabat & teman-temanku**

*Yang slalu mendoakanku & membantuku dalam segala hal*

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji syukur kepada Allah SWT karena atas berkat, rahmat dan karuniaNya, penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul ” **PENGARUH PENANAMAN MODAL ASING (PMA), PENANAMAN MODAL DALAM NEGERI (PMDN) DAN BELANJA MODAL TERHADAP PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO (PDRB) PROVINSI JAWA TENGAH**” sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Sarjana Strata Satu (S1) pada Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro dengan baik.

Dalam proses penyelesaian skripsi ini, banyak pihak yang telah berperan memberikan bimbingan, bantuan, kerja sama, dorongan dan semangat sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Melalui lembar halaman ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Dr. H. M Chabachib, MSi. Akt., selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro Semarang.
2. Bapak Prof. Dr. FX Sugiyanto, MS selaku Dosen Pembimbing yang telah banyak membantu dalam memberikan bimbingan dan arahan dengan penuh kesabaran dan keikhlasan dalam penyusunan skripsi ini serta baik hati.
3. Bapak, Drs. H Edy Yusuf Agung Gunanto, Msc. Ph.d, selaku Dosen Wali yang telah banyak membantu selama menjalani kuliah di Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro Semarang yang baik hati.

4. Ibu Evi Yulia Purwanti, SE. MSi, selaku Ketua Jurusan IESP reguler II Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro Semarang yang baik hati.
5. Keluargaku, bapak dan ibuku tercinta (Noor M. Abidun, SPd dan Aminah, SPd), kakakku dan iparku (Lely Noor Janna, SE dan Yulianto, SPd) dan adikku Alvina Noor Arifa, untuk dorongan dan perhatian yang tidak pernah habis serta doa yang tidak pernah putus. Semoga penulis dapat memberikan yang terbaik untuk kalian.
6. Bapak dan Ibu Dosen, yang telah memberi bekal ilmu yang tidak ternilai harganya selama belajar di Jurusan IESP FFakultas Ekonomi Universitas Diponegoro Semarang.
7. Para staff tata usaha dan perpustakaan reguler I dan II, yang telah membantu dalam memberikan informasi dan arahan untuk pengumpulan data kepada penulis selama melakukan studi dan penyelesaian skripsi di Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro Semarang.
8. Pimpinan dan staff BPS dan BPMD provinsi Jawa Tengah yang telah memberikan ijin dan kesempatan kepada penulis untuk mencari dan mengcopy data-data yang dibutuhkan dalam rangka penyelesaian skripsi ini.
9. Seseorang yang mengisi ruang hatiku, terimakasih atas cinta dan sayang selama dua tahun ini, terimakasih telah mendampingiku saat suka dan duka.
10. Sobat-sobat dan teman-teman : spesial thanks to Cindy Astaria dan Exy Fadhillah, “makasih atas keceriaan dan persahabatan yang kalian berikan kepadaku”. Maz Fredy “makasih udah mau dengerin curhatan aku kalo lagi sebel, maaf mungkin banyak merepotkan”. Mbak Uki, Mbak Uvi dan Pak

Heru atas bantuan, dorongan, solusi, dan sarannya yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini.

11. Keluarga besar teman-teman IESP angkatan 2004 dan 2005, 2006 serta 2007 yang telah mewarnai proses kehidupanku, terimakasih atas kebersamaan, perhatian, kerja sama, tawa-canda, dan rasa kekeluargaanya.
12. Terimakasih untuk teman-teman kos di Pleburan 5 No.6 atas pengertian dan semua cerita indah yang tidak mungkin tergantikan.
13. Teman-teman di Polres Brebes, terimakasih atas dorongan, motivasi, doa dan bantuannya selama ini.
14. Teman2 KKN PPM Undip II Desa Diwak Kecamatan Bergas, terimakasih untuk kenangan sebulan yang indah dan persahabatan kalian hingga kini.

Akhirnya dengan segala hormat dan kerendahan hati, penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi para pembaca dan pihak yang membutuhkan.

Wassalammu'alaikum Wr.Wb.

Semarang, September 2010  
Penulis

Elvany Noor Afia

## ABSTRAK

Pentingnya peran modal untuk proses pembangunan ekonomi di suatu negara berkembang dan Provinsi Jawa Tengah khususnya menjadi permasalahan yang menarik untuk diteliti. Permasalahan yang dikaji adalah mengembangkan model untuk melihat faktor-faktor meliputi penanaman modal baik dari pihak swasta (PMA dan PMDN) maupun pemerintah (belanja modal) memiliki pengaruh yang signifikan terhadap PDRB Jawa Tengah, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang dengan menggunakan data pada periode tahun 1978-2008. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh penanaman modal asing, penanaman modal dalam negeri serta belanja pembangunan terhadap Produk Domestik Bruto Provinsi Jawa Tengah baik secara simultan maupun parsial.

Metode analisis yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah model ekonometrik dengan pendekatan kointegrasi dan model dinamis dengan pendekatan ECM (*Error Correction Model*) menggunakan bantuan program E-views versi 5. Penggunaan model ini bertujuan untuk menganalisa secara teoritik dan empirik apakah model yang dihasilkan konsisten dengan teori atau tidak.

Hasil regresi linier berganda dapat kita ketahui Penanaman Modal Asing (PMA), Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Belanja Modal dengan estimasi ECM berpengaruh terhadap nilai PDRB di Jawa Tengah. Dalam jangka pendek ditemukan bahwa variabel PMA mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap nilai PDRB Jawa Tengah. Dalam Jangka panjang apabila variabel Penanaman Modal Asing mengalami peningkatan sebesar 1%, *ceteris paribus*, maka akan meningkatkan nilai PDRB di Jawa Tengah sebesar 77%. Dalam jangka panjang hubungan antara PMDN dengan nilai PDRB Jawa Tengah adalah positif dimana setiap kenaikan nilai PMDN sebesar 1%, *ceteris paribus*, akan menyebabkan peningkatan nilai PDRB Jawa Tengah sebesar 80%. Jangka panjang hubungan antara Belanja Modal dengan nilai PDRB Jawa Tengah adalah positif namun tidak signifikan dimana setiap kenaikan nilai belanja modal sebesar 1%, *ceteris paribus*, akan menyebabkan peningkatan nilai PDRB Jawa Tengah sebesar 29%.

Kata Kunci : Nilai PDRB Provinsi Jawa Tengah, Penanaman Modal Asing, Penanaman Modal Dalam Negeri, Belanja Modal.

## **ABSTRACT**

*The importance of the role of capital for economic development process in a developing country and the province of Central Java in particular becomes an interesting problem to be investigated. The problem studied is to develop a model to look at the factors include a good investment from the private sector (foreign and domestic) and government (capital expenditure) has a significant impact on GDP of Central Java, in both the short and long term by using the data in the period years 1978-2008. The purpose of this study is to analyze the influence penanaman foreign capital, domestic investment and development spending to Gross Domestic Product of Central Java province either simultaneously or partial.*

*Analytical methods to be used in this study is the econometric model with cointegration approach and a dynamic model approach to ECM (Error Correction Model) using E-Views program version 5. Use of this model aims to analyze theoretically and empirically whether the resulting model is consistent with the theory or not.*

*Regression results shows that we can know the Foreign Investment (PMA), the Domestic Investment (PMDN) and Capital Expenditures with an estimated ECM influence on the GDP in Central Java. In the short term PMA found that variables and Capital Expenditures having a positive but not significant effect on the value of GDP of Central Java. In the long term if the variable Foreign Investment increased by 1%, ceteris paribus, it will increase the value of GDP in Central Java at 77%. In the long term relationship between domestic investment to GDP value is positive, Central Java, where every increase in value of domestic investment amounted to 1%, ceteris paribus, will cause an increase in the value of GDP amounted to 80% of Central Java. Long-term relationship between Capital Expenditures of Central Java, GRDP value is positive but not significant with each increase in value of Capital Expenditure amounted to 1%, ceteris paribus, will cause an increase in the value of GDP amounted to 29% of Central Java.*

*Keywords: Gross Value of Central Java, Foreign Investment, Domestic Investment, Capital Expenditures.*

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL .....	i
PERSETUJUAN SKRIPSI .....	ii
PENGESAHAN KELULUSAN UJIAN .....	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI .....	iv
MOTTO .....	v
PERSEMBAHAN .....	vi
KATA PENGANTAR .....	vii
ABSTRAKSI .....	x
DAFTAR ISI .....	xi
DAFTAR TABEL .....	xv
DAFTAR GAMBAR .....	xvi
DAFTAR LAMPIRAN .....	xv
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	12
1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	13
1.4 Sistematika Penulisan .....	14
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b>	
2.1 Landasan Teori .....	16
2.1.1 Pengertian Pertumbuhan Ekonomi .....	16

2.1.2 Pembentukan Modal .....	34
2.1.2.1 Penanaman Modal Swasta .....	36
2.1.2.1 Penanaman Modal Pemerintah .....	37
2.2 Penelitian Terdahulu .....	39
2.3 Kerangka Pemikiran Teoritis .....	43
2.4 Hipotesis .....	46

### **BAB III METODE PENELITIAN**

3.1 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel .....	47
3.2 Populasi dan Sampel Penelitian .....	50
3.3 Jenis Dan Sumber Data .....	50
3.4 Metode Pengumpulan Data .....	51
3.5 Metode Analisis Data .....	51
3.5.1 Pengujian Stasioneritas .....	53
3.5.2 Pengujian Statistik .....	56
3.5.3 Pengujian Asumsi Klasik .....	59

### **BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN**

4.1 Provinsi Jawa Tengah .....	63
4.2 PDRB Jawa Tengah .....	67
4.2.1 PDRB Jawa Tengah Menurut Komponen Penggunaan ..	69
4.3 Penanaman Modal Di Jawa Tengah .....	71
4.3.1 Ketentuan Umum Dan Prosedur Penanaman Modal .....	76
4.3.1.1 Penanaman Modal Asing .....	76
4.3.1.2 Penanaman Modal Dalam Negeri .....	77

4.4	Belanja Modal .....	81
4.5	Hasil Pengujian Stasioneritas .....	83
4.5.1	Uji Akar Unit .....	83
4.5.2	Uji Kointegrasi .....	83
4.6	Hasil Regresi Model <i>Error Correction Model</i> (jangka pendek) .....	84
4.6.1	Pengujian Statistik .....	85
4.6.2	Hasil Uji Asumsi Klasik .....	89
4.7	Interpretasi Hasil .....	92
4.8	Hasil Regresi Model <i>Error Correction Model</i> (jangka panjang) .....	97
4.8.1	Pengujian Statistik .....	97
4.8.2	Hasil Uji Asumsi Klasik .....	102
4.9	Interpretasi Hasil .....	104

## **BAB V PENUTUP**

5.1	Kesimpulan .....	112
5.2	Keterbatasan .....	115
5.2	Saran .....	116

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **LAMPIRAN**

## DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 Perkembangan PDRB Provinsi-Provinsi Di Pulau Jawa Menurut Harga Konstan tahun 2000 Periode Tahun 2005-2007 (Dalam Milyar Rupiah) .....	2
Tabel 1.2 Perkembangan PDRB Per Kapita Provinsi-Provinsi Di Pulau Jawa Menurut Harga Konstan Tahun 2000 Periode Tahun 2005-2007 (Dalam Ribu Rupiah) .....	3
Tabel 1.3 Penanaman Modal Asing Dan Penanaman Modal dalam Negeri Provinsi Jawa Tengah Tahun 2003-2008 .....	6
Tabel 1.4 Realisasi Belanja Modal Provinsi Jawa Tengah Tahun 2000-2008 (Dalam Ribu Rupiah) .....	11
Tabel 4.1 Perkembangan nilai PDRB Jawa Tengah Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2000 Periode Tahun 1978-2008 (Dalam Juta Rupiah) .....	68
Tabel 4.2 Perkembangan nilai PDRB Jawa Tengah Atas Dasar Harga Berlaku dan Harga Konstan 2000 Menurut Penggunaan .....	70
Tabel 4.3 Perkembangan Penanaman Modal Swasta Di Jawa Tengah Tahun 1978-2008.....	79
Tabel 4.4 Belanja Modal Provinsi Jawa Tengah Tahun 1978-2008 (Juta Rupiah) .....	81

Tabel 4.5 Hasil Estimasi Output <i>Error Correction Model</i> .....	84
Tabel 4.6 Uji Heteroskedastisitas .....	91
Tabel 4.7 Hasil Estimasi Output <i>Error Correction Model</i> (Jangka Panjang) .	97
Tabel 4.8 Uji Heteroskedastisitas Jangka Panjang .....	104

## DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Fungsi Produksi Neoklasik .....	31
Gambar 2.2 Kerangka Pemikiran Teoritis .....	45
Gambar 4.1 Kabupaten Dan Kota Di Provinsi Jawa Tengah .....	64
Gambar 4.2 PDRB Provinsi Jawa Tengah Menurut Harga Konstan Tahun 2000 Periode Tahun 1978-2008 (Dalam Juta Rupiah) .....	69
Gambar 4.3 Perkembangan Alokasi Belanja Modal Provinsi Jawa Tengah Tahun 1978-2008 .....	82
Gambar 4.4 Uji Normalitas Jangka Pendek .....	90
Gambar 4.5 Uji Normalitas Jangka Panjang .....	103

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Sebagai salah satu negara yang sedang berkembang, Indonesia tidak lepas dari berbagai hambatan dan tantangan dalam pembangunan. Masalah kemiskinan, rendahnya modal, rendahnya kualitas sumber daya manusia adalah beberapa contoh masalah pembangunan yang harus segera diatasi, termasuk masalah keamanan dan politik yang belum stabil. Dalam kaca mata ekonomi, salah satu cara untuk mengatasi berbagai masalah tersebut adalah dengan mengupayakan peningkatan pertumbuhan ekonomi.

Pertumbuhan ekonomi merupakan suatu gambaran yang nyata dari dampak suatu kebijakan pembangunan ekonomi. Pertumbuhan tersebut dimaksudkan sebagai laju pertumbuhan yang terbentuk dari berbagai macam sektor ekonomi yang secara tidak langsung menggambarkan tingkat perubahan ekonomi. Bagi daerah, ini merupakan suatu indikator yang penting untuk mengetahui keberhasilan pembangunan dan berguna untuk menentukan arah kebijakan pembangunan di masa yang akan datang. Laju pertumbuhan suatu daerah dapat ditunjukkan dengan PDRB (Produk Domestik Regional Bruto). Tabel 1.1 berikut menjelaskan perkembangan jumlah PDRB provinsi-provinsi yang ada di Pulau Jawa :

**Tabel 1.1**  
**Perkembangan PDRB Provinsi-Provinsi Di Pulau Jawa**  
**Menurut Harga Konstan Tahun 2000**  
**Periode Tahun 2005-2007 (Dalam Milyar Rupiah)**

Provinsi	Nilai PDRB Harga Konstan Tahun 2000			Pertumbuhan		
	2005	2006	2007	2005	2006	2007
DKI Jakarta	295.270,54	312.826,71	332.971,26	6,01	5,95	6,44
Jawa Barat	242.883,88	257.499,45	273.995,14	5,60	6,02	6,41
Jawa Tengah	143.051,21	150.682,65	159.110,25	5,35	5,33	5,59
D.I.Y	16.910,88	17.535,75	18.291,51	4,73	3,70	4,31
Jawa Timur	256.374,73	271.249,32	287.814,18	5,84	5,80	6,11
Banten	58.106,95	61.341,66	65.046,78	5,88	5,57	6,04

Sumber : PDRB Provinsi-Provinsi di Indonesia, 2008.

Berdasarkan Tabel 1.1, selama tahun 2005 hingga tahun 2007, Provinsi DKI Jakarta memiliki PDRB harga konstan tertinggi dibandingkan provinsi-provinsi lain di Pulau Jawa dengan rata-rata pertumbuhannya sebesar 6,13 persen. Provinsi dengan PDRB lebih rendah dibandingkan dengan DKI Jakarta yaitu Provinsi Jawa Timur dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 5,92 persen.

PDRB yang lebih rendah dimiliki oleh Provinsi Jawa Barat, dengan pertumbuhan sebesar 6,01 persen. Setelah Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah memiliki nilai PDRB dengan pertumbuhan rata-rata pertumbuhan sebesar 5,42 persen. PDRB yang lebih rendah dari Jawa Tengah adalah Provinsi Banten yang merupakan provinsi yang baru terbentuk di Pulau Jawa, dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 4,25 persen.

Bila diperingkat, rata-rata pertumbuhan PDRB selama tahun 2005 hingga tahun 2007, DKI Jakarta memiliki pertumbuhan yang paling tinggi di Pulau Jawa, yaitu sebesar 6,13 persen pertahun. Kemudian Jawa Barat, dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 6,01 persen pertahun. Selanjutnya Jawa Timur memiliki rata-rata pertumbuhan sebesar 5,92 persen pertahun, dan Banten dengan rata-rata

pertumbuhan sebesar 5,83 persen pertahun. Meskipun Jawa Tengah memiliki nilai PDRB lebih tinggi dibandingkan Banten, namun tiap tahunnya hanya tumbuh sebesar 5,42 persen. Rata-rata pertumbuhan PDRB paling rendah dimiliki oleh Provinsi DIY dengan nilai 4,25 persen pertahun.

Nilai PDRB pada suatu tahun, bila dibagi dengan jumlah penduduk tahun tersebut akan menghasilkan PDRB per kapita yang biasa digunakan untuk melihat kesejahteraan penduduk pada tahun tersebut. Perkembangan nilai dan pertumbuhan PDRB per kapita dijelaskan dalam tabel berikut :

**Tabel 1.2**  
**Perkembangan PDRB Per Kapita Propinsi-Propinsi Di Pulau Jawa Menurut**  
**Harga Konstan Tahun 2000**  
**Periode Tahun 2005-2007 (Dalam Ribu Rupiah)**

Provinsi	Nilai PDRB Per Kapita Harga Konstan 2000			Pertumbuhan		
	2005	2006	2007	2005	2006	2007
DKI Jakarta	33.324,81	34.901,16	36.733,18	4,69	4,73	5,25
Jawa Barat	6.233,32	6.494,54	6.793,99	4,64	4,19	4,61
Jawa Tengah	4.473,43	4.682,48	4.913,80	7,21	4,68	4,94
DIY	5.057,61	5.174,72	5.325,76	0,97	2,32	2,92
Jawa Timur	7.063,78	7.412,72	7.800,78	6,39	4,94	5,24
Banten	6.435,72	6.650,33	6.902,71	7,05	3,33	3,79

Sumber : PDRB Provinsi-Propinsi di Indonesia,2008.

Berdasarkan Tabel 1.2, dapat dilihat bahwa selama tahun 2005-tahun 2007 provinsi yang memiliki PDRB per kapita tertinggi adalah DKI Jakarta dengan rata-rata sebesar Rp 34. 986. 380,- dan rata-rata pertumbuhan sebesar 4,89 persen pertahun. Provinsi yang memiliki PDRB per kapita lebih rendah dari DKI Jakarta yaitu Jawa Timur dengan rata-rata Rp 7.425.760,- dan rata-rata pertumbuhannya sebesar 5,52 persen pertahun. Setelah Jawa Timur, Banten memiliki PDRB per kapita sebesar Rp 6.662.920,- dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 4,72 persen pertahun. Dengan nilai PDRB lebih rendah dari Banten, Jawa

Barat memiliki nilai sebesar Rp 6.507.283,- dan rata-rata pertumbuhannya sebesar 4,48 persen pertahun. DIY memiliki nilai PDRB per kapita lebih rendah dari Jawa Barat, yaitu sebesar Rp 5.186.030,- dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 2,07 persen pertahun. Nilai PDRB per kapita paling rendah dimiliki oleh Jawa Tengah dengan nilai sebesar Rp 4.689.937,- dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 5,61 persen pertahun.

Provinsi Jawa Tengah merupakan juru kunci perkembangan ekonomi diantara enam provinsi di Pulau Jawa. Dengan menggunakan variabel PDRB per kapita dan laju pertumbuhan ekonomi, maka Jawa Tengah termasuk dalam kelompok “RR” (rendah-rendah) bersama dengan Propinsi D.I Yogyakarta. Artinya, baik dari segi PDRB per kapita maupun laju pertumbuhan ekonomi, kedua propinsi tersebut berada di bawah rata-rata nasional. Sedangkan, Jawa Tengah, adalah yang paling rendah dalam kelompok “RR” tersebut. Jawa Tengah adalah tulang punggung nasional karena menampung 16 persen lebih penduduk Indonesia (Alex Emyll, 2005).

Pembangunan daerah merupakan bagian integral dan sebagai penjabaran dari pembangunan nasional dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan yang disesuaikan dengan potensi, aspirasi, dan permasalahan pembangunan di daerah. Pembangunan daerah diharapkan dapat memotivasi peningkatan kreatifitas dan inisiatif untuk dapat lebih menggali dan mengembangkan potensi-potensi yang dimiliki oleh tiap-tiap daerah, dan dilaksanakan secara terpadu, serasi, terarah, agar pembangunan di tiap daerah dapat benar-benar sesuai dengan prioritas dan potensi daerahnya ( Nugroho, 2002).

Idealnya, setiap proses pembangunan termasuk di daerah didasarkan atas kemampuan sendiri (*self reliant development*) dengan mengoptimalkan semua potensi sumber daya yang dimiliki. Namun keinginan seperti itu sangat sulit diwujudkan. Kondisi objektif menunjukkan bahwa daerah-daerah biasanya mengalami kesulitan dalam membangun perekonomian karena keterbatasan sumber daya manusia, keterbelakangan teknologi dan kekurangan modal.

Dari ketiga hal tersebut yang sering mendapat perhatian lebih adalah masalah kekurangan modal (Hendra, 1991). Dalam konteks inilah pemerintah memandang perlunya menempuh kebijaksanaan yang memberikan kesempatan yang lebih luas kepada sektor swasta, baik domestik maupun asing, untuk berpartisipasi dalam pembangunan nasional. Adapun bentuk partisipasi ini adalah penanaman modal atau investasi.

Penanaman modal merupakan langkah awal kegiatan pembangunan sehingga investasi pada hakekatnya juga merupakan awal kegiatan pembangunan ekonomi. Urgensi tentang pembentukan modal di daerah juga mendapat perhatian dan penekanan oleh Zaris (1987) yang menyatakan bahwa investasi swasta memainkan peranan penting dalam membentuk pola pembangunan di daerah. Investasi ini akan menyebabkan terbentuknya modal daerah (*regional capital formation*). Hal ini merupakan konsekwensi logis dari terbatasnya sumber daya, teknologi dan modal yang dimiliki oleh daerah.

Untuk Jawa Tengah usaha-usaha menjalankan program pembangunan melalui kebijakan penanaman modal swasta sebenarnya telah dilakukan sejak pelita I yaitu dengan dikeluarkannya serangkaian kebijakan oleh pemerintah

daerah dalam hal ini Badan Penanaman Modal setempat dan mendapatkan momentumnya pada awal pelita III dimana peran swasta dalam pembangunan pada waktu itu dirasakan sangat diperlukan. Inti dan maksud dari berbagai kebijakan tersebut tentu saja agar para investor mau menanamkan modalnya di Jawa Tengah. Tabel 1.3 berikut menjelaskan perkembangan penanaman modal asing dan penanaman modal dalam negeri di Provinsi Jawa Tengah :

**Tabel 1.3**  
**Penanaman Modal Asing dan Penanaman Modal Dalam Negeri**  
**Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2003-2008**

<b>Tahun</b>	<b>Jumlah Proyek PMDN</b>	<b>Nilai Investasi PMDN (Juta Rupiah)</b>	<b>Jumlah Proyek PMA</b>	<b>Nilai Investasi PMA (Ribu US \$)</b>
2008	15	1.336.340,57	36	39.488,86
2007	15	1.191.875,23	82	317.165,10
2006	16	5.067.314,48	53	381.668,71
2005	78	5.756.775,87	127	550.512,44
2004	0	1.900.000,00	0	504.630,00
2003	25	1.062.158,55	52	60.680,29

Sumber : BPMD Provinsi Jawa Tengah, 2000-2008.

Berdasarkan Tabel 1.3 dapat diketahui jumlah penanaman modal asing dan penanaman modal dalam negeri dari tahun 2003-2008 di Provinsi Jawa Tengah. Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa jumlah modal dalam negeri dari tahun ke tahun selalu berubah. Nilai investasi PMDN tertinggi terjadi pada tahun 2005. Dari 78 proyek penanaman modal dalam negeri yang ditanamkan oleh investor dalam negeri tersebut bernilai 5.756.775,87 (dalam juta rupiah). Sedangkan untuk penanaman modal asing pada tahun 2008 nilainya mencapai 39.488,86 (dalam Ribu US \$) dengan total proyek 36 buah proyek.

Pada dasarnya investasi merupakan pembentukan modal yang mendukung peran swasta dalam perekonomian. Menurut Harrod-Domar, dalam mendukung

pertumbuhan ekonomi diperlukan investasi-investasi baru sebagai stok modal seperti penanaman modal dalam negeri maupun penanaman modal asing.

Penanaman modal asing sangat diperlukan dalam upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Jawa Tengah. Penanaman modal asing memiliki kelebihan jika dibandingkan dengan pinjaman komersil untuk pembiayaan pembangunan. Penanaman modal asing merupakan salah satu sumber dana dan jasa pembangunan di negara sedang berkembang berkat sifat khususnya berupa paket modal, teknologi, dan keahlian manajemen yang selektif serta pemanfaatannya dapat disinkronkan dengan tahapan pembangunan negara yang bersangkutan (Sumantoro, 1983).

Penanaman modal asing membantu mengurangi kekurangan tabungan domestik melalui tambahan modal dengan demikian menaikkan laju tabungan marginal dan laju pembentukan modal. Selain itu, penggunaan modal asing tidak hanya mengatasi kekurangan modal tetapi juga keterbelakangan teknologi. Bersamaan dengan modal uang dan modal fisik, modal asing juga membawa serta keterampilan teknik, tenaga ahli, pengalaman organisasi, informasi pasar, teknik-teknik produksi maju, pembaharuan produk, dan lain-lain. Ia juga melatih tenaga kerja setempat pada keahlian baru. Semua ini mempercepat pembangunan ekonomi. Dengan demikian pembiayaan pembangunan yang berasal dari investasi asing sangatlah penting artinya bagi pembangunan ekonomi. Penanaman modal yang dialokasikan ke dalam proyek pembangunan, berarti akan menambah kapital yang pada selanjutnya tambahan kapital tersebut akan berakibat pada peningkatan

taraf hidup masyarakat, yang mana salah satu indikatornya adalah pertumbuhan ekonomi.

Penelitian yang senada telah dilakukan oleh Effendi dan Soemantri (2003) menganalisis dampak PMA, tetapi tanpa PMDN terhadap pertumbuhan ekonomi regional di Indonesia tahun 1987-2000 (26 propinsi). Hasilnya ditemukan bahwa PMA mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi regional jangka pendek, namun tidak dalam jangka panjang (Effendi dan Soemantri (2003) dalam Sidik dan Nuryadin (2008)). Hasil penelitian Suryawati (2000) menunjukkan bahwa modal asing langsung yang masuk ke negara-negara Asia Timur, secara umum mempunyai hubungan yang positif dan kuat terhadap pertumbuhan ekonomi negara tujuan PMA, namun demikian, hubungan ini hanya merupakan hubungan jangka pendek saja. Dalam uji ekonometrik jangka panjang dengan menggunakan metode ECM, hubungan jangka panjang antara PMA dan pertumbuhan ekonomi hanya terjadi di Indonesia dan Philipina.

Hal berbeda diketahui dari hasil penelitian Bambang Kustitunto dan Istikomah (1999) "*Peranan PMA Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia*" yaitu dalam jangka pendek maupun jangka panjang investasi asing tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Hal tersebut dikarenakan faktor *risk country* yaitu pasar domestik yang kecil sehingga menyebabkan *risk of return* dari modal rendah dan kurang tersedianya fasilitas pendukung, seperti transportasi, tenaga kerja terampil dan teknologi.

Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dapat diartikan sebagai pengeluaran atau pembelanjaan penanaman modal atau perusahaan untuk membeli barang-barang produksi, untuk menambah kemampuan memproduksi barang dan jasa yang tersedia dalam perekonomian yang berasal dari investasi dalam negeri. Investasi menghimpun akumulasi modal dengan membangun sejumlah gedung dan peralatan yang berguna bagi kegiatan produktif, maka output potensial suatu negara akan bertambah dan pertumbuhan ekonomi jangka panjang juga akan meningkat. Jelas dengan demikian bahwa investasi khususnya Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) memainkan peranan penting dalam menentukan jumlah output dan pendapatan. Jadi PMDN memiliki hubungan positif terhadap pertumbuhan ekonomi.

Penelitian oleh Sodik dan Nuryadin (2008) menunjukkan bahwa variabel PMA maupun PMDN berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi regional, sehingga bagaimanapun investasi (baik PMA maupun PMDN) sangat diperlukan oleh suatu daerah untuk tumbuh dan berkembang sesuai dengan kemampuan sendiri.

Berbagai kebijakan telah ditempuh untuk meningkatkan tingkat investasi antara lain Inpres No. 3 Tahun 2006 tentang Paket Kebijakan Iklim Investasi dan Permendagri No. 24 Tahun 2006 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Pemerintah Jawa Tengah juga ikut berperan untuk meningkatkan iklim usaha dengan menciptakan iklim usaha kondusif lewat pelayanan satu pintu (*One Stop Service*), perlindungan investasi (*Task force*), maupun pemberian insentif bagi penanam modal.

Kondisi yang ada di Provinsi Jawa Tengah, dinilai terdapat cakupan yang sangat strategis dan berpotensi untuk mencapai target pertumbuhan investasi. Jawa Tengah selain potensial akan sumber-sumber bahan baku bagi industri juga sangat layak bagi pendirian industri karena di samping tenaga kerja dan upahnya murah juga tersedianya lokasi industri yang didukung oleh dua pelabuhan samudra di Semarang dan di Cilacap. Selain itu pemerintah Provinsi Jawa Tengah memiliki kemauan untuk mendorong industri yang berorientasi ekspor melalui beberapa kebijakan yang sifatnya di samping memberikan iklim yang mendorong, juga memberikan kemudahan-kemudahan bagi dunia usaha.

Pembiayaan pembangunan daerah selain diperoleh dari penanaman modal swasta juga dari pemerintah yaitu belanja modal. Hal ini disebabkan karena belanja modal adalah pengeluaran yang berkaitan dengan kegiatan investasi yang dilaksanakan oleh pemerintah untuk mencapai sasaran pembangunan di Provinsi Jawa Tengah. Belanja modal akan menghasilkan penyediaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh suatu daerah dimana kenyataannya ketidakberhasilannya suatu daerah menarik modal di daerahnya sendiri disebabkan karena kurangnya prasarana yang tersedia. Untuk mengetahui seberapa besar peran pemerintah di dalam menyediakan sarana infrastruktur dapat dilihat dari nilai realisasi belanja modal dalam APBD masing-masing kabupaten/kota pada tahun yang bersangkutan. Semakin besar nilai belanja modal, maka semakin besar pula peran pemerintah di dalam melaksanakan pembangunan. Begitu juga sebaliknya. Dengan anggapan bahwa besarnya peranan tersebut mencerminkan pemerintah ikut berperan aktif di dalam menyediakan fasilitas pendukung, maka akan berpengaruh secara positif terhadap besar kecilnya investasi di Propinsi Jawa

Tengah. Tabel 1.4 berikut menjelaskan alokasi anggaran belanja modal Provinsi Jawa Tengah :

**Tabel 1.4**  
**Realisasi Belanja Modal Propinsi Jawa Tengah**  
**Periode Tahun 2000-2008 (Dalam Ribu Rupiah)**

<b>Tahun</b>	<b>Belanja Modal (Ribu Rp)</b>	<b>%</b>
2000	670.516.604	3,7
2001	367.160.178	-45,2
2002	616.799.691	68,0
2003	811.574.069	31,5
2004	776.353.033	-4,3
2005	799.215.779	3,0
2006	209.072.075	-73,8
2007	373.237.100	4,1
2008	530.168.617	
<b>Jumlah</b>	<b>5.154.097.146</b>	

Sumber : Biro Keuangan Setda Propinsi Jawa Tengah, 2008.

Berdasarkan Tabel 1.4 dapat dilihat realisasi belanja modal dari tahun 2000 sampai dengan tahun 2008 di Provinsi Jawa Tengah. Berdasarkan tabel tersebut dapat diketahui bahwa belanja modal dari tahun ke tahun selalu berubah. Belanja modal tertinggi diperoleh pada tahun 2003 dengan jumlah belanja modal sejumlah Rp. 811.574.069. Belanja modal dari tahun 2000 sampai dengan tahun 2008 berjumlah Rp. 5.154.097.176 dengan rata-rata belanja Rp. 572.677.461.

Realisasi belanja modal juga merupakan strategi alokasi belanja daerah yang memiliki peran penting dalam meningkatkan penerimaan daerah. Dalam upaya untuk meningkatkan kontribusi publik terhadap penerimaan daerah, alokasi belanja modal hendaknya lebih ditingkatkan. Belanja modal yang dilakukan oleh pemerintah daerah diantaranya pembangunan dan perbaikan sektor pendidikan,

kesehatan, transportasi, sehingga masyarakat juga menikmati manfaat dari pembangunan daerah. Oleh karena itu, anggaran belanja modal akan tidak logis apabila proporsi anggarannya lebih banyak untuk belanja rutin (Abimanyu dalam Priyo, 2006).

Dalam penelitiannya, Lin dan Liu (2000) menyatakan bahwa pemerintah perlu untuk meningkatkan investasi modal guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah. Penelitian yang dilakukan oleh Priyo Hari Adi (2006) membuktikan bahwa belanja pembangunan memiliki pengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Alokasi belanja pembangunan untuk pengembangan infrastruktur penunjang perekonomian akan mendorong tingkat produktivitas penduduk.

Dari uraian tersebut di atas yang mana begitu pentingnya peran dari modal untuk proses pembangunan ekonomi di suatu negara berkembang dan di Provinsi Jawa Tengah pada umumnya. Hal ini menarik bagi penulis untuk meneliti akan pengaruh dari adanya modal bagi pembangunan, sehingga mendorong dilakukannya penelitian yang berjudul : **“Pengaruh Penanaman Modal Asing, Penanaman Modal Dalam Negeri dan Belanja Modal terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi Jawa Tengah”**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang sebelumnya, rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaruh PMA, PMDN dan Belanja Modal secara simultan terhadap Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Jawa Tengah baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang?
2. Bagaimana dan seberapa besar pengaruh PMA terhadap Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Jawa Tengah baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang?
3. Bagaimana dan seberapa besar pengaruh PMDN terhadap Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Jawa Tengah baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang?
4. Bagaimana dan seberapa besar pengaruh Belanja Modal terhadap Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Jawa Tengah baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang?

### **1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

#### **1.3.1 Tujuan Penelitian**

Tujuan yang ingin dicapai dengan adanya penelitian ini adalah :

1. Untuk menganalisis apakah PMA, PMDN dan Belanja Modal mempengaruhi Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Jawa Tengah.
2. Untuk menganalisis bagaimana dan seberapa besar pengaruh PMA terhadap Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Jawa Tengah.
3. Untuk menganalisis bagaimana dan seberapa besar pengaruh PMDN terhadap Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Jawa Tengah.

4. Untuk menganalisis bagaimana dan seberapa besar pengaruh Belanja Modal terhadap Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Jawa Tengah.

### **1.3.2 Kegunaan Penelitian**

Sebagai tambahan pengetahuan mengenai manfaat penanaman modal asing, penanaman modal dalam negeri dan belanja modal terhadap pertumbuhan perekonomian di Jawa Tengah.

## **1.4 Sistematika Penulisan**

Untuk memberikan gambaran yang menyeluruh dan memudahkan dalam pemahaman skripsi ini, maka disusunlah sistematika penulisan dalam penelitian ini sebagai berikut :

### **BAB I Pendahuluan**

Dalam pendahuluan dapat dijumpai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian serta sistematika penulisan.

### **BAB II Telaah Pustaka**

Pada pokok bahasan ini akan diuraikan landasan teori dan penelitian terdahulu, kerangka pemikiran serta hipotesis yang digunakan dalam skripsi ini.

### **BAB III Metodologi Penelitian**

Dalam bab ini akan dikaji lebih dalam mengenai variabel penelitian dan definisi operasional, cara penulisan menentukan sampel, jenis dan sumber data yang digunakan penulis, metode pengumpulan data dan metode analisis.

#### **BAB IV Hasil dan Pembahasan**

Terdiri dari deskripsi obyek penelitian, analisis data dan pembahasan. Pada bagian deskripsi obyek penelitian dibahas secara deskriptif variabel-variabel yang berkaitan dengan masalah penelitian. Tujuan dari analisis data adalah menyederhanakan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan. Pembahasan merupakan bagian dari isi laporan penelitian yang mendiskusikan implikasi dari analisis data dan interpretasi yang dibuat oleh peneliti.

#### **BAB V Penutup**

Merupakan uraian singkat mengenai keseluruhan hubungan antara variabel bebas dengan variabel terkait dan dari hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai salah satu acuan pembentukan kebijakan.

## **BAB II**

### **TELAAH PUSTAKA**

#### **2.1 Landasan Teori**

##### **2.1.1 Pengertian Pertumbuhan Ekonomi**

Pertumbuhan ekonomi berarti perkembangan kegiatan yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah dan kemakmuran masyarakat meningkat (Sadono Sukirno, 2002).

Menurut Boediono (1999), pertumbuhan ekonomi adalah suatu proses dari kenaikan output perkapita dalam jangka waktu yang panjang. Pertumbuhan ekonomi disini meliputi tiga aspek :

1. Pertumbuhan ekonomi merupakan suatu proses (aspek) ekonomis, suatu perekonomian berkembang atau berubah dari waktu ke waktu.
2. Pertumbuhan ekonomi berkaitan dengan kenaikan output perkapita, dalam hal ini ada dua aspek penting, yaitu output total dan jumlah penduduk.
3. Pertumbuhan ekonomi dikaitkan dengan prespektif waktu, suatu perekonomian dikatakan tumbuh bila dalam jangka waktu yang cukup lama (lima tahun) mengalami kenaikan output perkapita.

Simon Kuznets (dalam Lincoln Arsyad, 1999) mendefinisikan pertumbuhan ekonomi mengandung tiga komponen pokok yang sangat penting artinya, yaitu :

1. Kenaikan output nasional secara terus menerus merupakan perwujudan dari pertumbuhan ekonomi dan kemampuan untuk menyediakan berbagai macam barang ekonomi merupakan tanda kematangan ekonomi.
2. Kemajuan teknologi merupakan prasyarat bagi pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan, namun belum merupakan syarat yang cukup. Untuk merealisasi potensi pertumbuhan yang terkandung dalam teknologi baru, maka
3. Penyesuaian kelembagaan, sikap dan ideologi harus dilakukan. Inovasi teknologi tanpa disertai oleh inovasi sosial ibarat bola lampu tanpa aliran listrik. Potensi ada tetapi tanpa input yang melengkapi tidak akan berarti apa-apa.

Dalam analisisnya yang lebih mendalam Kuznets memisahkan 6 (enam) karakteristik yang terjadi dalam proses pertumbuhan pada hampir semua negara, yaitu :

1. Tingginya tingkat pertumbuhan output perkapita dan laju pertumbuhan penduduk.
2. Tingginya tingkat kenaikan produktivitas faktor produksi secara keseluruhan terutama produktivitas tenaga kerja.
3. Tingginya tingkat transformasi struktur ekonomi.
4. Tingginya tingkat transformasi sosial dan ideologi.
5. Kecenderungan ekspansi dari negara-negara lain yang maju.
6. Pertumbuhan ekonomi hanya terbatas pada sepertiga jumlah populasi penduduk.

Penilaian mengenai cepat lambatnya pertumbuhan ekonomi haruslah dibandingkan dengan pertumbuhan di masa lalu dan pertumbuhan yang dicapai oleh daerah lain (Sadono Sukirno, 2002). Suatu wilayah dapat dikatakan mengalami pertumbuhan yang cepat apabila dari tahun ke tahun mengalami kenaikan yang cukup berarti, sedangkan pertumbuhan yang lambat terjadi apabila dari tahun ke tahun mengalami penurunan atau fluktuatif.

Pertumbuhan ekonomi dapat diketahui dengan membandingkan PDRB pada satu tahun tertentu (PDRB<sub>t</sub>) dengan tahun sebelumnya (PDRB<sub>t-1</sub>).

$$\text{Laju pertumbuhan ekonomi } \Delta Y = \frac{\text{PDRB}_t - \text{PDRB}_{t-1}}{\text{PDRB}_t} \times 100\%$$

Teori pertumbuhan ekonomi bisa didefinisikan sebagai penjelasan mengenai faktor-faktor apa yang menentukan kenaikan output per kapita dalam jangka panjang, dan penjelasan mengenai bagaimana faktor-faktor tersebut berinteraksi satu sama lain, sehingga terjadi proses pertumbuhan. Jadi teori pertumbuhan ekonomi tidak lain adalah suatu *ceritera* (yang logis) mengenai bagaimana proses pertumbuhan terjadi (Boediono, 1999).

Satu hal yang perlu ditekankan sejak awal adalah bahwa didalam ilmu ekonomi tidak hanya terdapat satu teori pertumbuhan, tetapi terdapat banyak teori pertumbuhan. Sampai saat ini (dan masa mendatang) tidak ada suatu teori pertumbuhan yang menyeluruh dan lengkap dan yang merupakan satu-satunya teori pertumbuhan yang baku. Berbagai ekonom besar, sejak lahirnya ilmu ekonomi mempunyai pandangan atau persepsi yang tidak selalu sama mengenai proses pertumbuhan suatu perekonomian. Sering kali pandangan atau persepsi ini sangat dipengaruhi oleh keadaan atau peristiwa-peristiwa pada waktu ekonom

tersebut hidup. Seringkali pula teori pertumbuhan seorang ekonom dipengaruhi oleh ideologi yang dianut oleh ekonom, sehingga aspek-aspek yang ditonjolkan dalam teorinya mencerminkan kecenderungan ideologisnya. Ini semua perlu dipahami oleh setiap orang yang mempelajari teori pertumbuhan (ilmu ekonomi umumnya). Jangan sampai berpendapat bahwa teori yang kebetulan pelajari adalah satu-satunya kebenaran yang tidak bisa dibantah. Semakin banyak teori yang di pelajari, semakin luas pandangan, dan semakin mudah menghindari perangkap fanatisme intelektual tersebut (Boediono, 1999).

#### **2.1.1.1 Teori Pertumbuhan Ekonomi Klasik**

Aliran klasik muncul pada akhir abad ke-18 dan permulaan awal abad 19, yaitu dimasa Revolusi Industri, dimana suasana waktu itu merupakan awal bagi adanya perkembangan ekonomi. Teori pertumbuhan ekonomi klasik dikembangkan oleh penganut aliran klasik yaitu Adam Smith dan David Ricardo.

##### **a. Adam Smith**

Orang yang pertama membahas pertumbuhan ekonomi secara sistematis adalah Adam Smith (1723-1790). Dalam bukunya *An Inquiry Into the Nature and Causes of The Wealth of Nations* (1776) ia mengemukakan tentang proses pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang secara sistematis. Menurut Smith terdapat 2 (dua) aspek utama pertumbuhan ekonomi yaitu pertumbuhan output total dan pertumbuhan penduduk (Lincolin Arsyad, 1999).

Unsur pokok dari sistem produksi suatu negara menurut Smith ada tiga yaitu :

1. Sumber daya alam yang tersedia (atau faktor produksi “tanah”)

2. Sumber daya insani (atau jumlah penduduk)
3. Stok barang modal yang ada.

Menurut Adam Smith dalam Suparmoko (2002), untuk berlangsungnya perkembangan ekonomi diperlukan adanya spesialisasi dan pembagian kerja. Spesialisasi dan pembagian kerja ini bisa menghasilkan output, karena spesialisasi dalam proses produksi bisa meningkatkan ketrampilan setiap pekerja dalam bidangnya dan pembagian kerja bisa mengurangi waktu yang hilang pada saat peralihan macam pekerjaan, serta mendorong ditemukannya alat-alat atau mesin-mesin baru yang akhirnya mempercepat dan meningkatkan produksi.

Dinyatakan bahwa sebelum adanya pembagian kerja harus ada akumulasi kapital terlebih dahulu dimana akumulasi kapital ini berasal dari dana tabungan. Disamping itu, Smith juga menitikberatkan pada luas pasar. Pasar harus seluas mungkin agar dapat menampung hasil produksi, sehingga perdagangan internasional menarik perhatiannya karena hubungan perdagangan internasional itu menambah luasnya pasar, sehingga pasar akan terdiri dari pasar dalam negeri dan pasar luar negeri.

Menurut Smith, sekali pertumbuhan itu mulai maka ia akan bersifat kumulatif, artinya bila ada pasar yang cukup dan ada akumulasi kapital, pembagian kerja akan terjadi dan ini akan menaikkan tingkat produktivitas tenaga kerja. Kenaikan produktivitas ini akan menaikkan penghasilan nasional selanjutnya juga memperbesar jumlah penduduk. Penduduk tidak saja merupakan pasar karena pendapatannya naik, tetapi pendapatan yang lebih besar itu juga akan merupakan sumber tabungan, jadi spesialisasi yang semakin besar membutuhkan

pasar yang semakin luas dan dorongan untuk membuat alat-alat baru makin bertambah. Di lain pihak, naiknya produktivitas akan mengakibatkan tingkat upah naik dan ada akumulasi kapital. Tetapi karena sumberdaya alam terbatas adanya, maka keuntungan akan menurun karena berlakunya hukum pertambahan hasil yang semakin berkurang. Pada tingkat inilah perkembangan mengalami kemacetan atau berhenti.

#### **b. David Ricardo**

Jika Adam Smith dianggap sebagai pakar utama dan pelopor pemikiran ekonomi mazhab klasik, maka Ricardo menjadi pemikir yang paling menonjol diantara para pakar mazhab tersebut. Teori Ricardo dikemukakan pertama kali dalam bukunya yang berjudul *The Principles of Political Economy and Taxation* yang diterbitkan pada tahun 1817 (Lincoln Arsyad, 1999).

Perangkat teori yang dikembangkan Ricardo menyangkut empat kelompok permasalahan yaitu :

1. Teori tentang nilai dan harga barang.
2. Teori tentang distribusi pendapatan sebagai pembagian hasil dari seluruh produksi dan disajikan dalam bentuk teori upah, teori sewa tanah, teori bunga dan laba.
3. Teori tentang perdagangan internasional.
4. Teori tentang akumulasi dan pertumbuhan ekonomi.

Menurut Lincoln Arsyad (1999), garis besar proses pertumbuhan ekonomi dan kesimpulan-kesimpulan dari Ricardo tidak jauh berbeda dengan teori Adam Smith yaitu mengacu pada laju pertumbuhan penduduk dan laju pertumbuhan

output. Selain itu Ricardo juga menganggap bahwa jumlah faktor produksi tanah (sumberdaya alam) tidak bisa bertambah, sehingga akhirnya menjadi faktor pembatas dalam proses pertumbuhan suatu masyarakat.

Perbedaan terutama terletak pada penggunaan alat analisa mengenai distribusi pendapatan (berdasarkan teori Ricardo mengenai sewa tanah) dalam penjabaran mekanisme pertumbuhan dan pengungkapan peranan yang lebih jelas dari sektor pertanian diantara sektor-sektor lain dalam proses pertumbuhan (Boediono, 1999).

Ciri-ciri perekonomian menurut Ricardo yaitu :

1. Jumlah tanah terbatas.
2. Tenaga kerja (penduduk) meningkat atau menurun tergantung pada apakah tingkat upah berada diatas atau dibawah tingkat upah minimal (tingkat upah alamiah).
3. Akumulasi modal terjadi bila tingkat keuntungan yang diperoleh pemilik modal berada di atas tingkat keuntungan minimal yang diperlukan untuk menarik melakukan investasi.
4. Kemajuan teknologi terjadi sepanjang waktu.
5. Sektor pertanian dominan.

Dengan terbatasnya luas tanah, maka pertumbuhan penduduk (tenaga kerja) akan menurunkan produk marginal (*marginal product*) yang kita kenal dengan istilah *the law of diminishing returns*. Selama buruh yang diperkerjakan pada tanah tersebut bisa menerima tingkat upah diatas tingkat upah alamiah, maka penduduk (tenaga kerja) akan terus bertambah, dan hal ini akan menurunkan lagi

produk marginal tenaga kerja dan pada gilirannya akan menekan tingkat upah ke bawah.

Proses yang dijelaskan di atas akan berhenti jika tingkat upah turun sampai tingkat upah alamiah. Jika tingkat upah turun sampai upah kebawah. Proses ini akan berhenti jika tingkat upah turun sampai tingkat upah alamiah. Jika tingkat upah turun sampai ke bawah tingkat upah alamiah, maka jumlah penduduk konstan. Jadi dari segi faktor produksi tanah dan tenaga kerja, ada suatu kekuatan dinamis yang selalu menarik perekonomian ke arah tingkat upah minimum, yaitu bekerjanya *the law of diminishing return*. Peranan akumulasi modal dan kemajuan teknologi adalah cenderung meningkatkan produktivitas tenaga kerja artinya, dapat memperlambat bekerjanya *the law of diminishing return* yang pada gilirannya akan memperlambat pula penurunan tingkat hidup ke arah tingkat hidup minimal (Lincoln Arsyad, 1999).

Inti dari proses pertumbuhan ekonomi adalah proses tarik menarik antara kekuatan dinamis, yaitu antara :

- a. *The law of diminishing return* dan
- b. Kemajuan teknologi.

Proses tarik menarik tersebut akhirnya dimenangkan oleh *the law of diminishing return*. Keterbatasan faktor produksi tanah akan membatasi pertumbuhan ekonomi suatu negara. Suatu negara hanya bisa tumbuh sampai batas yang dimungkinkan oleh sumber-sumber alamnya. Apabila potensi sumber alam ini telah dieksploitir secara penuh maka perekonomian berhenti tumbuh. Masyarakat akan mencapai posisi stasionernya, dengan ciri-ciri sebagai berikut :

1. Tingkat output konstan
2. Jumlah penduduk konstan
3. Pendapatan perkapita juga menjadi konstan
4. Tingkat upah pada tingkat upah alamiah (minimal)
5. Tingkat keuntungan pada tingkat minimal
6. Akumulasi modal berhenti (stok modal konstan)
7. Tingkat sewa tanah yang maksimal.

### **2.1.1.2 Teori-Teori Modern**

#### **a. Teori Pertumbuhan Harrod-Domar**

Teori pertumbuhan Harrod-Domar ini dikembangkan oleh dua ekonom yaitu Evsey Domar dan R.F. Harrod. Domar mengemukakan teorinya tersebut pertama kali pada tahun 1947 dalam jurnal *American Economic Review*, sedangkan Harrod telah mengemukakannya pada tahun 1939 dalam *Economic Journal*.

Dalam menganalisis mengenai masalah, pertumbuhan ekonomi teori Harrod-Domar bertujuan untuk menerangkan syarat-syarat yang harus dipenuhi supaya suatu perekonomian dapat mencapai pertumbuhan yang teguh atau *steady growth* dalam jangka panjang. Dengan menggunakan pemisalan-pemisalan : (1) barang modal telah mencapai kapasitas penuh, (2) tabungan adalah proposional dengan pendapatan nasional, (3) rasio modal-produksi (*capital-output ratio*) tetap, dan (4) perekonomian terdiri dari dua sektor (Sadono Sukirno, 2002).

Harrod dan Domar memberikan peranan kunci kepada investasi di dalam proses pertumbuhan ekonomi, khususnya mengenai watak ganda yang dimiliki investasi. Pertama ia menciptakan pendapatan (dampak permintaan), dan kedua ia memperbesar kapasitas produksi perekonomian dengan cara meningkatkan stok modal (dampak penawaran). Karena itu, selama investasi netto tetap berlangsung, pendapatan nyata dan output akan senantiasa membesar. Namun demikian untuk mempertahankan tingkat ekuilibrium pendapatan pada pekerjaan penuh dari tahun ke tahun, baik pendapatan nyata maupun output tersebut keduanya harus meningkat dalam laju yang sama pada saat kapasitas produktif modal meningkat. Kalau tidak, setiap perbedaan antara keduanya akan menimbulkan kelebihan kapasitas atau ada kapasitas nganggur (*idle*). Hal ini memaksa para pengusaha membatasi pengeluaran investasinya sehingga akhirnya akan berpengaruh buruk pada perekonomian yaitu menurunkan pendapatan dan pekerjaan pada periode berikutnya dan menggeser perekonomian keluar dari jalur ekuilibrium pertumbuhan mantap (M.L. Jhingan, 2003).

Menurut teori Harrod-Domar, untuk menumbuhkan suatu perekonomian diperlukan pembentukan modal sebagai tambahan stok modal (M. Todaro, 2000). Pembentukan modal tersebut dipandang sebagai pengeluaran yang akan menambah kesanggupan suatu perekonomian untuk menghasilkan barang-barang maupun sebagai pengeluaran yang akan menambah permintaan efektif seluruh masyarakat (Sadono Sukirno, 2002). Tetapi pertumbuhan dalam kesanggupan memproduksi tidak secara otomatis

akan menciptakan produksi dan menaikkan pendapatan jika kapital yang telah digunakan, hasilnya tidak dapat terjual karena pendapatan tetap. Oleh karena itu, fungsi terpenting dalam pembentukan modal adalah untuk mempertinggi keseluruhan pengeluaran masyarakat (Sadono Sukirno, 2002).

Dalam menguraikan teorinya Harrod-Domar ini menggunakan beberapa asumsi:

- a. Perekonomian dalam keadaan pengerjaan penuh (*full employment*) dan barang-barang modal yang terdiri dalam masyarakat digunakan secara penuh.
2. Besarnya tabungan masyarakat adalah proposional dengan besarnya pendapatan nasional, berarti fungsi tabungan di mulai dari titik nol.
3. Kecenderungan untuk menabung (*marginal propensity to save*) besarnya tetap, demikian juga rasio modal-output (*capital-output ratio*) tetap dan rasio pertambahan modal-output (*incremental capital-output ratio*).
4. Perekonomian terdiri dari dua sektor yaitu sektor rumah tangga dan sektor perusahaan, berarti pemerintah dan perdagangan luar negeri tidak ada (Lincoln Arsyad, 1999).

Sedangkan inti teori dari teori Harrod-Domar yaitu, setiap perekonomian dapat menyisihkan suatu proporsi tertentu dari pendapatan nasionalnya jika hanya untuk mengganti barang-barang modal (gedung, peralatan, material) yang rusak. Namun demikian untuk menumbuhkan perekonomian tersebut, di perlukan investasi-investasi baru sebagai stok penambah modal.

Seandainya ditetapkan rasio modal-output sebagai  $K$  dan selanjutnya dianggap bahwa rasio tabungan nasional (*national saving ratio*),  $s$ , merupakan persentase atau bagian tetap dari output nasional yang selalu ditabung dan bahwa jumlah investasi (penanaman modal) baru ditentukan oleh jumlah tabungan total ( $s$ ), maka dapat disusun model pertumbuhan ekonomi sederhana sebagai berikut (M. Todaro, 2000) :

1. Tabungan ( $S$ ) merupakan suatu proporsi ( $s$ ) dari pendapatan nasional ( $Y$ ), oleh karena itu, dapat ditulis dalam bentuk persamaan sederhana :

$$S = sY \quad (2.1)$$

2. Investasi ( $I$ ) didefinisikan sebagai perubahan dari stok modal ( $K$ ) yang dapat diwakili oleh  $\Delta K$ , sehingga dapat ditulis dalam bentuk persamaan :

$$I = \Delta K \quad (2.2)$$

Akan tetapi, karena jumlah stok modal ( $K$ ) mempunyai hubungan langsung dengan jumlah pendapatan nasional atau output ( $Y$ ), maka :

$$K/Y = k \quad \text{atau} \quad \Delta K/\Delta Y = k$$

$$\text{Akhirnya,} \quad \Delta K = k \cdot \Delta Y \quad (2.3)$$

3. Terakhir mengingat jumlah keseluruhan tabungan nasional ( $S$ ) harus sama dengan keseluruhan investasi ( $I$ ), maka persamaan berikutnya dapat ditulis sebagai berikut:

$$S = I \quad (2.4)$$

Dari persamaan (2.1) di atas telah diketahui bahwa  $S = sY$  dan dari persamaan (2.2) dan persamaan (2.3), maka dapat diketahui :

$$I = \Delta K = k \cdot \Delta Y$$

Dengan demikian, “identitas” tabungan yang merupakan persamaan modal dalam persamaan (2.4) adalah sebagai berikut :

$$S = sY = k \cdot \Delta Y = \Delta K = I \quad (2.5)$$

Atau bisa diringkas menjadi :

$$sY = k \cdot \Delta Y \quad (2.6)$$

Selanjutnya apabila kedua sisi persamaan (2.6) dibagi mula-mula dengan Y dan kemudian dibagi dengan K, maka akan didapat :

$$\Delta Y/Y = s/k \quad (2.7)$$

$\Delta Y/Y$  pada persamaan (2.7) merupakan pertumbuhan PDB.

Persamaan (2.7), yang merupakan persamaan Harrod-Domar yang disederhanakan, menunjukkan bahwa tingkat pertumbuhan PDB ( $\Delta Y/Y$ ) ditentukan secara bersama oleh rasio tabungan nasional ( $s$ ) dan rasio modal-output nasional ( $COR = k$ ). Secara lebih spesifik, persamaan itu menyatakan bahwa tingkat pertumbuhan pendapatan nasional akan secara langsung atau secara positif berbanding lurus dengan rasio tabungan dan secara negatif berbanding terbalik terhadap rasio modal-output dari suatu perekonomian.

#### **b. Teori Pertumbuhan Neo-Klasik**

Teori pertumbuhan Neo-Klasik berkembang sejak tahun 1950-an. Teori ini berkembang berdasarkan analisis mengenai pertumbuhan ekonomi menurut pandangan ekonomi klasik. Ekonom yang menjadi perintis dalam mengembangkan teori tersebut adalah Robert Solow dan Trevor Swan. Teori ini menyebutkan bahwa pertumbuhan ekonomi bergantung pada pertumbuhan

faktor-faktor produksi (jumlah penduduk, tenaga kerja, akumulasi kapital) dan tingkat kemajuan teknologi.

Pandangan teori Neo-Klasik ini didasarkan pada anggapan bahwa perekonomian akan tetap mengalami tingkat pengerjaan penuh (*full employment*) dan kapasitas peralatan modal akan tetap sepenuhnya digunakan sepanjang waktu. Konsekuensi ini adalah bahwa seluruh faktor yang tersedia, baik berupa kapital maupun berupa tenaga kerja akan selalu terpakai atau digunakan secara penuh dalam proses produksi. Ini disebabkan karena dengan fungsi produksi Neo-Klasik tersebut, baik kapital dan tenaga kerja yang tersedia akan dikombinasikan untuk proses produksi, sehingga tidak akan ada lagi kemungkinan kelebihan atau kekurangan faktor produksi.

Ada 4 (empat) anggapan yang melandasi model Neo-Klasik (Boediono, 1999) :

- a. Tenaga kerja (atau penduduk),  $L$ , tumbuh dengan laju tertentu, misal  $p$  per tahun.
- b. Adanya fungsi produksi  $Q = f(K, L)$  yang berlaku bagi setiap periode.
- c. Adanya kecenderungan menabung (*propensity to save*) oleh masyarakat yang dinyatakan sebagai proporsi ( $s$ ) tertentu dan output ( $Q$ ). Tabungan masyarakat  $S = sQ$ , bila  $Q$  naik  $S$  juga naik, dan turun bila  $Q$  turun.

- d. Semua tabungan masyarakat diinvestasikan  $S = I = \Delta K$ . Dalam model Neo-Klasik tidak lagi dipermasalahkan mengenai keseimbangan S dan I.

Sesuai dengan anggapan mengenai kecenderungan menabung, maka dari output disisakan sejumlah proporsi untuk ditabung dan kemudian di investasikan. Dengan begitu, maka terjadi penambahan stok kapital (Boediono, 1999).

Secara matematis, bentuk faktor produksi dalam model pertumbuhan Neo-Klasik adalah (Boediono, 1999) :

$$Q = f(K, L) \quad (2.8)$$

Keterangan :

Q = output

K = kapital

L = tenaga kerja

Anggap bahwa fungsi produksi diatas mempunyai ciri *constan return to scale*. Artinya apabila K dan L masing-masing dinaikkan x%, maka Q juga akan naik x%. Apabila semua variabelnya dibagi dengan L, maka diperoleh :

$$\frac{Q}{L} = f\left(\frac{K}{L}, \frac{L}{L}\right) \quad (2.9)$$

$$\frac{Q}{L} = f\left(\frac{K}{L}, 1\right) \quad (2.10)$$

Angka 1 adalah konstan sehingga bisa dihilangkan, persamaannya menjadi berikut :

$$\frac{Q}{L} = f\left(\frac{K}{L}\right) \quad (2.11)$$

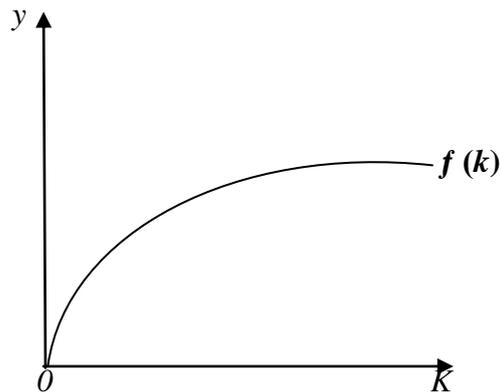
Sehingga fungsi produksi menjadi :

$$q = f(k) \quad (2.12)$$

Secara grafis, fungsi produksi diatas dapat digambarkan sebagai berikut :

**Gambar 2.1**

**Fungsi Produksi Neoklasik**



Sumber : Mankiw, 2003.

Dimana

y = output per tenaga kerja

k = modal per tenaga kerja

**c. Teori Schumpeter**

Teori Schumpeter ini pertama kali dikemukakan dalam bukunya dengan judul *The Theory of Economic Development* pada tahun 1911. Kemudian Schumpeter menggambarkan teorinya lebih lanjut tentang proses pembangunan dan faktor utama yang menentukan pembangunan dalam bukunya yang diterbitkan pada tahun 1939 dengan judul *Business Cycle* (Lincolin Arsyad, 1999).

Salah satu pendapat Schumpeter yang penting, yang merupakan landasan pembangunannya, adalah keyakinannya bahwa sistem kapitalisme merupakan sistem yang paling baik untuk menciptakan pembangunan ekonomi yang pesat. Namun demikian, Schumpeter meramalkan secara pesimis bahwa dalam jangka panjang sistem kapitalisme akan mengalami kemandegan (stagnasi).

Menurut Schumpeter, faktor utama yang menyebabkan perkembangan ekonomi adalah proses inovasi dan pelakunya adalah para inovator atau wiraswasta (*entrepreneur*). Inovasi menyangkut perbaikan kualitatif dari sistem ekonomi itu sendiri, yang bersumber dari kreativitas para wiraswastanya. Menurut Schumpeter, perkembangan ekonomi ini merupakan sumber kemajuan ekonomi yang secara historis paling penting. Sejarah kemajuan ekonomi adalah sejarah perkembangan kreativitas manusia. Dari kemajuan ekonomi tersebut diartikan sebagai peningkatan output total masyarakat (Boediono, 1999).

Dalam perkembangan ekonomi, Schumpeter membedakan pengertian pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi walaupun keduanya merupakan sumber peningkatan output masyarakat. Menurut Schumpeter, pertumbuhan ekonomi adalah peningkatan output masyarakat yang disebabkan oleh semakin banyaknya jumlah faktor produksi yang digunakan dalam proses produksi masyarakat tanpa adanya perubahan teknologi produksi itu sendiri. Sedangkan pembangunan ekonomi adalah kenaikan output yang disebabkan oleh inovasi yang dilakukan oleh para wiraswasta. Inovasi disini

berarti perbaikan teknologi dalam arti luas, mencakup misalnya penemuan produk baru, pembukaan pasar baru dan sebagainya (Lincoln Arsyad, 1999).

Pembangunan ekonomi berawal pada suatu lingkungan sosial, politik, dan teknologi yang menunjang kreativitas para wiraswasta. Adanya lingkungan yang menunjang kreativitas akan menimbulkan beberapa wiraswasta perintis (pioneer) yang mencoba menerapkan ide-ide baru dalam kehidupan ekonomi (cara berproduksi baru, produk baru, bahan mentah dan sebagainya). Mungkin tidak semua para perintis tersebut akan berhasil dalam melakukan inovasi. Bagi yang berhasil melakukan inovasi tersebut akan menimbulkan posisi monopoli bagi pencetusnya. Posisi monopoli ini akan menghasilkan keuntungan di atas keuntungan normal yang diterima para pengusaha yang tidak berinovasi. Keuntungan monopolis ini merupakan imbalan bagi para inovator dan sekaligus juga merupakan rangsangan bagi para calon inovator. Hasrat untuk berinovasi terdorong oleh adanya harapan memperoleh keuntungan monopolis tersebut.

Inovasi mempunyai tiga pengaruh yaitu :

1. Diperkenalkannya teknologi baru
2. Menimbulkan keuntungan lebih (keuntungan monopolis) yang merupakan sumber dana penting bagi akumulasi modal
3. Inovasi akan diikuti oleh timbulnya proses peniruan (imitasi) yaitu adanya pengusaha-pengusaha lain yang meniru teknologi baru tersebut. Proses peniruan (imitasi) tersebut pada akhirnya akan diikuti oleh investasi (akumulasi modal) oleh peniru (imitator) tersebut. Proses peniruan ini mempunyai pengaruh berupa :

1. Menurunnya keuntungan monopoli yang dinikmati oleh para inovator, dan
2. Penyebaran teknologi baru di dalam masyarakat, berarti teknologi tersebut tidak lagi menjadi monopoli bagi pencetusnya.

Kesemuanya proses ini meningkatkan output masyarakat dan secara keseluruhan merupakan proses pembangunan ekonomi dan secara keseluruhan merupakan proses pembangunan ekonomi.

Schumpeter berpendapat bahwa sumber kemajuan ekonomi adalah pembangunan ekonomi tersebut. karena sumber pembangunan ekonomi adalah inovasi, maka proses perkembangan ekonomi ini tidak bersifat regular, tetapi bersifat random. Dari waktu ke waktu timbul “letusan” inovasi yang meningkatkan output secara kuantitatif dan kualitatif (misalnya, penemuan mesin uap, transistor dan sebagainya) dan kemudian diikuti oleh proses imitasi. Oleh sebab itu, proses kemajuan ekonomi menunjukkan siklus-siklus kenaikan output yang tidak teratur.

### **2.1.2 Pembentukan Modal**

Penanaman modal merupakan langkah awal kegiatan produksi. Dengan posisi semacam itu, penanaman modal pada hakekatnya juga merupakan langkah awal kegiatan pembangunan. Dinamika penanaman modal mempengaruhi tinggi rendahnya pertumbuhan ekonomi, mencerminkan marak lesunya pembangunan. (Dumairy, 1996).

Penanaman modal adalah pengeluaran yang ditujukan untuk menambah atau mempertahankan persediaan kapital (*capital stock*). Persediaan kapital ini terdiri dari pabrik-pabrik, mesin-mesin kantor, barang tahan lama lainnya yang dipakai dalam proses produksi. Termasuk dalam persediaan kapital adalah rumah-rumah dan persediaan barang-barang yang belum dijual atau dipakai pada tahun yang bersangkutan (*inventory*). Jadi penanaman modal adalah pengeluaran yang menambah persediaan kapital. (M. Suparmoko, 2002).

Didalam neraca nasional atau struktur PDB menurut penggunaan, investasi didefinisikan sebagai pembentukan modal atau kapital tetap domestik (*domestic fixed capital formation*). Menurut definisi BPS, pembentukan modal tetap adalah pengeluaran untuk pengadaan, pembuatan atau pembelian-pembelian barang-barang (bukan barang-barang konsumsi) baik dari dalam negeri maupun impor, termasuk barang bekas/modal dari luar negeri.

Untuk lebih menunjang perekonomian, penanaman modal oleh masyarakat perlu digalakkan, terutama Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN). Sementara Penanaman Modal Asing (PMA) masih diperlukan untuk mendukung pembangunan di berbagai kegiatan yang belum mampu sepenuhnya dilaksanakan dengan PMDN, terutama yang menghasilkan barang modal, bahan baku dan komponen sebagai substitusi impor, barang jadi dan barang setengah jadi guna menciptakan kesempatan usaha dan lapangan kerja (Sukirno, 2000).

Penanaman modal selain diperoleh dari swasta (PMA dan PMDN) juga dari pemerintah yaitu belanja modal. Hal ini disebabkan karena belanja modal adalah pengeluaran yang berkaitan dengan kegiatan investasi yang dilaksanakan

oleh pemerintah untuk mencapai sasaran pembangunan. Belanja modal akan menghasilkan penyediaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh suatu daerah dimana kenyataannya ketidakberhasilannya suatu daerah menarik modal di daerahnya sendiri disebabkan karena kurangnya prasarana yang tersedia.

#### **2.1.2.1 Penanaman Modal Swasta**

Penanaman modal dapat diartikan sebagai pengeluaran atau perbelanjaan penanam-penanam modal atau perusahaan untuk membeli barang-barang modal dan perlengkapan-perengkapan produksi untuk menambah kemampuan memproduksi barang-barang dan jasa-jasa yang tersedia dalam perekonomian (Sukirno, 2000). Penanaman modal tidak hanya untuk memaksimalkan output, tetapi untuk menentukan distribusi tenaga kerja dan distribusi pendapatan, pertumbuhan dan kualitas penduduk serta teknologi.

Penanaman modal/investasi merupakan salah satu komponen penentu yang berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi suatu wilayah. Berdasarkan konsep pendapatan nasional yang mengacu pada *A System of National Account* (UN, 1968) dalam BPS (2003), pengertian investasi adalah selisih antara stok kapital pada tahun (t) dikurangi dengan stok kapital pada tahun (t-1), atau setiap ada penambahan atau penimbunan modal. Besarnya investasi secara fisik yang direalisasikan pada suatu tahun tertentu dicerminkan oleh besarnya Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB). Sedangkan yang dimaksud dengan PMTB adalah mencakup pengadaan, pembuatan dan pembelian barang modal baru dari dalam negeri maupun bekas dari luar negeri, yang termasuk dalam PMTB adalah perbaikan barang modal yang mengakibatkan tambahan umur pemakaian atau

meningkatkan kemampuan barang modal tersebut dikurangi dengan penjualan barang modal bekas. Barang yang dikategorikan sebagai barang modal mempunyai ciri-ciri barang tersebut memiliki unsur ekonomis lebih dari satu tahun, nilai barang relatif besar bila dibandingkan dengan output yang dihasilkan, serta dapat digunakan berulang kali dalam proses produksi.

Penanaman modal swasta di Indonesia dijamin keberadaannya sejak dikeluarkannya Undang-undang No. 1 tahun 1967 tentang penanaman modal asing dan Undang-undang No. 6 tahun 1968 tentang penanaman modal dalam negeri, yang kemudian dilengkapi dan disempurnakan dengan Undang-undang No. 11 tahun 1970 tentang penanaman modal asing dan Undang-undang No. 12 tahun 1970 tentang penanaman modal dalam negeri. Berdasarkan dari sumber kepemilikan modal, maka penanaman modal swasta dapat di bagi menjadi penanaman modal asing dan penanaman modal dalam negeri.

#### **2.1.2.2 Penanaman Modal Pemerintah**

Pembiayaan pembangunan daerah, selain diperoleh dari partisipasi masyarakat yang berupa penanaman modal baik asing maupun domestik, pembiayaan pembangunan daerah juga diperoleh dari belanja modal. Dalam upaya untuk meningkatkan kontribusi publik terhadap penerimaan daerah, alokasi belanja modal hendaknya lebih ditingkatkan. Belanja Modal adalah belanja yang dilakukan pemerintah yang menghasilkan aktiva tetap tertentu (Nordiawan,2006).

Belanja modal dimaksudkan untuk mendapatkan aset tetap pemerintah daerah, yakni peralatan, bangunan, infrastruktur, dan harta tetap lainnya. Secara teoritis ada tiga cara untuk memperoleh aset tetap tersebut, yakni dengan

membangun sendiri, menukarkan dengan aset tetap lainnya, atau juga dengan membeli. Namun, untuk kasus di pemerintahan, biasanya cara yang dilakukan adalah membangun sendiri atau membeli.

Menurut Halim (2001), belanja modal merupakan belanja yang manfaatnya melebihi satu tahun anggaran dan akan menambah aset atau kekayaan daerah serta akan menambah belanja yang bersifat rutin seperti biaya pemeliharaan. Munir (2003) juga menyatakan hal senada, bahwa belanja modal memiliki karakteristik spesifik dan menunjukkan adanya berbagai pertimbangan dalam pengalokasiannya. Pemerolehan aset tetap juga memiliki konsekuensi pada beban operasional dan pemeliharaan pada masa yang akan datang (Bland & Nunn, 1992).

Dewi (2006) dan Syaiful (2008) mengutarakan bahwa belanja modal adalah pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembentukan modal yang sifatnya menambah aset tetap / inventaris yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi, termasuk didalamnya adalah pengeluaran untuk biaya pemeliharaan yang sifatnya mempertahankan atau menambah masa manfaat, meningkatkan kapasitas dan kualitas aset.

Selain dari penanaman modal swasta dan penanaman modal pemerintah, sebenarnya terdapat modal individu yang termasuk kedalam pembentukan modal total domestik bruto (PMTDB) akan tetapi tidak digunakan dalam penelitian ini dikarenakan sulitnya mengukur tingkat modal individu.

## 2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian mengenai pengaruh penanaman modal baik asing maupun dalam negeri, pengeluaran pembangunan dan pertumbuhan ekonomi relatif banyak dilakukan dengan memberikan hasil yang berbeda-beda. Beberapa hasil penelitian terdahulu antara lain :

Nasara (1997) mengadakan penelitian dengan judul “*Pertumbuhan Ekonomi Regional Indonesia*” dengan menggunakan model persamaan :

$$\text{Ln Y} = \text{Ln A} + \beta \text{Ln X}_0 + \beta \text{Ln X}_1 + \beta \text{Ln X}_2 + \beta \text{Ln X}_3 + \mu$$

Dimana :

Y : PDRB

A : Konstanta

X<sub>0</sub>: Tenaga kerja

X<sub>1</sub> : Pembentukan modal

X<sub>2</sub> : Kualitas sumber daya manusia

X<sub>3</sub> : Aglomerasi

μ : Variabel pengganggu

Hasil penelitian yang dilakukan tentang pengaruh penggunaan variabel demografi dalam model pertumbuhan ekonomi daerah pada 25 propinsi di Indonesia adalah bahwa variabel pembentukan modal, tenaga kerja, mutu modal manusia dan aglomerasi mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap PDRB masing-masing daerah penelitian tersebut.

Hasil penelitian Bambang Kustitunto dan Istikomah (1999) “*Peranan PMA Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia*” menunjukkan bahwa dalam jangka pendek maupun jangka panjang investasi asing tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Hal tersebut dikarenakan faktor *risk country* yaitu pasar domestik yang kecil sehingga menyebabkan *risk of return* dari modal

rendah dan kurang tersedianya fasilitas pendukung, seperti transportasi, tenaga kerja terampil dan teknologi.

Hasil penelitian Suryawati (2000) “*Peranan Investasi Langsung Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Negara-Negara Asia Timur*” menunjukkan bahwa modal asing langsung yang masuk ke negara-negara Asia Timur, secara umum mempunyai hubungan yang positif dan kuat terhadap pertumbuhan ekonomi negara tujuan PMA, namun demikian, hubungan ini hanya merupakan hubungan jangka pendek saja. Dalam uji ekonometrik jangka panjang, dengan menggunakan metode ECM, hubungan jangka panjang antara PMA dan pertumbuhan ekonomi hanya terjadi di Indonesia dan Philipina.

Effendi dan Soemantri (2003) menganalisis dampak PMA, tetapi tanpa PMDN terhadap pertumbuhan ekonomi regional di Indonesia tahun 1987-2000 (26 propinsi). Hasilnya ditemukan bahwa PMA mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi regional jangka pendek, namun tidak dalam jangka panjang.

Subekti (2004) mengadakan penelitian dengan judul “*Analisis Peran dan Dampak Utang Luar Negeri, PMA, PMDN, dan Tabungan pemerintah Terhadap PDB Indonesia*” dengan menggunakan metode penaksiran model yang digunakan adalah regresi berganda *Ordinary Least Square* (OLS) dengan spesifikasi model :

$$PDB : \beta_0 + \beta_1 AID + \beta_2 PMA + \beta_3 PMDN + \beta_4 TAB + \mu$$

Dimana :

PDB : Produk Domestik Bruto

AID : Utang Luar Negeri

PMA : Nilai realisasi Penanaman Modal Asing

PMDN : Nilai realisasi Penanaman Modal Dalam Negeri

TAB : Tabungan Pemerintah

$\beta_0$  : Konstanta  
 $\beta_{1,2,3,4}$  : Koefisien regresi masing-masing variabel  
 $\mu$  : Variabel pengganggu

Secara bersama-sama variabel penjelas yaitu AID, PMA, PMDN dan Tabungan Pemerintah mempengaruhi nilai PDB Indonesia.

Dalam penelitian Jamzani Sodik dan Didi Nuryadin (2005) yang berjudul “*Investasi Dan Pertumbuhan Ekonomi Regional (Studi Kasus Pada 26 Propinsi Di Indonesia, Pra dan Pasca Otonomi)*” menemukan bahwa variabel penanaman modal asing maupun penanaman modal dalam negeri berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi regional, sehingga bagaimanapun investasi (baik PMA maupun PMDN) sangat diperlukan oleh suatu daerah untuk tumbuh dan berkembang sesuai dengan kemampuan sendiri. Khususnya untuk variabel penanaman modal asing berpengaruh sebelum era otonomi daerah, setelah otonomi daerah variabel ini tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi regional.

Hasil Penelitian Ronald Hariyanto (2005) “*Analisis Pengeluaran Pemerintah Daerah Di Provisini Jawa Tengah Periode Tahun Anggaran 2000-2002*” dengan menggunakan metode penaksiran model yang digunakan adalah regresi berganda *Ordinary Least Square* (OLS) menemukan bahwa secara bersama-sama variabel penjelas yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan serta Jumlah Penduduk mempengaruhi nilai pengeluaran pemerintah pada masing-masing daerah se Jawa Tengah. Dari hasil pengujian koefisien regresi secara individu (uji t) dapat disimpulkan bahwa variabel penjelas Pendapatan Asli Daerah dengan pengeluaran pemerintah di masing-masing daerah

Kota dan Kabupaten se Jawa Tengah terdapat hubungan yang signifikan. Variabel independen Dana Perimbangan secara signifikan berpengaruh terhadap variabel pengeluaran pemerintah di Kota dan Kabupaten se Jawa Tengah. Variabel independen Jumlah Penduduk secara signifikan berpengaruh terhadap variabel pengeluaran pemerintah di Kota dan Kabupaten se Jawa Tengah.

Dalam penelitian, Fhino Andrea Cristy dan Priyo Hari Adi (2006) dengan judul “*Hubungan Antara Dana Alokasi Umum, Belanja Modal dan Kualitas Pembangunan Manusia*” membuktikan bahwa belanja modal/pembangunan memiliki pengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Alokasi belanja pembangunan untuk pengembangan infrastruktur penunjang perekonomian akan mendorong tingkat produktivitas penduduk.

Hasil penelitian Jamzani Sodik dan Didi Nuryadin (2008) “*Determinan Investasi di Daerah : Studi Kasus Provinsi di Indonesia*” dengan metode analisis *Error-Correction Model* (ECM) menunjukkan bahwa indikator-indikator yang digunakan dalam studi ini hanya tiga indikator yang signifikan terhadap pilihan lokasi berinvestasi yaitu indikator market size (PDRB), indikator infrastruktur (listrik), dan indikator keterbukaan ekonomi (Ekspor). Dari ketiga indikator tersebut, PDRB dan listrik signifikan dengan arah yang berlawanan dengan teori. Indikator tingkat keterbukaan ekonomi (Ekspor) memiliki hubungan yang konsisten dengan teori meskipun dengan nilai koefisien yang relatif kecil. Sekaligus menunjukkan bahwa tingkat keterbukaan perekonomian daerah belum begitu besar berperan dalam menarik investor.

### **2.3 Kerangka Pemikiran Teoritis**

Pertumbuhan merupakan suatu gambaran yang nyata dari dampak suatu kebijakan pembangunan ekonomi. Pertumbuhan tersebut dimaksudkan sebagai laju pertumbuhan yang terbentuk dari berbagai macam sektor ekonomi yang secara tidak langsung menggambarkan tingkat perubahan ekonomi. Bagi daerah, ini merupakan suatu indikator yang penting untuk mengetahui keberhasilan pembangunan dan berguna untuk menentukan arah kebijakan pembangunan di masa yang akan datang. Laju pertumbuhan suatu daerah dapat ditunjukkan dengan PDRB.

Pengaruh pendapatan nasional yang tinggi akan memperbesar pendapatan masyarakat dan selanjutnya pendapatan masyarakat yang tinggi tersebut akan memperbesar permintaan terhadap barang-barang dan jasa-jasa. Maka keuntungan perusahaan akan bertambah tinggi dan akan mendorong dilakukannya lebih banyak investasi. Dengan kata lain, dalam jangka panjang apabila pendapatan nasional bertambah tinggi, maka investasi akan bertambah pula.

Banyak sekali ahli-ahli ekonomi pembangunan menganggap modal sebagai sumber yang merupakan titik perhatian dalam teori pembangunan ekonomi. Namun demikian harus kita sadari bahwa pembangunan ekonomi yang mempunyai implikasi pertumbuhan ekonomi juga memerlukan berbagai faktor lainnya, seperti tersedianya tenaga ahli dalam berbagai bidang, terdapatnya sistem pemerintahan yang baik, tingkat teknologi yang memungkinkan penggunaannya, sikap kehidupan masyarakat, tersedianya sumber alam dan sebagainya. Tetapi faktor-faktor tersebut tidak mungkin dapat digerakkan tanpa adanya modal baik

dari pemerintah maupun swasta. Sehingga seperti yang diutarakan Sadono Sukirno : “ahli-ahli ekonomi tetap yakin bahwa modal mempunyai kedudukan yang istimewa dalam pembangunan. Keyakinan ini didasarkan pada kesanggupan modal untuk menciptakan faktor-faktor lain yang penting artinya dalam pembangunan” (Sadono Sukirno, 2002).

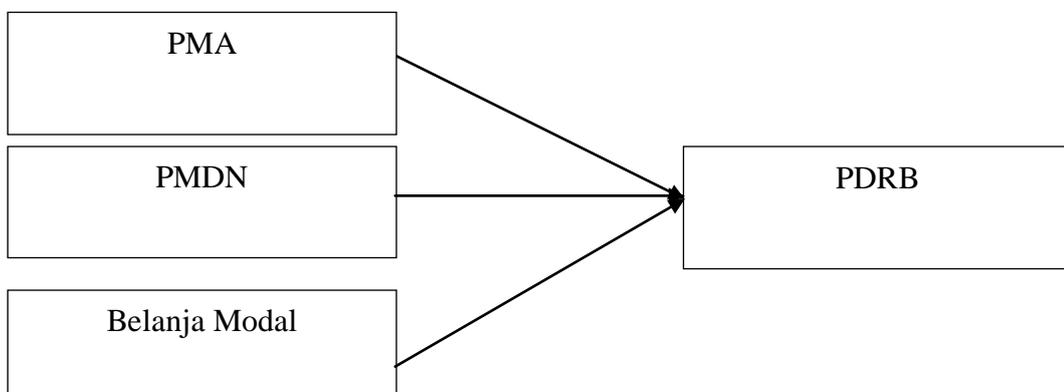
Dalam studi ini diasumsikan bahwa pertumbuhan ekonomi hanya dipengaruhi oleh penanaman modal. Sumber-sumber dana atau penanaman modal yang dimaksud dalam studi ini diperoleh dari pihak swasta yaitu PMA dan PMDN, sedangkan dari pemerintah sendiri yaitu, belanja modal.

Dengan demikian dapatlah dipahami bahwa pembiayaan pembangunan baik dari pemerintah maupun swasta yang berupa investasi atau penanaman modal sangatlah penting artinya bagi pembangunan ekonomi pada khususnya dan pembangunan yang dialokasikan ke dalam proyek pembangunan, berarti akan menambah kapital yang ada dalam suatu perekonomian, selanjutnya tambahan kapital tersebut akan berakibat peningkatan taraf hidup masyarakat, yang mana salah satu indikatornya adalah pertumbuhan ekonomi pada masyarakat tersebut.

Investasi swasta, yaitu PMA maupun PMDN, memiliki hubungan yang positif dengan pertumbuhan ekonomi. Hal ini disebabkan penambahan investasi akan meningkatkan modal perekonomian yang nantinya akan meningkatkan produksi barang dan jasa di masa yang akan datang. Segi lain, penanam modal ingin menanamkan modalnya dengan tujuan mewujudkan alat-alat produksi yang nantinya akan mendorong kegiatan memproduksi di masa yang akan datang.

Pemerintah perlu untuk meningkatkan investasi pembangunan guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah. Penelitian yang dilakukan oleh Priyo Hari Adi (2006) membuktikan bahwa belanja pembangunan memiliki pengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Alokasi belanja pembangunan untuk pengembangan infrastruktur penunjang perekonomian akan mendorong tingkat produktivitas penduduk.

Bentuk hubungan yang ingin ditunjukkan adalah investasi (PMA, PMDN, dan belanja modal) mempengaruhi PDRB Jawa Tengah. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dari skema berikut :



**Gambar 2.2**  
**Kerangka Pemikiran Teoritis**

Dari gambar PMA, PMDN dan belanja modal merupakan dana atau modal yang pada umumnya disebut dengan investasi, ketiga investasi tersebut kemudian di investasikan di berbagai jenis lapangan usaha dan menghasilkan produk barang dan jasa, kemudian melalui multiplier, dan setelah seluruh jumlah barang dan jasa dijumlahkan dalam kurun waktu tertentu, hasilnya disebut dengan PDB atau PDRB dan kemudian hari PDRB kita dapat menghitung laju pertumbuhan ekonomi.

## **2.4 Hipotesis**

Untuk memberikan arah penelitian maka diajukan hipotesis. Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap masalah penelitian yang sebenarnya harus diuji empiris, dan hipotesis ini menyatakan hubungan yang ingin kita cari atau yang ingin kita pelajari. Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah :

- H1 : PMA berpengaruh positif dan signifikan terhadap PDRB Jawa Tengah.
- H2 : PMDN berpengaruh positif dan signifikan terhadap PDRB Jawa Tengah.
- H3 : Belanja modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap PDRB Jawa Tengah.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel**

Definisi operasional untuk masing-masing variabel yang digunakan dalam penelitian ini meliputi :

1. Produk Domestik Regional Bruto (Y)

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) diukur dari PDRB riil Provinsi Jawa Tengah berdasarkan harga konstan tahun 2000 yang dinyatakan dalam satuan rupiah pada tahun 1978 sampai dengan tahun 2008. PDRB riil menunjukkan nilai barang dan jasa yang diproduksi, yang dihitung menggunakan harga konstan tahun 2000 agar menjadi sama tahun dasarnya, dengan cara mencari indeks implisit yang baru terlebih dahulu dengan rumus sebagai berikut (J. Supranto, 1987) :

$$\text{Indeks Implisit } t = \frac{\text{PDRB harga konstan tahun } t}{\text{PDRB harga konstan tahun 2000}} \times 100\%$$

Indeks Implisit ini digunakan untuk mencari PDRB harga konstan tahun 2000. Kemudian PDRB riil tahun 1978 sampai dengan 2008 atas dasar harga konstan 2000 didapat dengan cara mengalikan PDRB atas dasar harga konstan 2000 masing-masing tahun dengan indeks implisit baru masing-masing tahun.

Nilai PDRB yang digunakan dalam penelitian ini adalah nilai PDRB atas dasar harga konstan tahun 2000 per tahunnya yang dinyatakan dalam satuan Juta Rupiah.

2. Penanaman Modal Asing ( $X_1$ )

PMA adalah realisasi dari penanaman modal yang dilakukan oleh pemilik-pemilik modal asing secara langsung di Jawa Tengah berdasarkan peraturan penanaman modal asing, ketentuan umum dan prosedur penanaman modal asing oleh pemerintah daerah. Realisasi PMA diketahui dari data realisasi investasi asing yang ada di Badan Penanaman Modal Daerah (BPMD) Jawa Tengah dalam Angka tahun 1978 sampai dengan tahun 2008. Ukuran variabel ini adalah Juta Rupiah.

3. Penanaman Modal Dalam Negeri ( $X_2$ )

PMDN adalah realisasi dari penanaman modal yang dilakukan oleh pemilik-pemilik modal dalam negeri secara langsung di Jawa Tengah berdasarkan peraturan penanaman modal dalam negeri, ketentuan umum dan prosedur penanaman modal dalam negeri oleh pemerintah daerah. Realisasi PMDN diketahui dari data realisasi investasi modal dalam negeri yang ada di Badan Penanaman Modal Daerah (BPMD) Jawa Tengah dalam Angka tahun 1978 sampai dengan tahun 2008. Ukuran variabel ini adalah Juta Rupiah.

4. Belanja Modal ( $X_3$ )

Belanja Modal merupakan belanja pemerintah daerah yang manfaatnya melebihi satu anggaran dan akan menambah aset atau

kekayaan daerah dan selanjutnya akan menambah belanja yang bersifat rutin seperti biaya pemeliharaan pada kelompok belanja administrasi umum. Kelompok belanja ini mencakup Jenis belanja baik untuk bagian belanja aparatur daerah maupun pelayanan publik.

Kelemahan variabel belanja modal adalah bahwa sebelum tahun 2001, investasi pemerintah ini disebut belanja pembangunan, dimana dalam perhitungannya terjadi *over estimate* namun secara teknis sulit dipisahkan. Berdasarkan keputusan Menteri Dalam Negeri No.29 Tahun 2002, belanja pembangunan berubah nama menjadi belanja modal. Alokasi belanja modal yang didasarkan pada kebutuhan memiliki arti bahwa tidak semua satuan kerja atau unit organisasi di pemerintahan daerah melaksanakan kegiatan atau proyek pengadaan aset tetap. Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) masing-masing satuan kerja, ada satuan kerja yang memberikan pelayanan publik berupa penyediaan sarana dan prasarana fisik, seperti fasilitas pendidikan (gedung sekolah, peralatan laboratorium, mobiler), kesehatan (rumah sakit, peralatan kedokteran, mobil ambulans), jalan raya, dan jembatan, sementara satuan kerja lain hanya memberikan pelayanan jasa langsung berupa pelayanan administrasi (catatan sipil, pembuatan kartu identitas kependudukan), pengamanan, pemberdayaan, pelayanan kesehatan, dan pelayanan pendidikan. Ukuran variabel ini adalah Juta Rupiah.

### **3.2 Populasi Dan Sampel Penelitian**

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh data PMA, PMDN, belanja modal, dan PDRB Provinsi Jawa Tengah periode tahun 1978-2008.

### **3.3 Jenis dan Sumber Data**

Dalam penelitian ini, data yang digunakan adalah data sekunder dalam bentuk runtut waktu (*time series*) periode tahun 1978-2008. Data sekunder yang digunakan antara lain :

1. Data penanaman modal asing di Jawa Tengah tahun 1978-2008, yang dinyatakan dalam Juta Rupiah (*Sumber : BPMD Provinsi Jawa Tengah*)
2. Data penanaman modal dalam negeri di Jawa Tengah tahun 1978-2008, yang dinyatakan dalam Juta Rupiah (*Sumber : BPMD Provinsi Jawa Tengah*).
3. Data PDRB Jawa Tengah atas dasar harga konstan 2000 tahun 1978-2008, yang dinyatakan dalam Juta Rupiah (*Sumber : Jawa Tengah Dalam Angka berbagai edisi, BPS Provinsi Jawa Tengah*)
4. Data realisasi belanja modal dalam Realisasi Anggaran Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota di Jawa Tengah tahun 1978-2008, yang dinyatakan dalam Juta Rupiah (*Sumber : Biro Keuangan Setda Provinsi Jawa Tengah*).

### **3.4 Metode Pengumpulan Data**

Keberhasilan dalam pengumpulan data merupakan syarat bagi keberhasilan suatu penelitian. Sedangkan keberhasilan dalam pengumpulan data tergantung pada metode yang digunakan. Berkaitan dengan hal tersebut maka pengumpulan data guna mendapatkan data-data yang obyektif dan lengkap sesuai dengan permasalahan yang diambil. Karena itu untuk kepentingan penelitian ini, penulis menggunakan data sekunder melalui pengumpulan data yaitu metode dokumentasi. Metode dokumentasi merupakan teknik untuk mendapatkan informasi melalui catatan, literatur, dokumentasi, dan lain-lain yang masih relevan dengan penelitian (M. Nazir, 1999). Pada penelitian ini metode dokumentasi yang dipakai untuk mengetahui data PMA, PMDN, Belanja Pembangunan dan PDRB Provinsi Jawa Tengah periode tahun 1978-2008 bersumber dari Badan Penanaman Modal Daerah (BPMD) Provinsi Jawa Tengah, Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Tengah, Biro Keuangan Setda Provinsi Jawa Tengah. Selain data-data laporan tertulis untuk kepentingan penelitian ini juga digali berbagai data melalui studi kepustakaan dari buku-buku, media massa dan internet yang berhubungan dengan penelitian ini.

### **3.5 Metode Analisis Data**

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah model ekonometrik dengan pendekatan kointegrasi dan model dinamis dengan pendekatan ECM (*Error Correction Model*). ECM sebagai analisis pendekatan dinamis mempunyai beberapa kelebihan sehingga model ini dapat diterapkan

sebagai alat analisis ekonomi. Dalam perekonomian ketergantungan variabel dependen dengan variabel independennya jarang terjadi seketika (*instant*), akan tetapi membutuhkan kelambananan waktu (*time lag*). Alasan digunakan ECM (*Error Correction Model*) dalam penelitian ini adalah (Ghozali,2009) :

1. ECM adalah salah satu model autoregresif, mengikut sertakan pengaruh pertimbangan lag dalam analisisnya sehingga model ini sesuai diterapkan dalam penelitian menggunakan data yang berbentuk time series.
2. Kemampuan ECM dalam meliputi banyak variabel dala analisis fenomena ekonomi jangka pendek dan jangka panjang.
3. Dengan menggunakan ECM, dapat dianalisa secara teoritik dan empirik apakah model yang dihasilkan konsisten dengan teori atau tidak.

Data yang digunakan adalah data periode tahunan (*time series*).

Persamaan ECM (*Error Corection Model*) jangka panjang sebagai berikut :

$$\text{LnPDRB}_t = \beta_0 + \beta_1 \text{LnPMA}_t + \beta_2 \text{LnPMDN}_t + \beta_3 \text{LnBM}_t + \mu_t \quad (3.1)$$

Keterangan:

$\beta_0$	= konstanta
$\beta_1, \beta_2, \beta_3$	= koefisien regresi
$\text{LnPDRB}_t$	= logaritma nilai PDRB pada periode t
$\text{LnPMA}_t$	= logaritma penanaman modal asing pada periode t
$\text{LnPMDN}_t$	= logaritma penanaman modal dalam negeri pada periode t
$\text{LnBM}_t$	= logaritma belanja modal pemerintah pada periode t
$\mu_t$	= <i>error term</i>

Sementara hubungan jangka pendek dinyatakan dengan persamaan sebagai berikut :

$$\Delta \text{LnPDRB}_t = \beta_0 + \beta_1 \Delta \text{LnPMA}_t + \beta_2 \Delta \text{LnPMDN}_t + \beta_3 \Delta \text{LnBM}_t + \beta_4 \text{ECT}_{t-1} + \mu_t \quad (3.2)$$

Keterangan :

$\beta_0$	= konstanta
$\Delta \ln \text{PDRB}$	= <i>first difference</i> dari logaritma Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)
$\Delta \ln \text{PMA}$	= <i>first difference</i> dari logaritma Penanaman Modal Asing (PMA)
$\Delta \ln \text{PMDN}$	= <i>first difference</i> dari logaritma Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)
$\Delta \ln \text{BM}$	= <i>first difference</i> dari logaritma Belanja Modal
$\text{ECT}_{t-1}$	= <i>Error-correction term lagged one period</i>
$\beta_1, \beta_2, \beta_3$	= koefisien regresi
$\mu$	= <i>error term</i>
$t$	= menunjukkan waktu

Untuk mengetahui apakah spesifikasi model dengan ECM merupakan model yang valid maka dilakukan uji terhadap koefisien *Error Correction Term* (ECT). Jika hasil pengujian terhadap koefisien ECT signifikan, maka spesifikasi model yang diamati valid.

Untuk menguji persamaan regresi dari model diatas maka digunakan beberapa pengujian sebagai berikut:

### 3.5.1 Pengujian Stasioneritas

#### 1. Uji Akar Unit (*Unit Root Test*)

Sebelum melakukan analisis harus dilakukan uji terhadap kestasioneran data. Konsep terkini yang banyak dipakai untuk menguji kestasioneran data runtun waktu adalah uji akar unit (*unit root test*). Pengujian akar-akar unit untuk semua variabel yang digunakan dalam analisis runtun waktu perlu dilakukan untuk memenuhi kesahihan analisis ECM (*Error Correction Model*). Ini berarti bahwa data yang digunakan harus bersifat stasioner, atau dengan kata lain perilaku data yang stasioner memiliki varians yang tidak terlalu besar dan mempunyai kecenderungan untuk mendekati nilai rata-ratanya.

Uji stationeritas bertujuan untuk mengetahui adanya anggapan stasioneritas pada persamaan yang sedang diestimasi. Untuk diketahui adanya *unit roots* dilakukan pengujian Dickey-Fuller (DF Test) sebagai berikut :

Misal variabel  $Y_t$  sebagai variabel tidak bebas, maka akan diubah menjadi

$$Y_t = \rho Y_{t-1} + U_t \quad (3.3)$$

Jika koefisien  $Y_{t-1}$  ( $\rho$ ) adalah = 1 dalam arti hipotesis diterima, maka variabel mengandung unit root dan bersifat non-stasioner. Untuk mengubah trend yang bersifat non-stasioner menjadi stasioner dilakukan uji orde pertama (*first difference*)

$$\Delta Y_t = (\rho - 1)(Y_t - Y_{t-1}) \quad (3.4)$$

Koefisien  $\rho$  akan bernilai 0, dan hipotesis akan ditolak sehingga model menjadi stasioner. Hipotesis yang dikemukakan adalah :

$H_0 : \rho = 0$  artinya terjadi *unit root* (data tidak stasioner)

$H_a : \rho \neq 0$  artinya tidak terjadi *unit root* (data stasioner)

Kesimpulan hasil *root test* diperoleh dengan membandingkan nilai t-hitung dengan t-tabel pada table Dickey-Fuller.

## 2. Uji Kointegrasi

Uji Kointegrasi bertujuan untuk mengetahui bagaimana variabel-variabel independen mempengaruhi variabel dependennya pada jangka panjang. Yang dimaksud dengan jangka panjang dalam pendekatan

kointegrasi adalah jangka waktu dimana pengaruh setiap variabel independen terhadap variabel dependennya tidak bersifat seketika, melainkan membutuhkan selang waktu, dan merupakan suatu kondisi dimana masing-masing variabel memungkinkan untuk mengadakan penyesuaian secara penuh terhadap perubahan-perubahan yang timbul (atau tidak ada kecenderungan untuk naik atau turun, dan variabel tersebut dalam kondisi optimumnya).

Model kointegrasi juga merupakan model yang biasa digunakan untuk menganalisis apakah trend dari nilai variabel tak bebas bergerak dengan arah yang sama dengan trend variabel bebasnya, sehingga tercapai keseimbangan jangka panjang atau justru sebaliknya. Berikut adalah langkah-langkah yang dilakukan dalam uji ini :

1. Estimasi tiap parameter dari persamaan regresi dengan menggunakan *Ordinary Least Square* (OLS), misal :

$$\text{PDRB}_t = \beta_0 + \beta_1\text{PMA}_t + \beta_2\text{PMDN}_t + \beta_3\text{BP}_t + \text{et} \quad (3.5)$$

Keterangan:

$\beta_0$	= konstanta
$\beta_1, \beta_2, \beta_3$	= koefisien regresi
$\text{PDRB}_t$	= nilai PDRB pada periode t
$\text{PMA}_t$	= penanaman modal asing pada periode t
$\text{PMDN}_t$	= penanaman modal dalam negeri pada periode t
$\text{BP}_t$	= belanja pembangunan pemerintah pada periode t
et	= <i>error term</i>

Uji stasioner terhadap nilai residual terhadap hasil estimasi diatas lalu estimasi kembali

$$\text{U}_t = \text{U}_{t-1} + \mu t \quad (3.6)$$

$$\Delta \text{U}_t = \beta_0 \text{U}_{t-1} + \beta_1 \text{U}_{t-2} \quad (3.7)$$

Setelah t-hitung diperoleh, maka hasilnya dibandingkan dengan t-tabel (uji-t). Jika nilai t-hitung lebih besar dari t-tabel maka variabel bersifat stasioner.

2. Regresi persamaan, proses ini dilakukan untuk melihat signifikansi hubungan antara variabel pada tingkat kepercayaan tertentu.

Hipotesis ini didasarkan oleh hasil regresi pada error term berikut ini :

$$U_t = \rho U_{t-1} + \mu t \quad (3.8)$$

Kesimpulan hipotesis uji kointegrasi :

$H_0 : \rho = 0$  artinya variabel-variabel tidak terkointegrasi

$H_a : \rho \neq 0$  artinya variabel-variabel terkointegrasi

### 3.5.2 Pengujian Statistik

#### 1. Koefisien Determinasi

Besarnya koefisien determinasi ( $R^2$ ) adalah 0 sampai 1. Semakin mendekati 1 besarnya koefisien determinasi suatu persamaan regresi semakin besar pula pengaruh semua variabel independen terhadap variabel dependen (semakin besar kemampuan model yang dihasilkan dalam menjelaskan perubahan nilai variabel dependen). Sebaliknya semakin mendekati nol besarnya koefisien determinasi suatu persamaan regresi semakin kecil pula pengaruh semua variabel independen terhadap nilai variabel dependen (semakin kecil kemampuan model yang dihasilkan dalam menjelaskan perubahan nilai variabel dependen) Besarnya pengaruh

variabel bebas secara parsial dilihat dari besarnya determinasi parsial ( $R^2$ ) (Algifari, 2000).

## 2. Uji t-Statistik

Uji t ini dilakukan untuk melihat signifikansi dari pengaruh variabel independen secara individu terhadap variabel dependen, dengan menganggap variabel independen lainnya konstan ( Damodar Gujarati, 1999).

Hipotesis yang digunakan adalah :

- a. Hipotesis 1 : PMA berpengaruh positif dan signifikan terhadap PDRB Jawa Tengah.

$H_0 : \beta_1 = 0$  Tidak ada pengaruh positif dan signifikan dari PMA terhadap PDRB Jawa Tengah.

$H_a : \beta_1 > 0$  Ada pengaruh positif dan signifikan dari PMA terhadap PDRB Jawa Tengah.

- b. Hipotesis 2 : PMDN berpengaruh positif dan signifikan terhadap PDRB Jawa Tengah.

$H_0 : \beta_2 = 0$  Tidak ada pengaruh positif dan signifikan dari PMDN terhadap PDRB Jawa Tengah.

$H_a : \beta_2 > 0$  Ada pengaruh positif dan signifikan dari PMDN terhadap PDRB Jawa Tengah.

- c. Hipotesis 3 : Belanja modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap PDRB Jawa Tengah.

$H_0: \beta_3 = 0$  Tidak ada pengaruh positif dan signifikan dari belanja modal terhadap PDRB Jawa Tengah.

$H_a: \beta_3 > 0$  Ada pengaruh positif dan signifikan dari belanja modal terhadap PDRB Jawa Tengah.

Untuk mencari  $t_{hitung}$  digunakan rumus :

$$t = \frac{\beta_i}{Se \beta_i}$$

Keterangan:

$t$  = nilai statistik  
 $\beta_i$  = Koefisien regresi variabel  
 $Se$  = Simpangan baku

Dengan tingkat kepercayaan sebesar 95% ( $\alpha = 5\%$ ) derajat kebebasan ( $df$ ) sebesar  $(n - k)$ , maka :

- Jika  $t_{hitung} > t_{tabel}$  atau  $-t_{hitung} < -t_{tabel} \rightarrow H_0$  ditolak
- Jika  $-t_{tabel} \leq t_{hitung} \leq +t_{tabel} \rightarrow H_0$  diterima

### 3. Uji F-Statistik

Uji F digunakan untuk menunjukkan apakah keseluruhan variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen dengan menggunakan *level of significance* 5 persen, dengan rumus sebagai berikut:

$$F = \frac{R^2 / (k-1)}{(1-R^2) / (N-k)}$$

Dimana nilai  $R^2$  adalah koefisien determinasi, N adalah jumlah sampel dan K adalah banyaknya parameter (Damodar Gujarati, 1999).

Hipotesis yang digunakan sebagai berikut :

$H_0 = \beta_1 = \beta_2 = \beta_3 = 0$ , artinya variabel independen secara bersama-sama tidak berpengaruh terhadap variabel dependen.

$H_a \neq \beta_1 \neq \beta_2 \neq \beta_3 \neq 0$ , artinya variabel independen secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependen.

Dengan derajat kepercayaan sebesar 95% ( $\alpha = 5\%$ ) dan derajat kebebasan ( $df$ ) sebesar  $(k-1) (n-k)$ , maka :

- Jika  $F_{hitung} < F_{tabel} (F \{ \alpha, k-1, n-k \}) \rightarrow H_0$  diterima

- Jika  $F_{hitung} > F_{tabel} (F \{ \alpha, k-1, n-k \}) \rightarrow H_0$  ditolak

### 3.5.3 Pengujian Asumsi Klasik

Suatu model dikatakan baik untuk alat prediksi apabila mempunyai sifat-sifat tidak bias linier terbaik suatu penaksir. Disamping itu suatu model dikatakan cukup baik dan dapat dipakai untuk memprediksi apabila sudah lolos dari serangkaian uji asumsi klasik yang melandasinya. Uji asumsi klasik dalam penelitian ini terdiri dari :

#### 1. Uji Normalitas

Uji normalitas dilakukan untuk memeriksa apakah *error term* mendekati distribusi normal atau tidak. Jika asumsi ini tidak terpenuhi maka prosedur pengujian menggunakan statistik t menjadi tidak sah. Uji normalitas *error term* yang dilakukan adalah uji *Jarque-Bera* yang pengujiannya dilakukan berdasarkan *error* dan penduga *least squares*. Prosedur pengujiannya adalah

$H_0$  : *Error term* terdistribusi normal,

$H_a$  : *Error term* tidak terdistribusi normal.

Jika *probability Obs\*R-squared* lebih besar dibandingkan dengan taraf nyata maka *error term* terdistribusi normal.

## 2. Uji Multikolinieritas

Multikolinieritas berarti adanya hubungan linier yang sempurna atau pasti, diantara beberapa atau semua variabel yang menjelaskan dari model regresi (Damodar Gujarati: 1999). Jadi multikolinieritas digunakan untuk menguji apakah pada model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independent. Konsekuensi dari multikolinieritas adalah sebagai berikut: Apabila ada kolinieritas sempurna diantara X, koefisien regresinya tak tertentu dan kesalahan standarnya tak terhingga. Jika kolinieritas tingkatnya tinggi tetapi tidak sempurna, penaksiran koefisien regresi adalah mungkin, tetapi kesalahan standarnya cenderung untuk besar. Sebagai hasilnya, nilai populasi dari koefisien tidak dapat ditaksir dengan tepat.

Untuk mengetahui keberadaan multikolinieritas antara lain dengan langkah pengujian terhadap masing-masing variabel independen dengan mengetahui seberapa jauh korelasinya ( $r^2$ ) yang didapat dari hasil regresi bersama variabel independen dengan variabel dependen jika ditemukan nilai  $r^2$  melebihi nilai  $R^2$  pada model penelitian, maka dari model persamaan tersebut terdapat multikolinieritas, dan sebaliknya jika  $R^2$  lebih

besar dari semua  $r^2$  maka menunjukkan tidak terdapatnya multikolinieritas pada persamaan yang diuji.

### 3. Uji Autokorelasi

Uji ini dilakukan untuk mengetahui tidak adanya korelasi diantara kesalahan pengganggu pada periode  $t$  dengan kesalahan pada periode  $t-1$  (sebelumnya) dalam model regresi. Jika terjadi korelasi, maka dinamakan ada *problem* auto korelasi. Autokorelasi muncul karena observasi yang berurutan sepanjang waktu berkaitan satu sama lain. Masalah ini timbul karena residual (kesalahan pengganggu) tidak bebas dari satu observasi ke observasi lainnya. Persamaan regresi yang baik adalah yang tidak ada autokorelasi. Uji autokorelasi yang dipakai penulis dengan menggunakan uji Durbin Waston (Ghozali, 2001).

Pengambilan keputusan ada tidaknya autokorelasi :

1. Bila  $D_w \text{ hit} > \text{upper bound (} d_u \text{)}$  maka koefisien autokorelasi sama dengan nol, berarti tidak ada autokorelasi.
2. Bila  $D_w \text{ hit} < \text{lower bound (} d_l \text{)}$  maka koefisien autokorelasi lebih besar daripada nol, berarti ada autokorelasi positif.
3. Bila  $d_l \leq D_w \text{ hit} \leq d_u$ , maka hasilnya tidak dapat disimpulkan.
4. Bila  $D_w \text{ hit} > (4-d_l)$ , maka koefisien autokorelasi lebih kecil dari nol ada autokorelasi negatif.
5. Bila  $D_w \text{ hit} < (4-d_u)$ , maka koefisien autokorelasi sama dengan nol, tidak ada autokorelasi.

6. Bila  $(4-du) \leq Dw_{hit} \leq (4-dl)$ , maka hasilnya tidak dapat disimpulkan.

#### **4. Uji Heterokedastisitas**

Heteroskedastisitas adalah keadaan dimana faktor gangguan tidak memiliki varian yang sama. Pengujian terhadap gejala heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan melakukan *White Heteroskedasticity Test*. Pedoman dalam penggunaan model *white Heteroskedasticity test* adalah jika nilai probabilitas signifikansinya di atas tingkat kepercayaan 5% yang menunjukkan tidak adanya heterokedastisitas.

## **BAB IV**

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **4.1 Provinsi Jawa Tengah**

Jawa Tengah merupakan salah satu provinsi di Jawa, letaknya diapit oleh dua provinsi besar yaitu Jawa Barat dan Jawa Timur. Letaknya antara  $5^{\circ}40'$  dan  $8^{\circ}30'$  Lintang Selatan dan antara  $108^{\circ}30'$  dan  $111^{\circ}30'$  Bujur Timur (termasuk Pulau Karimunjawa). Jarak terjauh dari Barat ke Timur adalah 263 km dan dari Utara ke Selatan 226 km (tidak termasuk Pulau Karimunjawa).

Secara administratif, Provinsi Jawa Tengah terdiri atas 29 kabupaten dan 6 kota. Administrasi pemerintahan kabupaten dan kota ini terdiri atas 545 kecamatan dan 8.490 desa/kelurahan. Sebelum diberlakukannya Undang-undang Nomor 22/1999 tentang Pemerintahan Daerah, Jawa Tengah juga terdiri atas 4 kota administratif, yaitu Purwokerto, Purbalingga, Cilacap, dan Klaten. Namun sejak diberlakukannya Otonomi Daerah tahun 2001 kota-kota administratif tersebut dihapus dan menjadi bagian dalam wilayah kabupaten. Menyusul otonomi daerah, 3 kabupaten memindahkan pusat pemerintahan ke wilayahnya sendiri, yaitu Kabupaten Magelang (dari Kota Magelang ke Mungkid), Kabupaten Tegal (dari Kota Tegal ke Slawi), serta Kabupaten Pekalongan (dari Kota Pekalongan ke Kajen).

**Gambar 4.1**  
**Kabupaten Dan Kota Di Provinsi Jawa Tengah**



Sumber : Jawa Tengah Dalam Angka, BPS, 2008.

Berpangkal dari berbagai studi yang sudah dilaksanakan maka operasi PMA/PMDN di Jawa Tengah lebih diarahkan merata ke daerah-daerah minus dan sedang, tanpa meninggalkan daerah-daerah yang sudah berkembang, terutama karena daerah-daerah minus tersebut ditemukan potensi-potensi baru. Daerah minus Rembang, Blora, Purwodadi, yang selamanya minus dengan *agricultural approach* ternyata dapat dikembangkan dengan *industrial approach*, karena mengandung potensi untuk pabrik semen, pabrik kaca, dan pabrik keramik. Di samping itu melalui *agri-industrial approach* dapat dikembangkan pabrik etanol. Daerah minus Wonogiri, dengan berfungsinya Waduk Gajah Mungkur disamping meningkatkan produksi pertanian juga melahirkan potensi baru yaitu pariwisata dan industri semen serta calcium carbonat. Selain itu dapat pula dikembangkan industri pengolahan mete. Daerah

minus Dieng-Slamet, juga mempunyai potensi menjadi pusat wisata serta perkebunan buah-buahan.

Pola investasi yang diterapkan Jawa Tengah secara operasional proyek-proyek penanaman modal lebih diarahkan lagi guna tercapainya pemerataan pembangunan antar daerah, atas pertimbangan adanya potensi alam, potensi manusia, serta potensi pendukung berupa sarana prasarana yang dimiliki semua daerah tingkat II. Apabila potensi-potensi tersebut tidak didaya gunakan maka pembangunan ekonomi tidak akan terwujud, karena pada dasarnya pembangunan ekonomi adalah mengolah kekuatan potensial menjadi kekuatan riil.

Berdasarkan potensi sebagaimana tersebut tadi, maka arah perkembangan investasi di Provinsi Jawa Tengah ditujukan ke lima daerah :

1. Daerah basis pertanian (*Agro Based*), berada di eks Karisidenan Kedu dan eks Karisidenan Banyumas (khususnya dataran tinggi).
2. Daerah Basis Tanah Payau dan laut (*Aqua Culture and Marine Based*), terletak disepanjang pantai utara Jawa Tengah, dengan pusat pertumbuhan di Kabupaten Brebes, Kotamadya Tegal, Kotamadya Pekalongan, Kotamadya Semarang, Kabupaten Jepara dan Pelabuhan Juwana. Sedangkan pantai selatan pusat pertumbuhannya di Daerah Tingkat II Cilacap.
3. Daerah Basis Pertambangan (*Mining Based*), terletak di Kabupaten Wonosobo, Magelang, Boyolali, Klaten, Wonogiri, Sragen, dan Grobogan.

4. Daerah Basis Industri (*Manufacturing Based*), di sepanjang pantai utara sebelah barat mulai dari Kabupaten Tegal sampai dengan Kotamadya Semarang dan dilanjutkan di daerah sepanjang jalur utama, antara Kotamadya Semarang sampai dengan Kotamadya Surakarta (termasuk di sekitar Kabupaten Sukoharjo, Karanganyar, Klaten dan Sragen).
5. Daerah Pariwisata (*Tourism Based*), khususnya untuk wisata alam dan budaya, terletak di kes Kareisidenan Banyumas (daerah dataran tinggi) dan eks Kareisidenan Surakarta dengan pusatnya di Kotamadya Surakarta. Daerah pengembangan baru di Kabupaten Jepara, khususnya Pulau Karimunjawa.

Kondisi yang ada di Provinsi Jawa Tengah, dinilai terdapat cakupan yang sangat strategis dan berpotensi untuk mencapai target pertumbuhan investasi. Jawa Tengah selain potensial akan sumber-sumber bahan baku bagi industri juga sangat layak bagi pendirian industri karena di samping tenaga kerja dan upahnya murah juga tersedianya lokasi industri yang didukung oleh dua pelabuhan samudra di Semarang dan di Cilacap. Selain itu pemerintah Propinsi Jawa Tengah memiliki kemauan untuk mendorong industri yang berorientasi ekspor melalui beberapa kebijakan yang sifatnya di samping memberikan iklim yang mendorong, juga memberikan kemudahan-kemudahan bagi dunia usaha.

## **4.2 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)**

Pertumbuhan ekonomi daerah mencerminkan keadaan perekonomian disuatu daerah. Keadaan perekonomian ini akan mempengaruhi pertumbuhan dan kondisi perusahaan yang beroperasi di daerah yang bersangkutan. Semakin tinggi tingkat pertumbuhan disuatu daerah maka semakin besar pula kesempatan berkembang bagi perusahaan-perusahaan yang beroperasi di daerah yang bersangkutan. Hal ini disebabkan oleh karena tingkat pertumbuhan perekonomian daerah secara tidak langsung merupakan gambaran kemakmuran suatu daerah. Perhitungan pertumbuhan ekonomi dilakukan atas dasar angka PDRB.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi yang berada di suatu wilayah atau kabupaten, dengan cara mengurangkan biaya antara dari masing-masing total produksi bruto dari tiap-tiap kegiatan, sub sektor atau sektor dalam jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun). Unit-unit produksi tersebut dikelompokkan menjadi lapangan usaha yaitu :

1. Pertanian, Peternakan, Perkebunan, Kehutanan dan Perikanan
2. Pertambangan dan Penggalian
3. Industri Pengolahan
4. Listrik, gas dan air bersih
5. Konstruksi
6. Perdagangan, Hotel dan Restoran
7. Pengangkutan dan Komunikasi
8. Keuangan, Penyewaan dan Jasa-jasa Perusahaan

9. Jasa-jasa lain termasuk pelayanan pemerintah

Perkembangan PDRB di Jawa Tengah selama tahun 1978-2008 dapat dilihat pada tabel 4.1 berikut ini :

**Tabel 4.1**  
**Perkembangan nilai PDRB Provinsi Jawa Tengah**  
**Periode Tahun 1978-2008 (Dalam Juta Rupiah)**

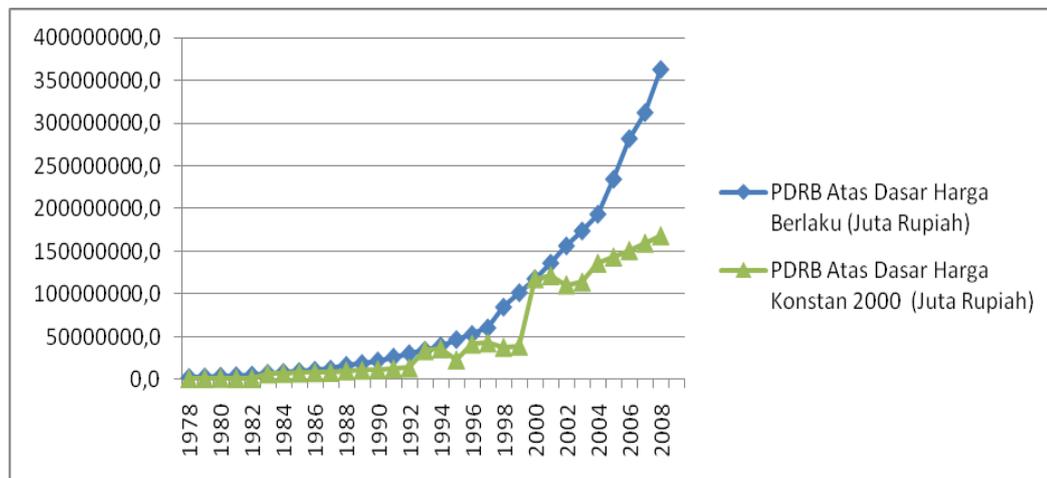
Tahun	PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (Juta Rupiah)	%	PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2000 (Juta Rupiah)	%
1978	2237154,5	-	1525090,0	-
1979	2845575,7	27,2	1789782,8	17,4
1980	3741066,6	31,5	2161591,6	20,8
1981	4385565,8	17,2	1785435,7	-17,4
1982	4998951,3	14,0	1856207,1	4,0
1983	7183914,7	43,7	7183914,7	28,7
1984	8288670,1	15,4	7678960,6	6,9
1985	9177171,7	10,7	8034645,2	4,6
1986	10575571,8	15,2	8584764,8	6,8
1987	11976693,2	13,2	8904604,6	3,7
1988	16422805,5	37,1	10652400,3	19,6
1989	18692151,2	13,8	11340260,4	6,5
1990	21689283,1	16,0	12133864,7	7,0
1991	25980442,6	19,8	13002573,8	7,2
1992	30200681,0	16,2	13970154,9	7,4
1993	34165656,5	13,1	34165656,5	14,6
1994	39303565,0	15,0	36345075,9	6,4
1995	46586032,9	18,5	23361934,2	-35,7
1996	52505360,6	12,7	41863626,7	79,2
1997	60296426,9	14,8	43130491,3	3,0
1998	84610222,5	40,3	38064703,3	-11,7
1999	101509193,8	20,0	39395037,7	3,5
2000	117782925,2	16,0	117782925,2	19,9
2001	136131480,2	15,6	121405047,9	3,1
2002	156418300,5	14,9	110582043,4	-8,9
2003	173852789,1	11,1	113882345,8	3,0
2004	193435263,1	11,3	135791690,5	19,2
2005	234435323,3	21,2	143053040,8	5,3
2006	281996709,1	20,3	150679513,3	5,3
2007	312428807,1	10,8	159110209,4	5,6
2008	362938708,3	16,2	167794132,3	5,5

Sumber : BPS, Jawa Tengah Dalam Angka, Berbagai Tahun Terbitan.

Berdasarkan Tabel 4.1 dapat diketahui nilai PDRB atas dasar harga harga berlaku dan nilai PDRB atas dasar konstan 2000 selama tahun 1978-2008 di Jawa Tengah. Pada Tabel 4.1 di atas menunjukkan bahwa tingkat PDRB secara umum mengalami peningkatan sepanjang tahun 1978-2008, meskipun untuk nilai PDRB

atas dasar konstan 2000 ada penurunan pada tahun-tahun tertentu. Secara runtut waktu pergerakan nilai PDRB Provinsi Jawa Tengah adalah sebagai berikut :

**Gambar 4.2**  
**PDRB Provinsi Jawa Tengah Tahun 1978-2008**



Sumber : Data sekunder yang diolah, 2010.

#### 4.2.1 PDRB Jawa Tengah Menurut Komponen Penggunaan

PDRB menurut komponen penggunaan terdiri dari konsumsi rumahtangga, konsumsi pemerintah, pembentukan modal, ekspor dan impor barang dan jasa. PDRB dari sudut penggunaan yang terbesar adalah untuk pengeluaran konsumsi rumahtangga . Kondisi PDRB Provinsi Jawa Tengah menurut komponen penggunaan selama tahun 2004-2008 diperoleh sebagai berikut :

**Tabel 4.2**  
**PDRB Provinsi Jawa Tengah Atas Dasar Harga Berlaku dan Harga Konstan Tahun 2000 Menurut Komponen Penggunaan Tahun 2004-2008**

Jenis Pengeluaran	PDRB Atas Dasar Harga Berlaku					PDRB Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2000				
	2004	2005	2006	2007	2008	2004	2005	2006	2007	2008
1. Konsumsi Rumah Tangga	63,75	62,60	61,55	62,64	63,91	64,77	64,64	64,32	67,31	64,01
a. Makanan	38,74	37,66	36,84	37,31	38,16	40,53	39,56	38,63	39,46	36,53
b. Non Makanan	25,01	24,96	24,71	25,33	25,74	24,24	25,08	25,68	27,85	27,48
2. Konsumsi Lembaga Swasta Nirlaba	1,69	1,55	1,47	1,47	1,47	1,60	1,49	1,44	1,51	1,44
3. Pengeluaran Konsumsi dan Hankam	10,06	10,48	11,56	12,44	12,92	10,24	11,20	11,96	13,38	13,29
4. Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto	16,85	15,69	17,21	17,66	18,51	16,00	16,57	17,76	18,68	17,98
5. Perubahan Stok	-1,44	5,65	4,50	-0,05	-2,06	-2,50	2,77	1,25	-1,34	-1,34
6. Ekspor Barang dan Jasa	55,56	49,47	42,94	46,79	49,74	63,20	58,85	54,23	56,97	51,48
a. Ekspor Luar Negeri	11,79	12,05	11,06	10,73	9,02	14,40	12,31	13,49	13,28	9,24
b. Ekspor Antar Propinsi	43,77	37,42	31,87	36,06	40,72	48,80	46,54	40,75	43,70	42,24
7. Impor Barang dan Jasa	46,47	45,43	39,23	40,95	44,48	53,31	55,52	50,96	56,52	46,86
a. Impor Luar Negeri	27,02	29,40	24,51	23,68	24,82	31,93	35,42	30,73	28,12	23,86
b. Impor Antar Propinsi	19,45	16,04	14,72	17,28	19,66	21,38	20,11	20,23	28,40	23,00
PDRB	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber : BPS, Jawa Tengah Dalam Angka, 2004-2008.

Berdasarkan Tabel 4.2 di atas dapat diketahui PDRB Provinsi Jawa Tengah atas dasar harga berlaku dan harga konstan 2000 menurut komponen penggunaan tahun 2004-2008. Berdasarkan harga berlaku tahun 2008, konsumsi rumahtangga mempunyai kontribusi 63,91 persen dari total PDRB Provinsi Jawa Tengah atau senilai 231.938,7 milyar rupiah. Dibandingkan tahun sebelumnya nilai tersebut naik 18,51 persen. Jika didasarkan harga konstan tahun 2000 nilainya mencapai 107.408,9 milyar rupiah, naik sebesar 5,42 persen dari tahun 2007.

Penggunaan lain yang cukup besar dari Produk Domestik Regional Bruto adalah untuk ekspor-impor barang dan jasa. Menurut harga berlaku,

tahun 2008 distribusi persentase PDRB untuk ekspor-impor barang dan jasa masing-masing adalah 49,74 persen dan 44,48 persen, sementara atas dasar harga konstan 2000 adalah 51,48 persen dan 46,86 persen.

Konsumsi pemerintah digunakan untuk penyelenggaraan pemerintah pusat dan daerah serta pertahanan dan keamanan. Distribusi persentase PDRB atas dasar harga berlaku tahun 2008 adalah sebesar 12,92 persen. Jika diukur berdasarkan harga konstan 2000, Distribusi persentase PDRB atas dasar harga konstan 2000 menurut komponen penggunaan di Jawa Tengah adalah sebesar 13,29 persen.

Pembentukan modal tetap domestik bruto yang digunakan untuk perbaikan barang modal yang mengakibatkan tambahan umur pemakaian atau meningkatkan kemampuan barang modal tersebut dikurangi dengan penjualan barang modal bekas mengalami peningkatan dari tahun ke tahun baik dalam PDRB atas dasar harga berlaku maupun PDRB atas dasar harga konstan tahun 2000.

### **4.3 Penanaman Modal Di Jawa Tengah**

Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) termasuk dalam golongan penanaman modal swasta. Apabila kemampuan penanaman modal pemerintah sangat terbatas, maka penanaman modal menjadi penting. Bersama-sama modal dalam negeri, penanaman modal asing yang memadai diharapkan mampu mengangkat kegiatan ekonomi dari kelesuan.

Semenjak diberlakukannya Undang-undang No. 1 Tahun 1967 jo. No.11 Tahun 1970 tentang PMA dan Undang-undang No.6 Tahun 1968 jo. No.12 Tahun 1970 tentang PMDN, investasi cenderung meningkat dari waktu ke waktu. Walau demikian, pada tahun-tahun tertentu sempat juga terjadi penurunan. Kecenderungan peningkatan bukan hanya berlangsung pada investasi oleh kalangan masyarakat atau sektor swasta, baik PMDN maupun PMA, namun juga penanaman modal oleh pemerintah. Ini berarti pembentukan modal domestik bruto meningkat dari tahun ke tahun ( Dumairy, 1996).

Perbaikan iklim penanaman modal tak henti-hentinya dilakukan oleh pemerintah, terutama sejak awal Pelita IV tepatnya tahun 1984, melalui berbagai paket kebijaksanaan deregulasi dan debirokrasi dilakukan penyerdehanaan mekanisme perijinan, penyerdehanaan tata cara impor barang modal, perlunakan syarat-syarat investasi, serta perangsangan investasi untuk sektor-sektor dan daerah-daerah tertentu.

Penanaman modal yang terjadi sejak berlakunya Undang-undang tentang Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), tidak terlepas dari kebijaksanaan-kebijaksanaan pemerintah yang menyangkut penanaman modal tersebut. Kebijaksanaan-kebijaksanaan pemerintah tersebut bertujuan untuk mendorong bertambahnya penanaman modal baik PMA, PMDN maupun penanaman modal lain.

Pada tahun 1998, pemerintah telah mengeluarkan kebijaksanaan di bidang investasi yang terkenal dengan Reformasi Kebijakan Investasi yang tertuang dalam bentuk enam Keputusan Presiden, dua Intruksi Presiden, satu Keputusan

Menteri dan satu Keputusan Bersama Menteri. Enam Keputusan Presiden tersebut, yaitu :

1. Keputusan Presiden Nomor 96 Tahun 1998 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup bagi Penanaman Modal.
2. Keputusan Presiden Nomor 99 Tahun 1998 tentang Bidang/Jenis Usaha yang dicadangkan untuk Usaha Kecil dan Bidang/Jenis Usaha yang Terbuka untuk Usaha Menengah atau Usaha Besar dengan Syarat Kemitraan.
3. Keputusan Presiden Nomor 113 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 1981 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal.
4. Keputusan Presiden Nomor 114 Tahun 1998 tentang perubahan atas keputusan Presiden Nomor 25 Tahun 1981 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi Badan Koordinasi Penanaman Modal.
5. Keputusan Presiden Nomor 115 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 97 Tahun 1983 tentang Tata Cara Penanaman Modal.
6. Keputusan Presiden Nomor 116 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1980 tentang Pembentukan Badan Koordinasi Penanaman Modal.

Dua Intruksi Presiden, yaitu :

1. Intruksi Presiden Nomor 22 Tahun 1998 tentang Penghapusan Kewajiban memiliki Rekomendasi Instansi Teknis dalam Permohonan Persetujuan Penanaman Modal.
2. Intruksi Presiden Nomor 23 Tahun 1998 tentang Penghapusan Ketentuan Memiliki Surat Persetujuan Prinsip dalam Pelaksanaan Realisasi Penanaman Modal Daerah.

Keputusan Menteri yang dikeluarkan yaitu Keputusan Menteri Negara Investasi/Kepala BKPM Nomor 21/SK/1998 tentang pelimpahan Kewenangan Pemberian Persetujuan dan Fasilitas Serta Perijinan Pelaksanaan Penanaman Modal Dalam Negeri Tertentu kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I. Sedangkan Keputusan Bersama Menteri yaitu Keputusan Bersama Menteri Negara Investasi/Kepala BKPM dan Menteri Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah Nomor 22/SK/1998 07/SKB/M/VII/1998 tentang Pemberdayaan Usaha Kecil Melalui Kemitraan dalam rangka Penanaman Modal.

Selanjutnya, pada tahun 2007 pemerintah menetapkan kebijakan dasar penanaman modal yang diwujudkan dalam bentuk Rencana Umum Penanaman Modal sesuai dengan Undang-undang Nomor 25 Pasal 4 Tahun 2007. Rencana kerja dan pembangunan yang ada sebelum ini yang juga memuat masalah penanaman modal, adalah :

1. Inpres Nomor 3 Tahun 2006 tentang Paket Kebijakan Perbaikan Iklim Investasi.
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025.

3. Perpres Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009.
4. Perpres Nomor 19 Tahun 2006 tentang Rencana Kerja Pemerintah tahun 2007; dan
5. Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2008.

Penyebaran PMA dan PMDN mengikuti pola sebagai berikut :

1. Di kota-kota padat penduduknya dibuat rencana wilayah industri (*industrial zone*) dengan tujuan meningkatkan daya tarik bagi investor, mengatur tata kota, tata daerah, tata ruang, dan tata lingkungan. Menghemat penyediaan prasarana, memudahkan pengaturan fasilitas, memudahkan pengendalian pencemaran dan menghemat pembiayaannya.
2. Khusus industri tekstil yang memerlukan udara dingin/lembab, dan air buangnya tidak terlalu mencemarkan sawah, dapat ditempatkan di daerah-daerah dingin.
3. Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan perikanan serta industri-industri yang mengolah hasil-hasilnya dapat ditempatkan ditengah-tengah lokasi bahan baku.
4. Pertambangan dan industri-industri yang mengolah hasil-hasil pertambangan diletakkan sedikit mungkin dengan deposit bahan baku.
5. Proyek-proyek pariwisata dikembangkan dilokasi potensinya.
6. Di daerah pelabuhan dikembangkan *export processing zone* dan industri-industri maritim.

### **4.3.1 Ketentuan Umum dan Prosedur Penanaman Modal**

#### **4.3.1.1 Penanaman Modal Asing**

1. Ketentuan Umum Penanaman Modal Asing

Penanaman Modal Asing dapat dilaksanakan dengan cara :

- (1) Patungan antar modal asing yang dimiliki oleh orang asing dan / atau badan hukum asing dengan modal yang dimiliki oleh WNI (Perseorangan, PT, BUMN, BUMD, Koperasi).
- (2) Langsung dalam arti seluruh modalnya (100%) terdiri dari kodal yang dimiliki oleh dan / atau badan hukum asing.

2. Prosedur Penanaman Modal Asing, yaitu :

- (1) Permohonan penanaman modal baru dalam rangka PMA dapat diajukan oleh :
  - Warga Negara Asing dan / atau Badan Hukum Asing dan / atau Perusahaan PMA atau
    - Warga Negara Asing dan / atau Badan Hukum Asing dan / atau perusahaan PMA bersama dengan Warga Indonesia dan / atau Badan Hukum Indonesia.
- (2) Permohonan penanaman modal baru sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan kepada Ketua Badan Pengelola dengan menggunakan bentuk Formulir Model I/PMA sebagaimana terdapat pada lampiran 2 sebanyak 3 (tiga) rangkap.
- (3) Dalam waktu selambat-lambatnya 5 hari kerja sejak permohonan yang telah lengkap dan benar diterima, Badan Pengelola

menyampaikan hasil penilaian kepada Menteri Negara Investasi/Kepala BPM untuk penyelesaian lebih lanjut sehingga diterbitkannya Surat Persetujuan Menteri Negara Investasi/Kepala BPM dalam bentuk Surat Persetujuan Penanaman Modal Asing (SP PMA).

- (4) SP PMA disampaikan kepada pemohon melalui Badan Pengelola selambat-lambatnya 20 hari kerja sejak permohonan yang telah lengkap dan diterima Badan Pengelola.
- (5) Surat Persetujuan PMA berlaku selama 3 tahun dan akan batal dengan sendirinya apabila dalam jangka waktu 3 tahun terhitung sejak tanggal SPPMA diterbitkan tidak ada relasi proyek dalam bentuk kegiatan nyata baik dalam bentuk administrasi ataupun dalam bentuk fisik dimaksud dalam pasal 3 ayat (2).
- (6) Penanaman Modal Asing merupakan aliran modal yang berasal dari luar negeri yang mengalir ke sektor swasta baik yang melalui investasi langsung (*direct investment*) maupun investasi langsung (*portofolio*).

#### **4.3.1.2 Penanaman Modal Dalam Negeri**

1. Ketentuan Umum Penanaman Modal dalam Negeri
  - (1) PMDN dapat dilaksanakan oleh perorangan, PT, CV, Firma, Koperasi, BUMN, BUMD.
  - (2) Ijin Usaha Tetap Bagi PMDN berlaku selama usaha itu masih berjalan.

## 2. Prosedur Penanaman Modal dalam Negeri

- (1) Permohonan penanaman modal baru dalam rangka penanaman Modal dalam Negeri dapat diajukan oleh Perseroan Terbatas (PT) atau Commanditaire Vennotshcap (CV) atau Firma (Fa). Badan Usaha Koperasi, BUMN, BUMD ataupun perorangan.
- (2) Permohonan penanaman modal baru sebagaimana dimaksud ayat (1) diajukan kepada Ketua Badan Pengelola dengan menggunakan bentuk Formulir Model I / PMDN sebagaimana terdapat pada Lampiran I sebanyak 3 (tiga) rangkap.
- (3) Dalam jangka waktu selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari kerja sejak permohonan yang telah lengkap dan benar diterima, Ketua Badan Pengelola menerbitkan persetujuan dalam bentuk Surat Persetujuan Penanaman Modal Dalam Negeri (SP PMD) untuk disampaikan kepada Pemohon yang bersangkutan.
- (4) Surat Persetujuan Penanaman Modal Dalam Negeri berlaku selama 3 tahun dan akan batal dengan apabila dalam jangka waktu 3 tahun terhitung sejak tanggal SP PMDN diterbitkan tidak ada realisasi proyek dalam bentuk kegiatan nyata, baik dalam bentuk administrasi ataupun dalam bentuk fisik sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2).

Pada Tabel 4.3 berikut ini memperlihatkan perkembangan penanaman modal swasta di Jawa Tengah dalam kurun waktu 1978-2008.

**Tabel 4.3**  
**Perkembangan Penanaman Modal Swasta Di Jawa Tengah**  
**Tahun 1978-2008**

<b>Tahun</b>	<b>PMA (Juta Rupiah)</b>	<b>Jumlah Proyek</b>	<b>PMDN (Juta Rupiah)</b>	<b>Jumlah Proyek</b>
1978	194.432.605,50	21	1.351.374,06	173
1979	194.432.605,50	21	1.587.713,47	187
1980	194.432.605,50	21	1.650.286,71	191
1981	194.432.605,50	21	1.932.923,06	203
1982	195.884.156,50	22	4.331.562,30	248
1983	204.258.084,00	23	1.927.806,16	277
1984	216.405.315,25	24	5.821.751,00	272
1985	277.740.914,60	24	6.973.604,00	270
1986	433.754.015,36	25	7.377.950,00	269
1987	477.823.722,20	27	8.486.299,00	286
1988	628.834.645,80	30	1.076.869,80	309
1989	2.734.167.070,00	35	7.895.000,00	421
1990	198.449.565,00	43	6.597.780,94	466
1991	503.506.086,28	23	6.122.047,00	252
1992	182.281.806,74	6	1.370.565,72	17
1993	204.142.116,84	14	2.984.208,94	28
1994	4.042.667.263,95	22	6.819.769,19	55
1995	1.653.974.924,10	23	4.687.532,52	59
1996	3.585.619.637,10	21	1.123.517,93	75
1997	2.464.255.635,00	21	1.953.196,71	37
1998	1.727.663.175,00	10	940.943,54	33
1999	1.143.314.088,84	22	300.574,44	23
2000	1.535.376.615,00	17	666.078,00	13
2001	698.551.150,00	43	756.172,00	21
2002	655.701.115,00	56	777.116,97	35
2003	513.658.654,85	52	1.062.158,55	25
2004	4.688.012.700,00	0	1.900.000,00	0
2005	5.411.537.285,20	127	5.756.775,87	78
2006	3.442.651.764,20	53	5.067.314,48	16
2007	2.987.378.076,90	82	1.191.875,23	15
2008	432.403.017,00	36	1.336.340,57	15

Sumber : BPMD Provinsi Jawa Tengah, 2008.

Perkembangan perekonomian daerah Jawa Tengah, tidak lepas dari peranan penanaman modal yang ditanamkan di Jawa Tengah, dimana realisasi

penanaman modal swasta selama periode tahun 1978-2008 berfluktuasi. Realisasi Penanaman Modal Daerah Dalam Negeri (PMDN) pada tahun 2008 sebanyak 15 proyek dengan total investasi sebesar 1.336.340,5 juta rupiah. Nilai ini mengalami kenaikan apabila dibandingkan dengan nilai PMDN pada tahun 2007 yang mencapai nilai 1.191.875,2 juta rupiah dengan jumlah proyek sama yaitu 15 buah proyek. Investasi swasta memainkan peranan penting dalam membentuk pola pembangunan daerah. Investasi ini akan menyebabkan terbentuknya modal daerah (*Regional Capital Formation*). Investasi yang ditanamkan hendaknya diarahkan kepada penggunaan yang produktif atau yang dapat meningkatkan output.

Untuk Penanaman Modal Asing di Jawa Tengah nilainya juga berfluktuasi sama halnya dengan nilai investasi PMDN. Realisasi PMA tahun 2008 sebanyak 36 proyek dengan nilai investasi sebesar 432.403.017,0 Juta Rupiah. Nilai investasi tersebut jauh mengalami penurunan apabila dibandingkan dengan nilai investasi PMA pada tahun 2007 yang nilainya mencapai 2.987.378.076,9 Juta Rupiah, namun dalam jumlah proyek lebih besar yaitu sebesar 82 proyek. Selengkapnya perkembangan penanaman modal swasta di Jawa Tengah tahun 1978 sampai dengan tahun 2008 dapat dilihat pada gambar 4.3 berikut ini :

#### 4.4 Belanja Modal

Pembiayaan pembangunan daerah, selain diperoleh dari partisipasi masyarakat yang berupa penanaman modal baik asing maupun domestik, pembiayaan pembangunan daerah juga diperoleh dari belanja modal. belanja modal merupakan belanja yang manfaatnya melebihi satu tahun anggaran dan akan menambah aset atau kekayaan daerah serta akan menimbulkan konsekuensi menambah belanja yang bersifat rutin seperti biaya pemeliharaan. Belanja modal merupakan strategi alokasi belanja daerah yang berperan sebagai kegiatan investasi oleh pemerintah. Tabel 4.3 berikut menjelaskan alokasi anggaran belanja modal Provinsi Jawa Tengah :

**Tabel 4.4**  
**Belanja Modal Provinsi Jawa Tengah**  
**Tahun 1978-2008 (Juta Rupiah)**

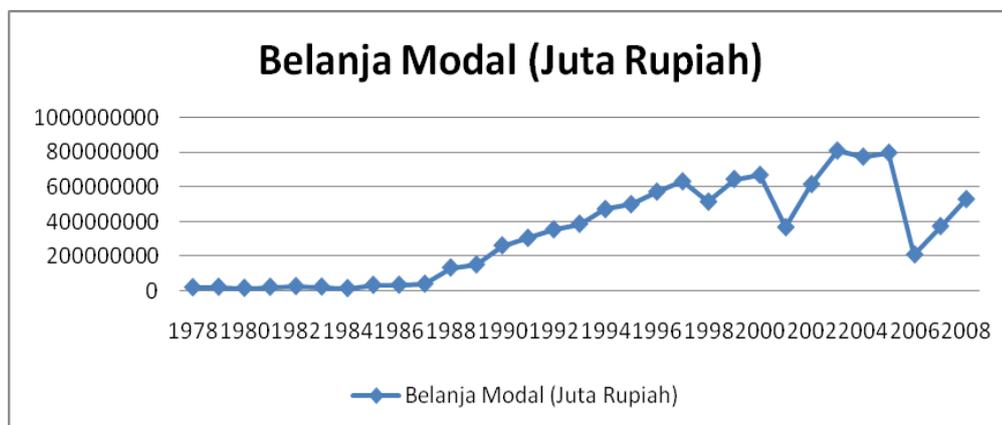
<b>Tahun</b>	<b>Belanja Modal</b>	<b>Tahun</b>	<b>Belanja Modal</b>
1978	18.514.791	1994	472.237.785
1979	21.676.918	1995	500.411.517
1980	15.314.816	1996	573.189.940
1981	21.557.557	1997	633.128.974
1982	25.411.144	1998	515.026.595
1983	22.762.134	1999	646.683.760
1984	13.711.493	2000	670.516.604
1985	32.705.694	2001	367.160.178
1986	33.336.629	2002	616.799.691
1987	39.357.098	2003	811.574.069
1988	133.191.267	2004	776.353.033
1989	150.789.130	2005	799.215.779
1990	261.727.765	2006	209.072.075
1991	305.146.838	2007	373.237.100
1992	355.013.158	2008	530.168.617
1993	387.494.644		

Nb : Sejak Keputusan Menteri Dalam Negeri No.29 Tahun 2002, belanja pembangunan berubah nama menjadi belanja modal.

Sumber : Biro Keuangan Setda Provinsi Jawa Tengah, 1978-2008.

Berdasarkan Tabel 4.4 dapat diketahui alokasi belanja modal Provinsi Jawa Tengah periode tahun 1978-2008. Dari Tabel 4.4 dapat dilihat peranan pemerintah dalam pembentukan modal cukup berarti, karena nilai belanja modal pemerintah dari tahun ke tahun mengalami peningkatan, kecuali pada beberapa tahun mengalami penurunan terutama setelah terjadinya krisis ekonomi. Nilai belanja modal tertinggi berada pada tahun 2003 yaitu sebesar 811.574.069 juta rupiah, dan nilai terendah yaitu pada tahun 1984 yaitu sebesar 13.711.493 juta rupiah. Penurunan nilai investasi pemerintah ini sebagai akibat dari turunnya sumber penerimaan pemerintah dari sektor migas. Turunnya penerimaan daerah menyebabkan turunnya tabungan pemerintah, sehingga tingkat investasi pemerintah mengalami penurunan. Gambar 4.3 berikut ini menunjukkan perkembangan alokasi belanja modal Provinsi Jawa Tengah tahun 1978-2008 :

**Gambar 4.3**  
**Perkembangan Alokasi Belanja Modal**  
**Provinsi Jawa Tengah Tahun 1978-2008**



Sumber : Data sekunder yang diolah, 2010.

## **4.5 Hasil Pengujian Stasioneritas**

### **4.5.1 Uji Akar Unit (*Unit Root Test*)**

Pengujian stasioneritas data yang dilakukan terhadap seluruh variabel dalam model penelitian yang diajukan menggunakan metode *Augmented Dickey Fuller Test (ADF-Test)*.

Berdasarkan hasil akar unit, setelah dilakukan *first difference* dari data penelitian, diketahui  $t\text{-ADF} < t\text{-kritis}$ . Ini berarti bahwa semua variabel stasioner pada tingkat  $\alpha = 1\%$  dan terintegrasi pada order yang sama yaitu  $I(1)$ . Dengan demikian syarat stasioner data terpenuhi.

### **4.5.2 Uji Kointegrasi**

Setelah keseluruhan variabel yang akan digunakan dalam penelitian menunjukkan hasil yang stasioner, maka selanjutnya digunakan uji kointegrasi. Uji kointegrasi adalah uji ada tidaknya hubungan jangka panjang antara variabel bebas dan terikat. Dalam pengujian ini digunakan juga uji ADF untuk melihat apakah residual regresi kointegrasi stasioner atau tidak.

Nilai  $t\text{-ADF}$  pada tingkat kepercayaan 1%, 5% dan 10% secara berturut-turut adalah -2,6453, -1,9530, dan -1,6218. Dari hasil pengujian kointegrasi diperoleh nilai  $t\text{-statistik}$  sebesar -3,7122 yang lebih kecil dari nilai  $t\text{-ADF}$  pada  $\alpha = 1\%$ . Ini berarti  $H_0$  ditolak. Sehingga dapat disimpulkan pada tingkat kepercayaan 99% hasil regresi memiliki variabel-variabel yang terkointegrasi pada derajat  $I(0)$ . Hal tersebut menunjukkan bahwa nilai residual persamaan regresi pada model yang

akan dibuat adalah stasioner sehingga dapat dikatakan model regresi tersebut adalah regresi yang terkointegrasi.

#### 4.6 Hasil Regresi *Error Correction Model* ( Jangka pendek)

Model persamaan dinamis dimaksudkan untuk mengetahui pengaruh perubahan berbagai variabel independen terhadap perubahan variabel dependennya dalam jangka pendek. Model ini digunakan untuk mengetahui bagaimana ketidakseimbangan jangka pendek yang digambarkan dengan variabel *first difference*-nya dikoreksi atau disesuaikan untuk mencapai keseimbangan jangka panjangnya yang digambarkan dengan signifikansi dari *variabel error correction term*-nya.

Dalam analisis mengenai pertumbuhan ekonomi diperlukan juga proses penyesuaian dinamis yang disebut mekanisme koreksi error (*Error Correction Mechanism*) yang akan menunjukkan ada tidaknya keseimbangan dalam jangka pendek dari suatu model. Hasil estimasi persamaan persamaan dinamis adalah sebagai berikut :

**Tabel 4.5**  
**Hasil estimasi output *Error Correction Model***

Dependent Variable: D(PDRB)  
Method: Least Squares  
Date: 07/22/10 Time: 12:55  
Sample(adjusted): 1979 2008  
Included observations: 30 after adjusting endpoints

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.087141	0.054639	1.594843	0.1233
D(LPMA)	0.042062	0.012640	3.327586	0.0043
D(LPMDN)	0.547945	0.152874	3.584300	0.0014
D(LBELANJA)	0.178070	0.134207	1.326834	0.1966
RESID01(-1)	-0.201758	0.104742	-1.926250	0.0655
R-squared	0.793900	Mean dependent var		0.156689
Adjusted R-squared	0.760924	S.D. dependent var		0.603113
S.E. of regression	0.294894	Akaike info criterion		0.546612
Sum squared resid	2.174065	Schwarz criterion		0.780145
Log likelihood	-3.199178	F-statistic		24.07510
Durbin-Watson stat	2.302738	Prob(F-statistic)		0.000000

Sumber : Lampiran D.

#### 4.6.1 Pengujian Statistik

##### 1. Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Koefisien determinasi ( $R^2$ ) mencerminkan besarnya pengaruh perubahan variabel bebas dalam menjelaskan perubahan pada variabel tidak bebas secara bersama-sama, dengan tujuan untuk mengukur kebenaran dan kebaikan hubungan antar variabel dalam model yang digunakan. Besarnya nilai koefisien determinasi adalah 0 hingga 1 ( $0 < R^2 < 1$ ), dimana nilai koefisien mendekati 1, maka model tersebut dikatakan baik karena semakin dekat hubungan antara variabel bebas dengan variabel tidak bebasnya.

Hasil estimasi ECM menunjukkan nilai koefisien determinasi ( $R^2$ ) sebesar 0,793900 Artinya besarnya pengaruh yang diberikan oleh variabel PMA, PMDN dan belanja modal terhadap PDRB tahun 1978-2008 secara bersama-sama adalah sebesar 79,39 %. Sedangkan sisanya sebesar 20,61 % adalah dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

##### 2. Uji t-statistik

Pengujian statistik dilakukan untuk mengetahui tingkat signifikansi variabel bebas terhadap variabel tidak bebasnya secara parsial. Uji ini dilakukan dengan membandingkan nilai t-hitung dengan t-kritis pada tabel. Pada uji statistik secara parsial dengan nilai t kritis (*critical value*) pada  $df = (n-k)$ , dimana n adalah jumlah sampel dan k adalah jumlah variabel independen termasuk konstanta. Untuk menguji koefisien regresi parsial

secara individu dari masing-masing variabel bebas akan diuji sebagai berikut :

**a. Pengaruh realisasi Penanaman Modal Asing (PMA) terhadap PDRB Jawa Tengah.**

Hipotesis yang diajukan adalah :

Hipotesis 1 : PMA berpengaruh positif dan signifikan terhadap PDRB Jawa Tengah.

$H_0 : \beta_1 = 0$  Tidak ada pengaruh positif dan signifikan dari PMA terhadap PDRB Jawa Tengah.

$H_a : \beta_1 > 0$  Ada pengaruh positif dan signifikan dari PMA terhadap PDRB Jawa Tengah.

Dari hasil regresi diperoleh nilai t hitung untuk realisasi nilai Penanaman Modal Asing (PMA) sebesar 3,327586 dan pada t tabel dengan  $\alpha = 5 \%$ ,  $df = 27$  diperoleh 1,703. Terlihat bahwa t hitung lebih besar dari t kritis, berarti bahwa realisasi nilai Penanaman Modal Asing (PMA) berpengaruh secara signifikan terhadap terhadap PDRB di Provinsi Jawa Tengah.

Berdasarkan probabilitasnya, maka jika probabilitas lebih besar dari 0,05 maka  $H_0$  diterima dan jika probabilitas lebih kecil dari 0,05 maka  $H_0$  ditolak. Dari hasil perhitungan diketahui *sig.* atau *significance* adalah 0,0043 atau probabilitas di bawah 0,05, maka  $H_0$  ditolak artinya bahwa realisasi nilai Penanaman Modal

Asing (PMA) berpengaruh secara signifikan terhadap PDRB di Provinsi Jawa Tengah.

**b. Pengaruh realisasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) terhadap PDRB Jawa Tengah.**

Hipotesis yang diajukan adalah :

Hipotesis 2 : PMDN berpengaruh positif dan signifikan terhadap PDRB Jawa Tengah.

$H_0: \beta_2 = 0$  Tidak ada pengaruh positif dan signifikan dari PMDN terhadap PDRB Jawa Tengah.

$H_a: \beta_2 > 0$  Ada pengaruh positif dan signifikan dari PMDN terhadap PDRB Jawa Tengah.

Dari hasil regresi diperoleh nilai t hitung untuk realisasi nilai Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) sebesar 3,5843 dan pada t tabel dengan  $\alpha = 5 \%$ ,  $df = 27$  diperoleh 1,703 . Terlihat bahwa t hitung lebih besar dari t kritis, maka  $H_0$  ditolak yang berarti bahwa realisasi nilai Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) berpengaruh positif dan signifikan terhadap PDRB di Provinsi Jawa Tengah.

Berdasarkan probabilitasnya, maka jika probabilitas lebih besar dari 0,05 maka  $H_0$  diterima dan jika probabilitas lebih kecil dari 0,05 maka  $H_0$  ditolak. Dari hasil perhitungan diketahui *sig.* atau *significance* adalah 0,0014 atau probabilitas di bawah 0,05, maka  $H_0$  ditolak artinya bahwa realisasi nilai Penanaman Modal

Dalam Negeri (PMDN) berpengaruh secara signifikan terhadap PDRB di Provinsi Jawa Tengah.

**c. Pengaruh realisasi belanja modal terhadap PDRB Jawa Tengah.**

Hipotesis 3 : Belanja modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap PDRB Jawa Tengah.

$H_0 : \beta_3 = 0$  Tidak ada pengaruh positif dan signifikan dari belanja modal terhadap PDRB Jawa Tengah.

$H_a : \beta_3 > 0$  Ada pengaruh positif dan signifikan dari belanja modal terhadap PDRB Jawa Tengah.

Dari hasil regresi diperoleh nilai t hitung untuk realisasi nilai belanja modal sebesar 1,326834 dan pada t tabel dengan  $\alpha = 5\%$ ,  $df = 27$  diperoleh 1,703 . Terlihat bahwa t hitung lebih kecil dari t kritis, berarti bahwa realisasi nilai belanja modal tidak berpengaruh secara signifikan terhadap terhadap PDRB di Provinsi Jawa Tengah.

Berdasarkan probabilitasnya, maka jika probabilitas lebih besar dari 0,05 maka  $H_0$  diterima dan jika probabilitas lebih kecil dari 0,05 maka  $H_0$  ditolak. Dari hasil perhitungan diketahui *sig.* atau *significance* adalah 0,1966 atau probabilitas jauh di atas 0,05, maka  $H_0$  diterima artinya bahwa realisasi nilai belanja modal tidak

berpengaruh secara signifikan terhadap PDRB di Provinsi Jawa Tengah.

### 3. Uji F-statistik

Uji F-statistik untuk mengukur *godness of fit* dari persamaan regresi, yaitu pengaruh variabel bebas secara bersama-sama terhadap pergerakan variabel tidak bebasnya. Dengan demikian berlaku pengujian sebagai berikut :

- $H_0$  diterima jika  $F\text{-stat} < F\text{-tabel}$
- $H_0$  ditolak jika  $F\text{-stat} > F\text{-tabel}$

Berdasarkan hasil uji F-statistik, diperoleh nilai F hitung sebesar 24,07510 dengan sig F = 0,000. Oleh karena nilai F hitung  $>$  F tabel maka dapat disimpulkan bahwa  $H_0$  ditolak atau dengan kata lain bahwa PMA, PMDN dan belanja modal secara simultan berpengaruh signifikan terhadap PDRB di Jawa Tengah.

#### 4.6.2 Hasil Uji Asumsi Klasik

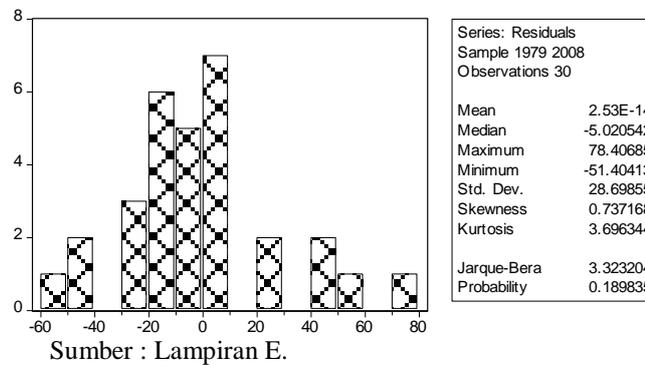
Hasil uji asumsi klasik terdiri dari normalitas, multikolonieritas, autokorelasi dan heteroskedastisitas. Penjelasan dari hasil normalitas, multikolonieritas, autokorelasi dan heteroskedastisitas adalah sebagai berikut :

##### 1. Uji Normalitas

Uji normalitas dilakukan untuk memeriksa apakah *error term* mendekati distribusi normal. Hal ini dapat dilihat dari nilai *probability Jarque-Bera* yang lebih besar dari taraf nyata 5%. Hasil yang diperoleh

menunjukkan bahwa *error term* terdistribusi secara normal dengan nilai *probability Jarque-Bera* sebesar 0,189.

**Gambar 4.4**  
**Uji Normalitas**



## 2. Uji Multikolinieritas

Multikolinieritas adalah tidak adanya hubungan hubungan linear antar variabel independen dalam suatu model regresi. Suatu model regresi dikatakan terkena multikolinieritas bila terjadi hubungan linear yang sempurna atau pasti di antara beberapa atau semua variabel bebas dari suatu model regresi. Akibatnya akan kesulitan untuk dapat melihat pengaruh variabel independen terhadap variabel dependennya.

Berdasarkan hasil auxiliary regressions, dapat disimpulkan bahwa nilai koefisien determinasi parsial ( $r^2$ ) lebih kecil dari nilai koefisien determinasi majemuk ( $R^2$ ), sehingga disimpulkan bahwa pada model ini tidak terdapat multikolinieritas.

## 3. Uji Autokorelasi

Untuk menguji ada atau tidaknya kesalahan pengganggu pada periode tertentu dengan kesalahan pada periode sebelumnya dalam model

regresi. Pengambilan keputusan ada tidaknya autokorelasi adalah dengan cara membandingkan nilai Durbin Watson (Dw) dengan nilai dl dan du pada tabel Durbin Watson. Hasil penghitungan diperoleh nilai Dw diketahui sebesar 2,302. Tabel Dw dengan tingkat signifikansi 5% dimana  $n = 31$  dan  $k$  (variabel) = 3 diperoleh nilai  $du = 1,65$  dan nilai  $4-du$  sebesar  $= 2,35$ . Ini berarti  $H_0$  diterima atau  $H_a$  ditolak. Asumsi autokorelasi terpenuhi.

#### 4. Uji Heteroskedastisitas

Pengujian heteroskedastisitas bertujuan untuk melihat apakah variabel pengganggu memiliki varians yang sama (homoskedastisitas). Hal ini dapat diketahui melalui *white heteroscedasticity*, dimana nilai *probability obs\*R-Squared* pada model persamaan harus lebih besar dari taraf nyata yang digunakan. Model persamaan ini memiliki nilai *probability obs\*R-Squared* sebesar 0,1411, yang artinya bernilai lebih besar dari taraf nyata  $\alpha = 0,05$ . Dapat diartikan bahwa model persamaan yang digunakan dalam penelitian ini tidak memiliki masalah heteroskedastisitas.

**Tabel 4.6**  
**Uji Heteroskedastisitas**

White Heteroskedasticity Test:			
F-statistic	2.037528	Probability	0.091912
Obs*R-squared	19.66121	Probability	0.141190

Sumber : Lampiran E.

#### 4.7 Interpretasi Hasil

Persamaan *Error Correction Model* dalam jangka pendek yang diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

$$\mathbf{LPDRB} = 0,087 + 0,042\mathbf{LPMA} + 0,547\mathbf{LPMDN} + 0,178\mathbf{LBM} - 0,202\mathbf{ECT}_{t-1}$$

Hasil estimasi menunjukkan bahwa error correction term ( $\mathbf{ECT}_{t-1}$ ) secara statistik signifikan pada  $\alpha = 10\%$ . Hal ini berarti bahwa terjadi koreksi penyesuaian perubahan jangka pendek kembali ke keseimbangan jangka panjangnya atau dengan kata lain bahwa ketidakseimbangan (disequilibrium) pada suatu periode akan dikoreksi pada periode berikutnya. Angka koefisien sebesar 0,202 berarti bahwa sekitar 0,202 dari ketidaksesuaian antara nilai PDRB yang aktual dengan nilai PDRB jangka panjangnya atau equilibriumnya akan dikoreksi atau dihilangkan setiap periodenya. Nilai  $\mathbf{ECT}_{t-1}$  yang bernilai negatif berarti pada jangka pendek, model tersebut berada di bawah keseimbangan jangka panjangnya, sehingga proses penyesuaian keseimbangan jangka pendek menuju ke keseimbangan jangka panjang arahnya bergerak ke atas. Berikut ini adalah pembahasan mengenai hubungan antara setiap variabel bebasnya dengan nilai PDRB Provinsi Jawa Tengah pada jangka pendek.

- **Hubungan antara Penanaman Modal Asing (PMA) dengan PDRB Provinsi Jawa Tengah pada jangka pendek.**

Koefisien dari variabel *first difference* PMA adalah sebesar 0,042. Nilai tersebut menunjukkan bahwa dalam jangka pendek hubungan antara PMA dengan nilai PDRB Jawa Tengah adalah positif dan nilainya secara statistik signifikan (pada  $\alpha=5\%$ ) mempengaruhi nilai PDRB Jawa Tengah. Hasil estimasi ini tidak

sesuai hipotesis yang menyatakan bahwa PMA berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai PDRB Jawa Tengah. Sumbangan parsial dari variabel PMA terhadap PDRB Jawa Tengah ini sebesar 4,2 %.

Berdasarkan hasil empiris tersebut yang menyatakan bahwa PMA berpengaruh secara positif dan signifikan dalam jangka pendek sesuai dengan penelitian oleh Effendi dan Soemantri (2003) yang juga menyatakan bahwa PMA berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi regional di Indonesia tahun 1987-2000.

Dalam jangka pendek, pengaruh PMA terhadap pertumbuhan ekonomi digambarkan melalui beberapa jalur. Pertama, melalui pembangunan pabrik – pabrik baru (PP) yang berarti juga penambahan output atau produk domestik bruto (PDB). Ini adalah suatu dampak langsung. Pertumbuhan  $X$  berarti penambahan cadangan devisa (CD) yang selanjutnya peningkatan kemampuan dari negara penerima untuk membayar utang luar negeri (ULN) dan impor (M). Kedua, masih dari sisi suplai, namun sifatnya tidak langsung, adalah sebagai berikut: adanya PP baru berarti ada penambahan permintaan di dalam negeri terhadap barang-barang modal, barang-barang setengah jadi, bahan baku dan input-input lainnya. Jika permintaan antara ini sepenuhnya dipenuhi oleh sektor-sektor lain (SSL) di dalam negeri (tidak ada yang diimpor), maka dengan sendirinya efek positif dari keberadaan atau kegiatan produksi di pabrik-pabrik baru tersebut sepenuhnya dinikmati oleh sektor-sektor domestik lainnya, jadi output di SSL tersebut mengalami pertumbuhan. Ini berarti telah terjadi suatu efek penggandaan dari keberadaan PMA terhadap output agregat di negara penerima.

Dalam kata lain, semakin besar komponen M dari sebuah proyek PMA, atau semakin besar "kebocoran" dari keterkaitan produksi antara PMA dengan ekonomi domestik, semakin kecil efek penggandaan tersebut. Ketiga, peningkatan kesempatan kerja akibat adanya pabrik-pabrik baru tersebut berdampak positif terhadap ekonomi domestik lewat sisi permintaan: peningkatan kesempatan kerja menambah kemampuan belanja masyarakat dan selanjutnya meningkatkan permintaan di pasar dalam negeri. Sama seperti kasus sebelumnya, jika penambahan permintaan konsumsi tersebut tidak serta merta menambah impor, maka efek positifnya terhadap pertumbuhan output di sektor-sektor domestik sepenuhnya terserap. Sebaliknya, jika ekstra permintaan konsumsi tersebut adalah dalam bentuk peningkatan impor, maka efeknya nihil. Bahkan jika pertumbuhan impor lebih pesat daripada pertumbuhan ekspor yang disebabkan oleh adanya PMA, maka terjadi defisit neraca perdagangan. Ini berarti kehadiran PMA memberi lebih banyak dampak negatif daripada dampak positif terhadap negara tuan rumah.

Keempat, peran PMA sebagai sumber penting peralihan teknologi dan *knowledge* lainnya. Peran ini bisa lewat dua jalur utama. Pertama, lewat pekerja-pekerja lokal yang bekerja di perusahaan-perusahaan PMA. Saat pekerja-pekerja tersebut pindah ke perusahaan-perusahaan domestik, maka mereka membawa pengetahuan atau keahlian baru dari perusahaan PMA ke perusahaan domestik. Kedua, lewat keterkaitan produksi atau *subcontracting* antara PMA dan perusahaan-perusahaan lokal, termasuk usaha kecil dan menengah. Dari uraian

tersebut jelas bahwa PMA merupakan hal yang sangat penting untuk dapat menggerakkan perekonomian suatu negara khususnya bagi Provinsi Jawa Tengah.

- **Hubungan antara Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan PDRB Provinsi Jawa Tengah pada jangka pendek.**

Dari hasil regresi diperoleh hasil bahwa koefisien dari variabel *first difference* PMDN adalah sebesar 0,547945 dan nilainya secara statistik signifikan pada  $\alpha = 5\%$ . Nilai tersebut menunjukkan bahwa dalam jangka pendek hubungan antara PMDN dengan nilai PDRB Jawa Tengah adalah positif dimana setiap kenaikan nilai PMDN sebesar 1%, *ceteris paribus*, akan menyebabkan peningkatan nilai PDRB Jawa Tengah sebesar 54%.

PMDN mempunyai korelasi positif terhadap PDRB Provinsi Jawa Tengah. Menurut Harrod-Domar, dalam mendukung pertumbuhan ekonomi diperlukan investasi-investasi baru sebagai stok modal seperti penanaman modal dalam negeri maupun penanaman modal asing. Hal tersebut sesuai dengan penelitian Jamzani Sodik dan Didi Nuryadin (2005) yang menemukan bahwa penanaman modal dalam negeri berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi regional, sehingga bagaimanapun PMDN sangat diperlukan oleh suatu daerah untuk tumbuh dan berkembang sesuai dengan kemampuan sendiri. Pengaruh PMDN yang positif terhadap pertumbuhan ekonomi pada masa pra krisis ekonomi menunjukkan bahwa kebijakan otonomi daerah mendorong kepercayaan para investor akan adanya peningkatan kualitas pelayanan dan kemudahan dalam pengurusan perijinan berinvestasi.

Adanya krisis ekonomi di tahun 1997 secara umum mempengaruhi PMDN, hal ini terjadi karena para investor dari dalam negeri mengalami kerugian depresiasi nilai rupiah atau nilai US\$ dollar. Selain itu pula disebabkan oleh kondisi sosial politik dan keamanan Indonesia yang belum stabil paska krisis moneter yang melanda Indonesia di tahun tersebut.

- **Hubungan antara Belanja Modal dengan PDRB Provinsi Jawa Tengah pada jangka pendek.**

Dari hasil regresi diperoleh hasil bahwa koefisien dari variabel *first difference* belanja modal adalah sebesar 0,178070. Nilai tersebut menunjukkan bahwa dalam jangka pendek hubungan antara belanja modal dengan nilai PDRB Jawa Tengah adalah positif namun nilainya secara statistik tidak signifikan (pada  $\alpha=5\%$ ) mempengaruhi nilai PDRB Jawa Tengah. Hasil estimasi ini tidak sesuai dengan hipotesis yang menyatakan bahwa belanja modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai PDRB Jawa Tengah. Sumbangan parsial dari variabel belanja modal terhadap PDRB Jawa Tengah ini sebesar 17 %.

Pada belanja modal mengacu pada rencana pembangunan jangka pendek dan jangka panjang, dan kenaikan belanja modal selalu terjadinya setiap tahunnya. Hal ini dikarenakan perubahan perekonomian pada daerah tersebut juga mengalami peningkatan, sedangkan PDRB di daerah bisa kemungkinan tidak mengalami peningkatan atau tetap jika pendapatan per kapita masyarakat di daerah tersebut masih tetap atau tidak mengalami peningkatan. PDRB yang tidak bisa meningkat bisa disebabkan oleh beberapa hal, diantaranya adalah pungutan pajak yang tidak lancar, penurunan

pertumbuhan di berbagai sektor di daerah tersebut, menurunnya lapangan usaha, serta adanya penurunan ekspor dan impor sehingga hal tersebut menyebabkan belanja modal tidak mempengaruhi PDRB Provinsi Jawa Tengah.

#### 4.8 Hasil Regresi *Error Correction Model* ( Jangka Panjang )

Hasil regresi *Error Correction Model* ( Jangka Panjang) meliputi penyajian hasil regresi hubungan antara variabel dependen dengan variabel independen), secara statistik langkah analisis yang dilakukan adalah meliputi variabel-variabel independen secara individu, secara serentak dan asumsi klasik.

Model jangka panjang harus melihat keseimbangan dimana di dalamnya tercakup serangkaian proses penyesuaian yang membawa setiap *shock* kepada *equilibrium*. Dengan kata lain dalam jangka panjang memungkinkan mengadakan penyesuaian penuh untuk setiap perubahan yang timbul.

**Tabel 4.7**  
**Hasil Estimasi Output *Error Correction Model* ( Jangka Panjang)**

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-7.827584	2.804918	-2.790665	0.0095
LPMA	0.772904	0.321327	2.405348	0.0233
LPMDN	0.800628	0.333768	2.398760	0.0236
LBELANJA	0.293179	0.320424	0.914972	0.3683
R-squared	0.811930	Mean dependent var		16.69531
Adjusted R-squared	0.791033	S.D. dependent var		1.501632
S.E. of regression	0.686440	Akaike info criterion		2.205317
Sum squared resid	12.72239	Schwarz criterion		2.390348
Log likelihood	-30.18242	F-statistic		38.85445
Durbin-Watson stat	1.731963	Prob(F-statistic)		0.000000

Sumber : Lampiran D.

#### 4.8.1 Pengujian Statistik

##### 1. Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Hasil estimasi koefisien jangka panjang menunjukkan nilai koefisien determinasi ( $R^2$ ) sebesar 0,811930. Artinya besarnya pengaruh yang diberikan oleh variabel PMA, PMDN dan belanja modal terhadap PDRB tahun 1978-2008 secara bersama-sama adalah sebesar 81,19 %. Sedangkan sisanya sebesar 18,81 % adalah dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

##### 2. Uji t-statistik

Pengujian statistik dilakukan untuk mengetahui tingkat signifikansi variabel bebas terhadap variabel tidak bebasnya secara parsial. Uji ini dilakukan dengan membandingkan nilai t-hitung dengan t-kritis pada tabel. Pada uji statistik secara parsial dengan nilai t kritis (*critical value*) pada  $df = (n-k)$ , dimana n adalah jumlah sampel dan k adalah jumlah variabel independen termasuk konstanta. Untuk menguji koefisien regresi parsial secara individu dari masing-masing variabel bebas akan diuji sebagai berikut :

##### a. Pengaruh realisasi Penanaman Modal Asing (PMA) terhadap PDRB Jawa Tengah.

Hipotesis yang diajukan adalah :

Hipotesis 1 : PMA berpengaruh positif dan signifikan terhadap PDRB Jawa Tengah.

$H_0 : \beta_1 = 0$  Tidak ada pengaruh positif dan signifikan dari PMA terhadap PDRB Jawa Tengah.

$H_a : \beta_1 > 0$  Ada pengaruh positif dan signifikan dari PMA terhadap PDRB Jawa Tengah.

Dari hasil regresi diperoleh nilai t hitung untuk realisasi nilai Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) sebesar 2,405 dan pada t tabel dengan  $\alpha = 5 \%$ ,  $df = 27$  diperoleh 1,703 . Terlihat bahwa t hitung lebih besar dari t kritis, maka  $H_0$  ditolak yang berarti bahwa realisasi nilai Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) berpengaruh positif dan signifikan terhadap PDRB di Provinsi Jawa Tengah.

Berdasarkan probabilitasnya, maka jika probabilitas lebih besar dari 0,05 maka  $H_0$  diterima dan jika probabilitas lebih kecil dari 0,05 maka  $H_0$  ditolak. Dari hasil perhitungan diketahui *sig.* atau *significance* adalah 0,0233 atau probabilitas di bawah 0,05, maka  $H_0$  ditolak artinya bahwa realisasi nilai Penanaman Modal Asing (PMA) berpengaruh secara signifikan terhadap PDRB di provinsi Jawa Tengah.

**b. Pengaruh realisasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) terhadap PDRB Jawa Tengah.**

Hipotesis yang diajukan adalah :

Hipotesis 2 : PMDN berpengaruh positif dan signifikan terhadap PDRB Jawa Tengah.

$H_0 : \beta_2 = 0$  Tidak ada pengaruh positif dan signifikan dari PMDN terhadap PDRB Jawa Tengah.

$H_a : \beta_2 > 0$  Ada pengaruh positif dan signifikan dari PMDN terhadap PDRB Jawa Tengah.

Dari hasil regresi diperoleh nilai t hitung untuk realisasi nilai Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) sebesar 2,398 dan pada t tabel dengan  $\alpha = 5 \%$ ,  $df = 27$  diperoleh 1,703 . Terlihat bahwa t hitung lebih besar dari t kritis, maka  $H_0$  ditolak yang berarti bahwa realisasi nilai Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) berpengaruh positif dan signifikan terhadap PDRB di Provinsi Jawa Tengah.

Berdasarkan probabilitasnya, maka jika probabilitas lebih besar dari 0,05 maka  $H_0$  diterima dan jika probabilitas lebih kecil dari 0,05 maka  $H_0$  ditolak. Dari hasil perhitungan diketahui *sig.* atau *significance* adalah 0,0236 atau probabilitas di bawah 0,05, maka  $H_0$  ditolak artinya bahwa realisasi nilai Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) berpengaruh secara signifikan terhadap PDRB di provinsi Jawa Tengah.

**c. Pengaruh realisasi belanja modal terhadap PDRB Jawa Tengah.**

Hipotesis yang diajukan adalah :

Hipotesis 3 : Belanja modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap PDRB Jawa Tengah.

$H_0 : \beta_3 = 0$  Tidak ada pengaruh positif dan signifikan dari belanja modal terhadap PDRB Jawa Tengah.

$H_a : \beta_3 > 0$  Ada pengaruh positif dan signifikan dari belanja modal terhadap PDRB Jawa Tengah.

Dari hasil regresi diperoleh nilai t hitung untuk realisasi nilai belanja modal sebesar 0,915 dan pada t tabel dengan  $\alpha = 5 \%$ ,  $df = 27$  diperoleh 1,703 . Terlihat bahwa t hitung lebih kecil dari t kritis, berarti bahwa realisasi nilai belanja modal tidak berpengaruh secara signifikan terhadap terhadap PDRB di Provinsi Jawa Tengah.

Berdasarkan probabilitasnya, maka jika probabilitas lebih besar dari 0,05 maka  $H_0$  diterima dan jika probabilitas lebih kecil dari 0,05 maka  $H_0$  ditolak. Dari hasil perhitungan diketahui *sig.* atau *significance* adalah 0,3683 atau probabilitas jauh di atas 0,05, maka  $H_0$  diterima artinya bahwa realisasi nilai belanja modal tidak berpengaruh secara signifikan terhadap PDRB di provinsi Jawa Tengah.

### 3. Uji F-statistik

Uji F-statistik untuk mengukur *godness of fit* dari persamaan regresi, yaitu pengaruh variabel bebas secara bersama-sama terhadap pergerakan variabel tidak bebasnya. Dengan demikian berlaku pengujian sebagai berikut :

- $H_0$  diterima jika  $F\text{-stat} < F\text{-tabel}$
- $H_0$  ditolak jika  $F\text{-stat} > F\text{-tabel}$

Dengan demikian hasil uji F yang signifikan akan menunjukkan bahwa variabel bebas secara bersama-sama memiliki pengaruh terhadap variabel tidak bebasnya. Uji F-stat ini merupakan uji signifikansi satu arah (*one tail significance*).

Berdasarkan hasil uji F-statistik, diperoleh nilai F hitung sebesar 38,85445 dengan sig F = 0,000. Oleh karena nilai F hitung > F tabel maka dapat disimpulkan bahwa  $H_0$  ditolak atau dengan kata lain bahwa PMA, PMDN dan belanja modal secara simultan berpengaruh signifikan terhadap PDRB di Jawa Tengah.

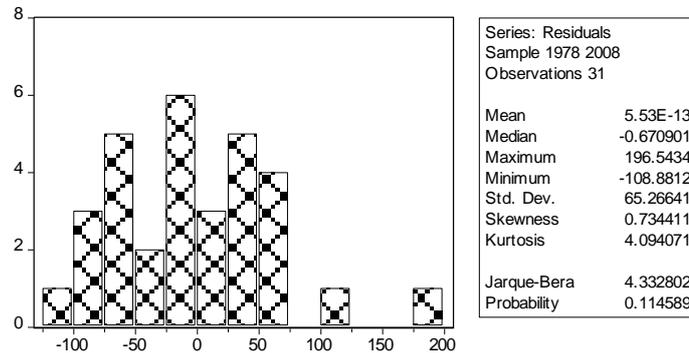
#### **4.8.2 Hasil Uji Asumsi Klasik**

Hasil uji asumsi klasik terdiri dari normalitas, multikolonieritas, autokorelasi dan heteroskedastisitas. Penjelasan dari hasil normalitas, multikolonieritas, autokorelasi dan heteroskedastisitas adalah sebagai berikut :

##### **1. Uji Normalitas**

Uji normalitas dilakukan untuk memeriksa apakah *error term* mendekati distribusi normal. Hal ini dapat dilihat dari nilai *probability Jarque-Bera* yang lebih besar dari taraf nyata 5%. Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa *error term* terdistribusi secara normal dengan nilai *probability Jarque-Bera* sebesar 0,114.

**Gambar 4.5**  
**Uji Normalitas**



Sumber : Lampiran E.

## 2. Uji Multikolinieritas

Multikolinieritas adalah tidak adanya hubungan linear antar variabel independen dalam suatu model regresi. Suatu model regresi dikatakan terkena multikolinieritas bila terjadi hubungan linear yang sempurna atau pasti di antara beberapa atau semua variabel bebas dari suatu model regresi. Akibatnya akan kesulitan untuk dapat melihat pengaruh variabel independen terhadap variabel dependennya.

Berdasarkan hasil auxiliary regressions, dapat disimpulkan bahwa nilai koefisien determinasi parsial ( $r^2$ ) lebih kecil dari nilai koefisien determinasi majemuk ( $R^2$ ), sehingga disimpulkan bahwa pada model ini tidak terdapat multikolinieritas.

## 3. Uji Autokorelasi

Untuk menguji ada atau tidaknya kesalahan pengganggu pada periode tertentu dengan kesalahan pada periode sebelumnya dalam model regresi. Pengambilan keputusan ada tidaknya autokorelasi adalah dengan cara membandingkan nilai Durbin Watson (Dw) dengan nilai  $d_l$  dan  $d_u$  pada tabel Durbin Watson. Hasil penghitungan diperoleh nilai Dw

diketahui sebesar 1,731. Tabel Dw dengan tingkat signifikansi 5% dimana  $n = 31$  dan  $k$  (variabel) = 3 diperoleh nilai  $du = 1,65$  dan nilai  $4-du$  sebesar  $= 2,35$ . Ini berarti  $H_0$  diterima atau  $H_a$  ditolak. Asumsi autokorelasi terpenuhi.

#### 4. Uji Heteroskedastisitas

Pengujian heteroskedastisitas bertujuan untuk melihat apakah variabel pengganggu memiliki varians yang sama (homoskedastisitas). Hal ini dapat diketahui melalui *white heteroscedasticity*, dimana nilai *probability obs\*R-Squared* pada model persamaan harus lebih besar dari taraf nyata yang digunakan. Model persamaan ini memiliki nilai *probability obs\*R-Squared* sebesar 0,6688, yang artinya bernilai lebih besar dari taraf nyata  $\alpha = 0,05$ . Dapat diartikan bahwa model persamaan yang digunakan dalam penelitian ini tidak memiliki masalah heteroskedastisitas.

**Tabel 4.8**  
**Uji Heteroskedastisitas**

White Heteroskedasticity Test:			
F-statistic	0.642781	Probability	0.748689
Obs*R-squared	6.695376	Probability	0.668801

Sumber : Lampiran E.

#### 4.9 Interpretasi Hasil

Hasil estimasi ECM jangka panjang adalah sebagai berikut :

$$\text{LPDRB} = -7,827 + 0,773\text{LPMA} + 0,801\text{LPMDN} + 0,293\text{BM}$$

- **Hubungan antara Penanaman Modal Asing (PMA) dengan PDRB di Jawa Tengah pada jangka panjang.**

Dari hasil regresi diperoleh hasil bahwa koefisien dari variabel PMA adalah sebesar 0,772904 dan nilainya secara statistik signifikan pada  $\alpha = 5\%$ . Hal ini memberi arti bahwa dalam jangka panjang apabila variabel penanaman modal asing mengalami peningkatan sebesar 1%, *ceteris paribus*, maka akan meningkatkan PDRB di Jawa Tengah sebesar 77%. PMA mempunyai korelasi positif dengan nilai statistik signifikan terhadap PDRB di Jawa Tengah. Hal tersebut sesuai dengan penelitian Subekti (2004) yang menunjukkan bahwa PMA secara umum mempunyai hubungan yang positif dan kuat terhadap PDB di Indonesia.

Untuk lebih menunjang perekonomian, penanaman modal oleh masyarakat perlu digalakkan. Selain Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), Penanaman Modal Asing (PMA) masih diperlukan untuk mendukung pembangunan di berbagai kegiatan yang belum mampu sepenuhnya dilaksanakan dengan PMDN, terutama yang menghasilkan barang modal, bahan baku dan komponen sebagai substitusi impor, barang jadi dan barang setengah jadi guna menciptakan kesempatan usaha dan lapangan kerja. Investasi khususnya penanaman modal jangka panjang (PMA) merupakan sumber utama pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Terutama sektor-sektor ekonomi yang secara potensial bisa sangat produktif dan bisa diandalkan sebagai sumber devisa.

PMA sebagai salah satu sumber penggerak pembangunan ekonomi tidak lepas dari peran serta pemerintah. Selama masa Orde Baru, pertumbuhan arus masuk PMA ke Indonesia memang sangat pesat, terutama pada periode 80-an dan bahkan mengalami akselerasi sejak tahun 1994. Tidak bisa dipungkiri bahwa pertumbuhan investasi dan PMA pada khususnya di Indonesia selama era Soeharto tersebut didorong oleh stabilitas politik dan sosial, kepastian hukum, dan kebijakan ekonomi yang kondusif terhadap kegiatan bisnis di dalam negeri, yang semua ini sejak krisis ekonomi 1997 hingga saat ini sulit sekali tercapai sepenuhnya. Oleh karena itu, perkembangan sektor industri manufaktur yang pesat yang mendorong terjadinya perubahan ekonomi secara struktural dari sebuah ekonomi berbasis pertanian ke sebuah ekonomi berbasis industri selama era Orde Baru tidak lepas dari peran PMA.

Sejak krisis 1997 hingga sekarang pertumbuhan arus masuk PMA ke Indonesia masih relatif lambat jika dibandingkan dengan negara-negara tetangga yang juga terkena krisis yang sama seperti Thailand, Korea Selatan dan Filipina. Bahkan hingga tahun 2001 arus masuk net PMA ke Indonesia negatif dalam jumlah dollar yang tidak kecil, dan setelah itu kembali positif terkecuali tahun 2003. Arus masuk net negatif itu disebabkan banyak PMA yang menarik diri atau pindah lokasi ke negara-negara tetangga.

Hasil survei tahunan terhadap perusahaan-perusahaan *Report 2007-2008* memperlihatkan permasalahan-permasalahan utama yang dihadapi pengusaha-pengusaha di Indonesia, diantaranya yaitu infrastruktur yang buruk

(dalam arti kuantitas terbatas dan kualitas buruk), birokrasi pemerintah yang tidak efisien, serta keterbatasan akses keuangan. Buruknya infrastruktur dengan sendirinya meningkatkan biaya produksi yang pada akhirnya menurunkan daya saing harga dengan konsumwensi ekspor menurun. Konsumwensi lainnya adalah menurunnya niat investor asing (atau PMA) untuk membuka usaha di dalam negeri, dan ini pasti akan berdampak negatif terhadap produksi dan ekspor di dalam negeri. Ketiga adalah masalah birokrasi yang tercerminkan oleh antara lain prosedur administrasi dalam mengurus investasi (seperti perizinan, peraturan atau persyaratan, dan lainnya) yang berbelit-belit dan langkah-langkah prosedurnya yang tidak jelas. Ini juga merupakan masalah klasik yang membuat investor enggan melakukan investasi di Indonesia. Hal ini tercermin pula pada masalah koordinasi antara pemerintah daerah. Banyak peraturan pemerintah atau keputusan presiden tidak bisa berjalan efektif karena adanya tarik-menarik kepentingan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang semuanya merasa paling berkepentingan atas penanaman modal di daerah. Dalam kebijakan otonomi daerah, pemerintah daerah, baik di tingkat propinsi, kabupaten dan kota diberikan kewenangan dalam bidang penanaman modal. Namun, sejak pelaksanaan otonomi daerah, pemerintah pusat terpaksa mengeluarkan kepres khusus mengenai penanaman modal karena banyaknya kendala yang dihadapi oleh para investor yang ingin membuka usaha di daerah, khususnya yang berkaitan dengan proses pengurusan izin usaha. Investor seringkali dibebani

oleh urusan birokrasi yang berbelit-belit sehingga membutuhkan waktu yang cukup lama dan disertai dengan biaya tambahan yang cukup besar.

- **Hubungan antara Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan PDRB di Jawa Tengah pada jangka panjang.**

Dari hasil regresi diperoleh hasil bahwa koefisien dari variabel PMDN adalah sebesar 0,800628 dan nilainya secara statistik signifikan pada  $\alpha = 5\%$ . Nilai tersebut menunjukkan bahwa dalam jangka panjang hubungan antara PMDN dengan PDRB Jawa Tengah adalah positif dimana setiap kenaikan nilai PMDN sebesar 1%, *ceteris paribus*, akan menyebabkan peningkatan nilai PDRB Jawa Tengah sebesar 80%.

Menurut Basuki (1997), terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan dalam menarik para investor. Pertama, para investor biasanya sangat peka terhadap lingkungan sosial, politik, hukum, dan sistem birokrasi suatu daerah. Oleh sebab itu, iklim investasi harus dibangun sekondusif mungkin. Kedua yaitu kebijakan pemerintah. Jika pemerintah dan kebijakannya tidak ramah terhadap investasi, menyebabkan sangat sulit aliran investasi masuk ke dalam perekonomian, karena para investor selalu memantau peran suatu pemerintah dalam sistem ekonomi. Ketiga, yaitu lembaga pelayanan yang bertanggung jawab serta berwenang langsung terhadap investasi, sangat perlu melakukan program proaktif dalam mempromosikan keunggulan daerahnya sehingga terjadi peningkatan daya tarik investasi. Keempat, merupakan hal terpenting yaitu peran pemerintah daerah secara aktif dan maksimal. Pemerintah daerah harus bersaing secara baik untuk meraih investasi domestik. Selanjutnya

pemerintah daerah khususnya di Provinsi Jawa Tengah menjadi motor untuk membangun iklim tersebut melalui kebijakan atraktif dan inovatif untuk investasi. Selain itu pemerintah Provinsi Jawa Tengah secara gencar mempromosikan keunggulan wilayahnya kepada investor.

- **Hubungan antara Belanja Modal dengan PDRB di Jawa Tengah pada jangka panjang.**

Dari hasil regresi diperoleh hasil bahwa koefisien dari variabel belanja modal adalah sebesar 0,293179 namun nilainya secara statistik tidak signifikan (pada  $\alpha = 5\%$ ) terhadap PDRB Jawa Tengah. Hasil estimasi ini tidak sesuai dengan hipotesis yang menunjukkan bahwa belanja modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap PDRB Jawa Tengah. Nilai tersebut menunjukkan bahwa dalam jangka panjang hubungan antara belanja modal dengan nilai PDRB Jawa Tengah adalah positif namun tidak signifikan dimana setiap kenaikan nilai belanja modal sebesar 1%, *ceteris paribus*, akan menyebabkan peningkatan nilai PDRB Jawa Tengah sebesar 29%.

Pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia yang didasari UU Nomer 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, sejak tahun 2001 berimplikasi pada perubahan dalam sistem pembuatan keputusan terkait dengan pengalokasian sumberdaya dalam anggaran pemerintah daerah. Dalam konteks pengelolaan keuangan daerah, pengalokasian belanja modal sangat berkaitan dengan perencanaan keuangan jangka panjang, terutama pembiayaan untuk pemeliharaan aset tetap yang dihasilkan dari belanja modal tersebut. Konsep *multi-term expenditure framework* (MTEF) menyatakan bahwa kebijakan

belanja modal harus memperhatikan kemanfaatan (*usefulness*) dan kemampuan keuangan pemerintah daerah (*budget capability*) dalam pengelolaan aset tersebut dalam jangka panjang (Allen dan Tommasi, 2001). Hal ini berarti bahwa pengelolaan aset terkait dengan belanja pemeliharaan, dan sumber pendapatan atau lebih luas sumber pendanaan. Aset tetap yang dimiliki sebagai akibat adanya belanja modal merupakan prasyarat utama dalam memberikan pelayanan publik oleh pemerintah daerah. Untuk menambah aset tetap, pemerintah daerah mengalokasikan dana dalam bentuk anggaran belanja modal dalam APBD. Alokasi belanja modal ini didasarkan pada kebutuhan daerah akan sarana dan prasarana, baik untuk kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan maupun untuk fasilitas publik. Biasanya setiap tahun diadakan pengadaan aset tetap oleh pemerintahan daerah, sesuai dengan prioritas anggaran dan pelayanan publik yang memberikan dampak jangka panjang secara finansial.

Belanja modal dimaksudkan untuk mendapatkan aset tetap pemerintah daerah, yakni peralatan, bangunan, infrastruktur, dan harta tetap lainnya. Secara teoretis ada tiga cara untuk memperoleh aset tetap tersebut, yakni dengan membangun sendiri, menukarkan dengan aset tetap lain, dan membeli. Namun, untuk kasus di pemerintahan, biasanya cara yang dilakukan adalah dengan cara membeli. Proses pembelian yang dilakukan umumnya dilakukan melalui sebuah proses lelang atau tender yang cukup rumit.

Belanja modal tidak berpengaruh secara signifikan terhadap peningkatan PDRB Provinsi Jawa Tengah bisa kemungkinan karena belanja

modal yang digunakan untuk pembangunan sarana infrastruktur (misal : jalan) hanya dilakukan sekali dan berikutnya adalah pengeluaran untuk biaya pemeliharaan yang sifatnya mempertahankan atau menambah masa manfaat, meningkatkan kapasitas dan kualitas aset. Semakin besar nilai belanja modal, maka semakin besar pula peran pemerintah di dalam melaksanakan pembangunan. Begitu juga sebaliknya. Dengan anggapan bahwa besarnya peranan tersebut mencerminkan pemerintah ikut berperan aktif di dalam menyediakan fasilitas pendukung, maka akan berpengaruh secara positif terhadap besar kecilnya investasi di Provinsi Jawa Tengah.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Penelitian ini dimaksudkan untuk mengkaji pengaruh variabel penanaman modal asing, penanaman modal dalam negeri dan belanja modal terhadap PDRB Provinsi Jawa Tengah tahun 1978-2008. Berdasarkan hasil analisis data yang telah dilakukan pada bab IV, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Model regresi ECM pengaruh penanaman modal asing, penanaman modal dalam negeri dan belanja modal terhadap PDRB Provinsi Jawa Tengah tahun 1978-2008 cukup layak digunakan karena telah memenuhi dan melewati uji asumsi klasik, yaitu uji multikolinieritas, uji heteroskedastisitas, uji autokorelasi, dan uji normalitas.
2. Hasil uji koefisien determinasi ( $R^2$ ) ECM dalam jangka pendek penanaman modal asing, penanaman modal dalam negeri dan belanja modal terhadap PDRB Provinsi Jawa Tengah tahun 1978-2008 menunjukkan bahwa besarnya nilai  $R^2$  cukup tinggi yaitu 0,793. Nilai ini berarti bahwa model yang dibentuk cukup baik dimana 79,3 persen variasi variabel dependen PDRB Provinsi Jawa Tengah dapat dijelaskan dengan baik oleh ketiga variabel independen yakni penanaman modal asing, penanaman modal dalam negeri dan belanja modal. Sedangkan 20,7 persen sisanya dijelaskan oleh faktor-faktor diluar model. Diperlukan penelitian

yang lebih lanjut untuk menganalisis variabel-variabel lain yang mempengaruhi PDRB Provinsi Jawa Tengah.

3. Dalam jangka panjang, hasil uji koefisien determinasi ( $R^2$ ) penanaman modal asing, penanaman modal dalam negeri dan belanja modal terhadap PDRB Provinsi Jawa Tengah tahun 1978-2008 menunjukkan bahwa besarnya nilai  $R^2$  cukup tinggi yaitu 0,811. Nilai ini berarti bahwa model yang dibentuk cukup baik dimana 81,1 persen variasi variabel dependen PDRB Provinsi Jawa Tengah dapat dijelaskan dengan baik oleh ketiga variabel independen yakni penanaman modal asing, penanaman modal dalam negeri dan belanja modal. Sedangkan 18,9 persen sisanya dijelaskan oleh faktor-faktor diluar model. Diperlukan penelitian yang lebih lanjut untuk menganalisis variabel-variabel lain yang mempengaruhi PDRB Provinsi Jawa Tengah.
4. Hasil regresi ECM dalam jangka pendek, variabel PMA mempunyai pengaruh mempunyai pengaruh positif dan signifikan mempengaruhi nilai PDRB Provinsi Jawa Tengah. Yang mana memiliki nilai koefisien  $\beta$  sebesar 0,042 yang artinya, apabila PMA dinaikkan sebesar 1 satuan, maka nilai PDRB Provinsi Jawa Tengah akan meningkat sebesar 0,042 satuan.
5. Hasil regresi ECM dalam jangka pendek, variabel PMDN mempunyai pengaruh positif dan signifikan mempengaruhi PDRB Provinsi Jawa Tengah. Yang mana memiliki nilai koefisien  $\beta$  sebesar 0,547 yang artinya, apabila PMDN dinaikkan sebesar 1 satuan, maka PDRB Provinsi Jawa Tengah akan meningkat sebesar 0,547 satuan.

6. Hasil regresi ECM dalam jangka pendek, variabel belanja modal mempunyai pengaruh positif namun tidak signifikan mempengaruhi nilai PDRB Provinsi Jawa Tengah. Yang mana memiliki nilai koefisien  $\beta$  sebesar 0,178 yang artinya, apabila belanja modal dinaikkan sebesar 1 satuan, maka PDRB Provinsi Jawa Tengah akan meningkat sebesar 0,178 satuan.
7. Hasil regresi ECM dalam jangka panjang, variabel PMA mempunyai pengaruh positif dan signifikan mempengaruhi PDRB Provinsi Jawa Tengah. Yang mana memiliki nilai koefisien  $\beta$  sebesar 0,772 yang artinya, apabila PMA dinaikkan sebesar 1 satuan, maka PDRB Provinsi Jawa Tengah akan meningkat sebesar 0,772 satuan.
8. Hasil regresi ECM dalam jangka panjang, variabel PMDN mempunyai pengaruh positif dan signifikan mempengaruhi PDRB Provinsi Jawa Tengah. Yang mana memiliki nilai koefisien  $\beta$  sebesar 0,800 yang artinya, apabila PMDN dinaikkan sebesar 1 satuan, maka PDRB Provinsi Jawa Tengah akan meningkat sebesar 0,800 satuan.
9. Hasil regresi ECM dalam jangka panjang, variabel belanja modal mempunyai pengaruh positif namun tidak signifikan mempengaruhi PDRB Provinsi Jawa Tengah. Yang mana memiliki nilai koefisien  $\beta$  sebesar 0,293 yang artinya, apabila belanja modal dinaikkan sebesar 1 satuan, maka PDRB Provinsi Jawa Tengah akan meningkat sebesar 0,293 satuan.

10. Koefisien variabel *error-correction term* ( $ECT_{t-1}$ ) secara statistik signifikan pada  $\alpha = 10\%$  dan mempunyai tanda negatif. Koefisien variabel  $ECT_{t-1}$  yang negatif berarti model tersebut dalam jangka pendek berada di bawah keseimbangan jangka panjangnya, sehingga proses penyesuaian keseimbangan jangka pendek menuju ke keseimbangan jangka panjang arahnya bergerak ke atas.

11. Berdasarkan uji F regresi ECM dalam jangka pendek diketahui bahwa F-hitung sebesar  $(24,075) > F\text{-tabel} (2,95)$ , sehingga inferensi yang diambil adalah menerima  $H_a$  dan menolak  $H_o$ . Dengan kata lain, hipotesis yang berbunyi "Ada pengaruh antara variabel penanaman modal asing, penanaman modal dalam negeri dan belanja modal terhadap PDRB Provinsi Jawa Tengah", diterima pada  $\alpha = 5\%$ .

12. Berdasarkan uji F regresi ECM dalam jangka panjang diketahui bahwa F-hitung sebesar  $(38,854) > F\text{-tabel} (2,95)$ , sehingga inferensi yang diambil adalah menerima  $H_a$  dan menolak  $H_o$ . Dengan kata lain, hipotesis yang berbunyi "Ada pengaruh antara variabel penanaman modal asing, penanaman modal dalam negeri dan belanja modal terhadap PDRB Provinsi Jawa Tengah", diterima pada  $\alpha = 5\%$ .

## 5.2 Keterbatasan

Kelemahan dan kekurangan yang ditemukan setelah analisis dan interpretasi dalam penelitian ini adalah adanya variabel belanja modal yang tidak signifikan dalam mempengaruhi PDRB Provinsi Jawa Tengah. Jadi,

variabel belanja modal dalam penelitian ini tidak dapat menjelaskan pengaruhnya terhadap PDRB Provinsi Jawa Tengah.

### **5.3 Saran**

Berdasarkan hasil penelitian diajukan saran sebagai berikut:

1. Penanaman modal asing memiliki pengaruh positif dan signifikan baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang terhadap PDRB Provinsi Jawa Tengah, sehingga diharapkan pemerintah daerah hendaknya menciptakan iklim investasi yang kondusif melalui optimalisasi pelayanan satu atap dengan kemudahan perijinan yaitu dengan cepatnya proses mendapatkan ijin dengan kepaastian biaya, penghapusan peraturan daerah yang tidak pro bisnis, serta perbaikan dan peningkatan infrastruktur yang baik guna mendukung investasi yang ada. Di samping itu penanaman modal asing mempunyai potensi untuk memberikan kontribusi yang nyata bagi pertumbuhan ekonomi tidak hanya melalui transfer dana, tetapi juga melalui transfer teknologi dan perbaikan pengetahuan manajemen, misalnya dengan pengembangan kualitas dan produktivitas sumber daya manusia, mendukung teknologi yang diterapkan, sehingga rencana alih teknologi dapat terlaksana dengan baik.
2. Penanaman modal dalam negeri mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap PDRB Provinsi Jawa Tengah baik dalam jangka pendek maupun dalam jangka panjang sehingga pemerintah daerah hendaknya mengidentifikasi sektor-sektor ekonomi unggulan ataupun

sektor-sektor ekonomi yang produktif di wilayahnya berdasarkan kekhasan wilayah masing-masing yaitu karakteristik letak geografis, sumber daya alam, maupun sumber daya manusia yang ada agar menarik investor dalam negeri untuk menginvestasikan modal yang dimiliki untuk meningkatkan sektor tersebut sehingga dapat meningkatkan pendapatan daerah.

3. Belanja modal mempunyai pengaruh yang positif namun tidak signifikan terhadap PDRB Provinsi Jawa Tengah baik dalam jangka pendek maupun dalam jangka panjang. Belanja modal tidak berpengaruh secara signifikan terhadap peningkatan PDRB Provinsi Jawa Tengah bisa kemungkinan karena belanja modal yang digunakan untuk pembangunan sarana infrastruktur (misal : jalan) hanya dilakukan sekali dan berikutnya adalah pengeluaran untuk biaya pemeliharaan yang sifatnya mempertahankan atau menambah masa manfaat, meningkatkan kapasitas dan kualitas aset. Semakin besar nilai belanja modal, maka semakin besar pula peran pemerintah di dalam melaksanakan pembangunan. Begitu juga sebaliknya. Dengan anggapan bahwa besarnya peranan tersebut mencerminkan pemerintah ikut berperan aktif di dalam menyediakan fasilitas pendukung, maka akan berpengaruh secara positif terhadap besar kecilnya investasi di Provinsi Jawa Tengah.
4. Perlu penelitian-penelitian lanjutan untuk mengetahui beberapa variabel yang di duga mempunyai pengaruh ( signifikan ) di luar variabel – variabel yang di teliti dalam penelitian ini.

## DAFTAR PUSTAKA

- \_\_\_\_\_. Berbagai tahun. **Pendapatan Regional Jawa Tengah**. Semarang.
- \_\_\_\_\_. Berbagai tahun. **Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah**. Semarang.
- \_\_\_\_\_. Berbagai tahun. **Statistik Keuangan Pemerintah Daerah Propinsi**. Jakarta.
- Abdul Halim. 2002. **Akuntansi Sektor Publik : Akuntansi Keuangan Daerah**. Jakarta : Salemba Empat.
- Alex Emyll. 2005. **Strategi Pembangunan Ekonomi Jawa Tengah**. Semarang : Suara Merdeka.
- Algifari. 2001. **Analisis Regresi : Teori, Kasus dan Solusi**. Edisi 2. Yogyakarta : BPFE.
- Arif Yunarko. 2007. Analisis Tingkat Investasi, PAD dan Tenaga Kerja Terhadap PDRB Jawa Tengah. **Skripsi**. Semarang : FE Universitas Negeri Semarang.
- Arshad, Lincoln. 1999. **Ekonomi Pembangunan Edisi ke Empat**. Yogyakarta : Penerbit Bagian Penerbitan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN.
- Badan Pusat Statistik. Berbagai tahun. **Jawa Tengah dalam Angka**. Semarang.
- Bank Indonesia. **Laporan Tahunan**. Berbagai Edisi.
- Boediono. 1999. **Teori Pertumbuhan Ekonomi: Seri Sinopsis Pengantar Ilmu Ekonomi No. 4**. Yogyakarta: BPFE UGM.

- Dadang Firmansyah. 2008. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Investasi di Indonesia Tahun 1985-2004. **Skripsi**. Yogyakarta : FE UII.
- Data Perkembangan Nilai Investasi di Propinsi Jawa Tengah Tahun 1978-2008. 2008. Badan Penanaman Modal Daerah Propinsi Jawa Tengah. Semarang.
- Dumairy. 1996. **Perekonomian Indonesia**. Jakarta : Penerbit Erlangga.
- Firmansyah. 2009. Modul Praktek Regresi Data Panel dengan Eview 6. **Modul disajikan dalam Sei 13 Pelatihan LSKE FE Universitas Diponegoro**. Semarang 13 Mei 2009.
- Gujarati, Damodar N. 1999. **Basic Econometric**. Mc Graw - Hill Book. USA.
- Haryo Kuncoro. 2007. Kausalitas antara Penerimaan, Belanja, dan PDRB pada Kota dan Kabupaten di Indonesia. **Jurnal Ekonomi Pembangunan**. Vol. 12 (3), Desember: 195-211.
- Hendra Esmara. 1991. **Teori Ekonomi Makro dan Kebijakan Pembangunan**. Jakarta : Penerbit Gramedia.
- Imam Ghozali. 2001. **Aplikasi Analisis Multifariat dengan Program SPSS**. Semarang : Badan Penerbit UNDIP.
- Imam Ghozali. 2009. **Analisis Multivariate Lanjutan Dengan Program SPSS**. Semarang : Badan Penerbit UNDIP.
- J. Supranto. 2001. **Statistik : Teori dan Aplikasi**. Jakarta : PT. Erlangga.
- J.P Saragih. 2003. **Desentralisasi Fiskal dan Keuangan Daerah dalam Otonomi**. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Jamzani Sodik dan Didi Nuryadin. 2005. Investasi dan Pertumbuhan Ekonomi Regional : Studi Kasus pada 26 Propinsi di Indonesia Pra dan Pasca Otonomi. **Jurnal Ekonomi Pembangunan**. Vol. 10, No. 2, Agustus : 157-170.

Jamzani Sodik dan Didi Nuryadin. 2008. Determinan Investasi Di Daerah : Studi Kasus Proponi Di Indonesia. **Jurnal Ekonomi Pembangunan**. Vol 13 No.1, April 2008 Hal : 15-31.

Jhingan, M.L 2003. **Ekonomi Pembangunan**. Jakarta : PT. Erlangga.

Laporan Biro Keuangan Setda Provinsi Jawa Tengah. Berbagai Tahun. Semarang.

M. Nazir. 1999. **Metodologi Penelitian**. Jakarta : Ghalia Indonesia.

Mankiw, N. Gregory, 2003. **Teori Makro Ekonomi**. Edisi keempat. Jakarta: PT. Erlangga.

Mudrajad Kuncoro dan Anggi Rahajeng. 2005. Daya Tarik Investasi dan Pungli di DIY. **Jurnal Ekonomi Pembangunan**. Vol. 10, No. 2, Agustus : 157-170.

Mudrajad Kuncoro. 1997. **Ekonomi Pembangunan, Teori, Masalah, dan Kebijakan**. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.

Musleh Jawas. 2008. Pengaruh Penanaman Modal Asing Dan Ekspor Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Negara-Negara Muslim. **Skripsi (Diterbitkan)**. Yogyakarta : FE UII. Diambil pada tanggal 20 Oktober 2009 dari <http://lib.uui.ac.id/>.

Nachrowi D. dan Hardius Usman. 2006. **Pendekatan Populer dan Praktis Ekonometrika untuk Analisis Ekonomi dan Keuangan**. Jakarta: Lembaga Penerbitan FEUI .

Neli Nur Laili. 2007. Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi DIY Tahun 1990-2004. **Skripsi (Diterbitkan)**. Yogyakarta : FE UII. Diambil pada tanggal 20 Oktober 2009 dari <http://lib.uui.ac.id/>.

Ni Putu Wiwin, Putu Ayu Pramitha Purwanti, Luh Gede Meydianawathi, dan Anak Agung Bagus Putu Widanta.2008. Determinan Investasi di Indonesia. **Buletin Studi Ekonomi**. Volume 13 Nomor 2 Tahun 2008.

Nugroho Satrio. 2002. Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Perkembangan PMA dan PMDN di Jawa Tengah Periode 1986-2000. **Skripsi (Tidak Diterbitkan)**. Semarang : FE Undip.

Prabowo Supranto. 2004. Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi Tahun 1986-2002. **Skripsi (Diterbitkan)**. Yogyakarta : FE UII. Diambil pada tanggal 20 Oktober 2009 dari <http://lib.uui.ac.id/>.

Priyo Hari Adi dan David Harianto. 2007. Hubungan antara Dana Alokasi Umum, Belanja Modal, Pendapatan Asli Daerah, dan Pendapatan per Kapita. **ASPP 15**.

Priyo Hari Adi dan Fhino Andrea Christy. 2009. Hubungan Antara DAU, Belanja Modal dan Kualitas Pembangunan Manusia. **The 3rd National Conference UKWMS**. Surabaya 10 Oktober 2009.

Priyo Hari Adi. 2006. Hubungan antara Pertumbuhan Ekonomi, Belanja Pembangunan, dan Pendapatan Asli Daerah: Studi pada Kota dan Kabupaten se Jawa Bali. **Simposium Nasional Akuntansi 9 Padang**.

Ronald Hariyanto. 2005. Analisis Pengeluaran Pemerintah Daerah Di Propinsi Jawa Tengah Periode Tahun Anggaran 200-2002. **Skripsi (Diterbitkan)**. Yogyakarta : FE UII. Diambil pada tanggal 20 Oktober 2009 dari <http://lib.uui.ac.id/>.

Sadono Sukirno. 2000. Makroekonomi. **Teori Pengantar. Edisi Ketiga**. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Suahasil Nazara. 1997. **Pertumbuhan Ekonomi Regional Indonesia**. Prisma No.8. Jakarta : LP3ES

Subekti. 2004. Analisis Peran dan Dampak Utang Luar Negeri Pemerintah, PMA, PMDN, dan Tabungan Pemerintah terhadap PDB Indonesia. **Skripsi (Tidak dipublikasikan)**. Fakultas Ekonomi, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

- Suparmoko. 2002. **Pengantar Ekonomi Makro: Teori, Soal dan Penyelesaiannya**. Yogyakarta : UPP AMP YKPN.
- Suryawati. 2000. Peranan Investasi Asing Langsung terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Negara-negara Asia Timur. **Jurnal Ekonomi Pembangunan**. Vol. 5 : 101-113.
- Syaiful. 2008. **Pengertian dan Perlakuan Akuntansi Belanja Barang dan Belanja Modal dalam Kaidah Akuntansi Pemerintah**. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Todaro, Michael P. 2006. **Pembangunan Ekonomi di Dunia ketiga**. Edisi 9, Jilid 1. Jakarta : PT. Erlangga. Alih Bahasa Drs. Haris Munandar.
- Wing Wahyu. 2007. **Analisis Ekonometrika dan Statistika dengan Eviews**. Jogjakarta : UPP STIM YKPN.
- Zaris. 1987. **Prespektif Daerah dalam Pembangunan Nasional**. Jakarta LPFE UI.

# LAMPIRAN

# LAMPIRAN A

## DATA MENTAH

Tahun	PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2000 (Juta Rupiah)	PMA (Juta Rupiah)	PMDN (Juta Rupiah)	BM (Juta Rupiah)
1978	1525090.0	79943452.7	1351374.1	18514791.0
1979	1789782.8	79943452.7	1587713.5	21676918.0
1980	2161591.6	164408593.9	1650286.7	15314816.0
1981	1785435.7	164408593.9	1932923.1	21557557.0
1982	1856207.1	165635998.4	4331562.3	25411144.0
1983	7183914.7	172716835.7	1927806.2	22762134.0
1984	7678960.6	206541259.0	5821751.0	13711493.0
1985	8034645.2	252178918.9	6973604.0	32705694.0
1986	8584764.8	269879696.6	7377950.0	33336629.0
1987	8904604.6	296221836.2	8486299.0	39357098.0
1988	10652400.3	371436008.4	1076869.8	133191267.0
1989	11340260.4	1554158124.0	7895000.0	150789130.0
1990	12133864.7	303039257.0	6597780.9	261727765.0
1991	13002573.8	733449777.2	6122047.0	305146838.0
1992	13970154.9	255669130.1	1370565.7	355013158.0
1993	34165656.5	280382161.4	2984208.9	387494644.0
1994	36345075.9	5333387333.7	6819769.2	472237785.0
1995	23361934.2	2087380934.6	4687532.5	500411517.0
1996	41863626.7	9889142736.5	4491381.0	573189940.0
1997	43130491.3	6462421752.1	7406630.8	633128974.0
1998	38064703.3	30765003389.6	2482396.4	515026595.0
1999	39395037.7	1280947118.8	1038689.1	646683760.0
2000	117782925.2	803607594.5	2451203.4	670516604.0
2001	121405047.9	1078004188.5	3211219.0	367160178.0
2002	110582043.4	1023179750.0	1541259.6	616799691.0
2003	113882345.8	892204825.5	3607653.6	811574069.0
2004	135791690.5	5626624500.0	5608617.4	776353033.0
2005	143053040.8	6138213706.0	5756775.9	799215779.0
2006	150679513.3	4255606116.5	5067314.5	209072075.0
2007	159110209.4	3536390865.0	1191875.2	373237100.0
2008	167794132.3	21573173647.0	1336340.6	530168617.0

# Lampiran B

## Unit Root Test (pada first difference tanpa intercept)

### Variabel LnPMA

ADF Test Statistic	-3,545354	1% Critical Value*	-2,699769
		5% Critical Value	-1,961409
		10% Critical Value	-1,606610

\*MacKinnon critical values for rejection of hypothesis of a unit root.

### Augmented Dickey-Fuller Test Equation

Dependent Variable: D(PMA,2)

Method: Least Squares

Date: 09/23/10 Time: 15:45

Sample(adjusted): 1981 2008

Included observations: 28 after adjusting endpoints

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
D(PMA(-1))	-0,789075	0,222566	-3,545354	0,0025
D(PMA(-1),2)	0.033887	0.206925	0.163764	0.8712
C	0.235739	0.218799	1.077426	0.2916
R-squared	0,423170	Mean dependent var		0.038832
Adjusted R-squared	0,423170	S.D. dependent var		1.942096
S.E. of regression	1.129718	Akaike info criterion		3.182771
Sum squared resid	31.90658	Schwarz criterion		3.325507
Log likelihood	-41.55879	F-statistic		27.39652
Durbin-Watson stat	1.939418	Prob(F-statistic)		0.000001

### Variabel LnPMDN

ADF Test Statistic	-3.754180	1% Critical Value*	-2.6486
		5% Critical Value	-1.9535
		10% Critical Value	-1.6221

\*MacKinnon critical values for rejection of hypothesis of a unit root.

#### Augmented Dickey-Fuller Test Equation

Dependent Variable: D(PMDN,2)

Method: Least Squares

Date: 07/22/10 Time: 12:47

Sample(adjusted): 1981 2008

Included observations: 28 after adjusting endpoints

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
D(PMDN(-1))	-1.346621	0.358699	-3.754180	0.0009
D(PMDN(-1),2)	-0.237771	0.193977	-1.225768	0.2313
R-squared	0.876299	Mean dependent var		0.023879
Adjusted R-squared	0.871541	S.D. dependent var		1.473392
S.E. of regression	0.528080	Akaike info criterion		1.629613
Sum squared resid	7.250591	Schwarz criterion		1.724770
Log likelihood	-20.81458	F-statistic		184.1843
Durbin-Watson stat	1.937399	Prob(F-statistic)		0.000000

### Variabel LnBelanja Modal

ADF Test Statistic	-4.707506	1% Critical Value*	-2.6486
		5% Critical Value	-1.9535
		10% Critical Value	-1.6221

\*MacKinnon critical values for rejection of hypothesis of a unit root.

#### Augmented Dickey-Fuller Test Equation

Dependent Variable: D(BELANJA,2)

Method: Least Squares

Date: 07/22/10 Time: 12:26

Sample(adjusted): 1981 2008

Included observations: 28 after adjusting endpoints

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
D(BELANJA(-1))	-1.684426	0.357817	-4.707506	0.0001
D(BELANJA(-1),2)	0.024836	0.199119	0.124732	0.9017
R-squared	0.814397	Mean dependent var		0.024121
Adjusted R-squared	0.807258	S.D. dependent var		1.360689
S.E. of regression	0.597375	Akaike info criterion		1.876205
Sum squared resid	9.278273	Schwarz criterion		1.971363
Log likelihood	-24.26687	F-statistic		114.0837
Durbin-Watson stat	1.881327	Prob(F-statistic)		0.000000

## Variabel LnPDRB

ADF Test Statistic	-3.312455	1% Critical Value*	-2.6486
		5% Critical Value	-1.9535
		10% Critical Value	-1.6221

\*MacKinnon critical values for rejection of hypothesis of a unit root.

### Augmented Dickey-Fuller Test Equation

Dependent Variable: D(PDRB,2)

Method: Least Squares

Date: 07/22/10 Time: 12:27

Sample(adjusted): 1981 2008

Included observations: 28 after adjusting endpoints

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
D(PDRB(-1))	-1.096615	0.331058	-3.312455	0.0027
D(PDRB(-1),2)	-0.311410	0.188151	-1.655105	0.1099
R-squared	0.804962	Mean dependent var		0.013014
Adjusted R-squared	0.797460	S.D. dependent var		1.136981
S.E. of regression	0.511692	Akaike info criterion		1.566559
Sum squared resid	6.807533	Schwarz criterion		1.661717
Log likelihood	-19.93183	F-statistic		107.3073
Durbin-Watson stat	1.832372	Prob(F-statistic)		0.000000

## Hasil pengujian *Unit root test*

Level	Variable	ADF test stat	Kesimpulan	A
First difference	Ln(PMA)	-3,545354	Stasioner pada I(1)	1%
	Ln(PMDN)	-3.754180	Stasioner pada I(1)	1%
	Ln(BM)	-4.707506	Stasioner pada I(1)	1%
	Ln(PDRB)	-3.312455	Stasioner pada I(1)	1%

# Lampiran C

## Uji Kointegrasi

ADF Test Statistic	-3.712288	1% Critical Value*	-2.6453
		5% Critical Value	-1.9530
		10% Critical Value	-1.6218

\*MacKinnon critical values for rejection of hypothesis of a unit root.

### Augmented Dickey-Fuller Test Equation

Dependent Variable: D(RESID01)

Method: Least Squares

Date: 08/10/09 Time: 23:26

Sample(adjusted): 1980 2008

Included observations: 29 after adjusting endpoints

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
RESID01(-1)	-0.709478	0.191116	-3.712288	0.0009
D(RESID01(-1))	0.602876	0.272395	2.213244	0.0355
R-squared	0.338538	Mean dependent var		8158994.
Adjusted R-squared	0.314040	S.D. dependent var		3.21E+08
S.E. of regression	2.66E+08	Akaike info criterion		41.70147
Sum squared resid	1.91E+18	Schwarz criterion		41.79577
Log likelihood	-602.6714	F-statistic		13.81868
Durbin-Watson stat	1.926085	Prob(F-statistic)		0.000930

## Lampiran D

### Hasil estimasi *Error Correction Model* (Jangka Pendek)

Dependent Variable: D(PDRB)

Method: Least Squares

Date: 07/22/10 Time: 12:55

Sample(adjusted): 1979 2008

Included observations: 30 after adjusting endpoints

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.087141	0.054639	1.594843	0.1233
D(LPMA)	0.042062	0.012640	3.327586	0.0043
D(LPMDN)	0.547945	0.152874	3.584300	0.0014
D(LBELANJA)	0.178070	0.134207	1.326834	0.1966
RESID01(-1)	-0.201758	0.104742	-1.926250	0.0655
R-squared	0.793900	Mean dependent var		0.156689
Adjusted R-squared	0.760924	S.D. dependent var		0.603113
S.E. of regression	0.294894	Akaike info criterion		0.546612
Sum squared resid	2.174065	Schwarz criterion		0.780145
Log likelihood	-3.199178	F-statistic		24.07510
Durbin-Watson stat	2.302738	Prob(F-statistic)		0.000000

### Hasil estimasi *Error Correction Model* (Jangka Panjang)

Dependent Variable: PDRB

Method: Least Squares

Date: 07/22/10 Time: 12:44

Sample: 1978 2008

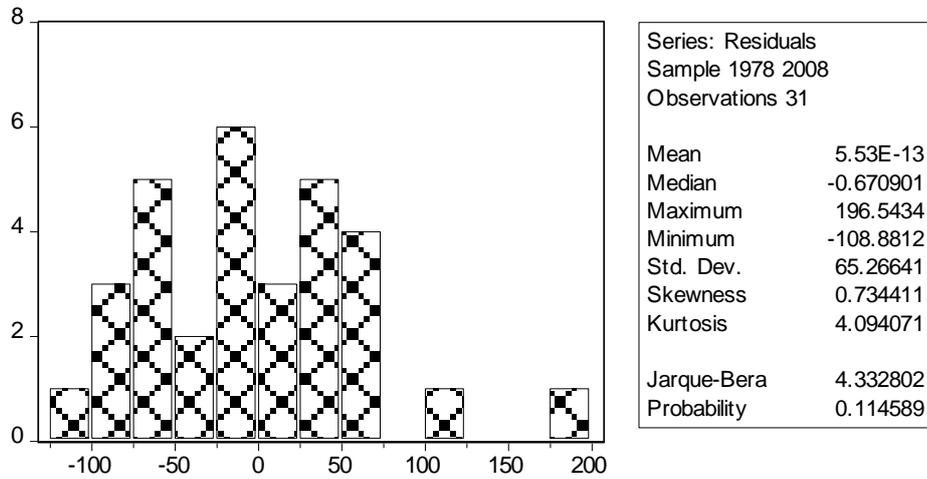
Included observations: 31

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-7.827584	2.804918	-2.790665	0.0095
LPMA	0.772904	0.321327	2.405348	0.0233
LPMDN	0.800628	0.333768	2.398760	0.0236
LBELANJA	0.293179	0.320424	0.914972	0.3683
R-squared	0.811930	Mean dependent var		16.69531
Adjusted R-squared	0.791033	S.D. dependent var		1.501632
S.E. of regression	0.686440	Akaike info criterion		2.205317
Sum squared resid	12.72239	Schwarz criterion		2.390348
Log likelihood	-30.18242	F-statistic		38.85445
Durbin-Watson stat	1.731963	Prob(F-statistic)		0.000000

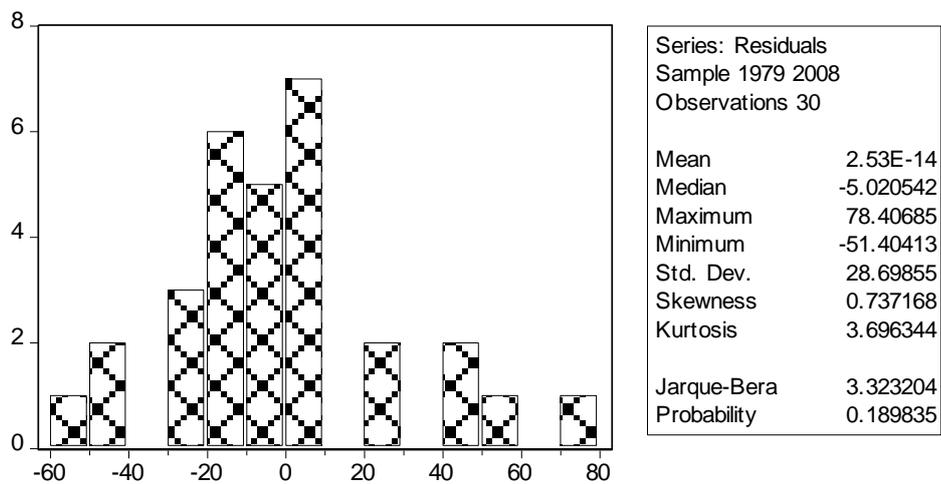
# Lampiran E

## Uji Asumsi Klasik

### Uji Normalitas *Error Correction Model* (Jangka Panjang)



### Uji Normalitas *Error Correction Model* (Jangka Pendek)



### Uji Multikolinieritas *Error Correction Model* (Jangka Pendek)

Dependent Variable: D(LPMA)

Method: Least Squares

Date: 08/02/10 Time: 09:16

Sample(adjusted): 1979 2008

Included observations: 30 after adjusting endpoints

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-0.052027	0.071580	-0.726844	0.4736
D(LPMDN)	0.301728	0.147074	2.051538	0.0500
D(LBM)	0.811093	0.177765	4.562733	0.0001
R-squared	0.776291	Mean dependent var		0.094467
Adjusted R-squared	0.759720	S.D. dependent var		0.762759
S.E. of regression	0.373892	Akaike info criterion		0.964939
Sum squared resid	3.774468	Schwarz criterion		1.105059
Log likelihood	-11.47408	F-statistic		46.84635
Durbin-Watson stat	2.229429	Prob(F-statistic)		0.000000

Dependent Variable: D(LPMDN)

Method: Least Squares

Date: 08/02/10 Time: 09:17

Sample(adjusted): 1979 2008

Included observations: 30 after adjusting endpoints

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-0.045957	0.087522	-0.525094	0.6038
D(LPMA)	0.446957	0.217865	2.051538	0.0500
D(LBM)	0.434264	0.275534	1.576080	0.1267
R-squared	0.637179	Mean dependent var		0.064310
Adjusted R-squared	0.610304	S.D. dependent var		0.728967
S.E. of regression	0.455063	Akaike info criterion		1.357876
Sum squared resid	5.591211	Schwarz criterion		1.497995
Log likelihood	-17.36813	F-statistic		23.70845
Durbin-Watson stat	2.220580	Prob(F-statistic)		0.000001

Dependent Variable: D(LBM)

Method: Least Squares

Date: 08/02/10 Time: 09:15

Sample(adjusted): 1979 2008

Included observations: 30 after adjusting endpoints

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.093507	0.055975	1.670501	0.1064
D(LPMA)	0.536764	0.117641	4.562733	0.0001
D(LPMDN)	0.194006	0.123094	1.576080	0.1267
R-squared	0.763205	Mean dependent var		0.156689
Adjusted R-squared	0.745664	S.D. dependent var		0.603113
S.E. of regression	0.304160	Akaike info criterion		0.552114
Sum squared resid	2.497859	Schwarz criterion		0.692233
Log likelihood	-5.281706	F-statistic		43.51126
Durbin-Watson stat	2.448881	Prob(F-statistic)		0.000000

### ***R<sup>2</sup> Auxiliary Regression***

No.	Persamaan	r <sup>2</sup>	R <sup>2</sup>
1.	D(LPMA)_D(LPMDN)_D(LBM)	0,776291	0,793900
2.	D(LPMDN)_D(LPMA)_D(LBM)	0,637179	0,793900
3.	D(LBM)_D(LPMA)_D(LPMDN)	0,763205	0,793900

### **Uji Multikolinieritas *Error Correction Model* (Jangka Panjang)**

Dependent Variable: LPMA

Method: Least Squares

Date: 08/10/09 Time: 22:43

Sample: 1978 2008

Included observations: 31

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	52500.93	13179.37	3.983569	0.0004
LPMDN	0.616471	0.157989	3.901994	0.0005
LBM	0.065198	0.188048	0.346710	0.7314
R-squared	0.683040	Mean dependent var		138270.9
Adjusted R-squared	0.660400	S.D. dependent var		6927.749
S.E. of regression	4037.159	Akaike info criterion		19.53624
Sum squared resid	4.56E+08	Schwarz criterion		19.67501
Log likelihood	-299.8117	F-statistic		30.16964
Durbin-Watson stat	0.914350	Prob(F-statistic)		0.000000

Dependent Variable: LPMDN

Method: Least Squares

Date: 08/10/09 Time: 22:43

Sample: 1978 2008

Included observations: 31

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-32636.76	14635.13	-2.230029	0.0339
LPMA	0.571373	0.146431	3.901994	0.0005
LBM	0.611470	0.139865	4.371854	0.0002
R-squared	0.810817	Mean dependent var		125452.1
Adjusted R-squared	0.797304	S.D. dependent var		8632.910
S.E. of regression	3886.685	Akaike info criterion		19.46027
Sum squared resid	4.23E+08	Schwarz criterion		19.59904
Log likelihood	-298.6341	F-statistic		60.00261
Durbin-Watson stat	1.211221	Prob(F-statistic)		0.000000

Dependent Variable: LBM

Method: Least Squares

Date: 08/10/09 Time: 22:40

Sample: 1978 2008

Included observations: 31

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	37036.91	14989.44	2.470866	0.0198
LPMA	0.065566	0.189110	0.346710	0.7314
LPMDN	0.663459	0.151757	4.371854	0.0002
R-squared	0.709194	Mean dependent var		129335.2
Adjusted R-squared	0.688422	S.D. dependent var		7252.969
S.E. of regression	4048.545	Akaike info criterion		19.54187
Sum squared resid	4.59E+08	Schwarz criterion		19.68064
Log likelihood	-299.8990	F-statistic		34.14210
Durbin-Watson stat	1.273164	Prob(F-statistic)		0.000000

### ***R<sup>2</sup> Auxiliary Regression***

No.	Persamaan	r <sup>2</sup>	R <sup>2</sup>
1.	LPMA_LPMDN_LBM	0,683040	0,811930
2.	LPMDN_LPMA_LBM	0,810817	0,811930
3.	LBM_LPMA_LPMDN	0,709194	0,811930

## Uji White Heterokedasticity Test

White Heteroskedasticity Test:

F-statistic	0.642781	Probability	0.748689
Obs*R-squared	6.695376	Probability	0.668801

Test Equation:

Dependent Variable: RESID^2

Method: Least Squares

Date: 08/07/09 Time: 12:15

Sample: 1978 2008

Included observations: 31

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	158989.3	955537.6	0.166387	0.8694
PMA	-292.3002	1097.317	-0.266377	0.7925
PMA^2	0.300204	0.869278	0.345348	0.7333
PMA*PMDN	0.445279	1.096410	0.406124	0.6888
PMA*BM	-0.906383	1.325166	-0.683977	0.5015
PMDN	-1323.965	1019.805	-1.298254	0.2083
PMDN^2	-1.614666	1.332617	-1.211651	0.2391
PMDN*BM	3.686771	3.063807	1.203330	0.2422
BM	1424.074	1355.828	1.050335	0.3055
BM^2	-1.850737	1.341630	-1.379469	0.1823
R-squared	0.215980	Mean dependent var		4122.294
Adjusted R-squared	-0.120029	S.D. dependent var		7370.965
S.E. of regression	7800.796	Akaike info criterion		21.01754
Sum squared resid	1.28E+09	Schwarz criterion		21.48011
Log likelihood	-315.7718	F-statistic		0.642781
Durbin-Watson stat	1.649472	Prob(F-statistic)		0.748689

White Heteroskedasticity Test:

F-statistic	2.037528	Probability	0.091912
Obs*R-squared	19.66121	Probability	0.141190

Test Equation:

Dependent Variable: RESID^2

Method: Least Squares

Date: 08/12/09 Time: 20:43

Sample: 1979 2008

Included observations: 30

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-70.43420	443.3017	-0.158885	0.8759
D(PMA)	-9.499910	11.94100	-0.795571	0.4387
(D(PMA))^2	0.196618	0.245376	0.801295	0.4355
(D(PMA))*(D(PMDN))	0.294312	0.490061	0.600563	0.5571
(D(PMA))*(D(BM))	-0.588593	0.213745	-2.753717	0.0148
(D(PMA))*(RESID01-1)	0.416022	0.234463	1.774363	0.0963
D(PMDN)	12.33655	10.34487	1.192528	0.2516
(D(PMDN))^2	-0.100207	0.168178	-0.595837	0.5602
(D(PMDN))*(D(BM))	0.071311	0.283795	0.251277	0.8050
(D(PMDN))*(RESID01-1)	-0.230416	0.253453	-0.909110	0.3777
D(BM)	4.291233	9.249621	0.463936	0.6494
(D(BM))^2	0.216474	0.115663	1.871585	0.0809
(D(BM))*(RESID01-1)	-0.323015	0.146146	-2.210231	0.0430
RESID01-1	6.625569	6.232349	1.063093	0.3046
(RESID01-1)^2	-0.078569	0.165000	-0.476175	0.6408
R-squared	0.655374	Mean dependent var		796.1534
Adjusted R-squared	0.333722	S.D. dependent var		1329.677
S.E. of regression	1085.360	Akaike info criterion		17.12406
Sum squared resid	17670082	Schwarz criterion		17.82466
Log likelihood	-241.8609	F-statistic		2.037528
Durbin-Watson stat	2.073027	Prob(F-statistic)		0.091912